



VANDIKO T. GULTOM, ST
BUPATI SAMOSIR

ARISTON TUA SIDAURUK, SE, MM
WAKIL BUPATI SAMOSIR

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DAFTAR ISI

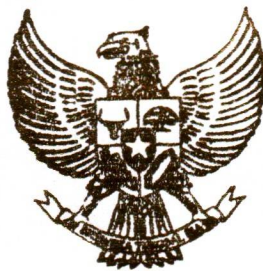
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-Undang Pembentukan daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah	9
c. Informasi Umum data Kependudukan	10
d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	14
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah	14
f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan	16
g. Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah	17
h. Pelaksanaan Program berdasarkan Urusan	38
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	47
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	47
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	51
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD	53
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan tahunan.....	65
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	88
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	92
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	92
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	95
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	95
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	109
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	113
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	182
BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN	221
3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	221
3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	222

3.3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	222
3.3.1	Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.....	223
3.4	Permasalahan dan Kendala	224
3.5	Saran dan Tindaklanjut	224
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	225
4.1	Urusan Pendidikan.....	225
4.2	Urusan Kesehatan	231
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	236
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	238
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	240
4.6	Urusan Sosial.....	246
BAB V	PENUTUP	249

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan.....	10
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Samosir Tahun 2024.....	11
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	12
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	13
Tabel 1.5	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024	14
Tabel 1.6	Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Samosir.....	14
Tabel 1.7	Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah	15
Tabel 1.8	Rician Aparatur Sipil Negara Tahun 2024	16
Tabel 1.9	Rincian Realisasi APBD Tahun 2024	18
Tabel 1.10	Rincian Pelaksanaan Program Tahun 2024	38
Tabel 1.11	Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026	52
Tabel 1.12	Makna Misi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026	53
Tabel 1.13	Rencana Pembangunan Berdasarkan RPJMD 2021-2026.....	54
Tabel 1.14	Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	65
Tabel 1.15	Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam	86
Tabel 1.16	Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata	86
Tabel 1.17	Peningkatan Aksesibilitas dan Kulaitas Infrastruktur.....	87
Tabel 1.18	Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Kabupaten Samosir Tahun 2024	91
Tabel 1.19	Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Kabupaten Samosir Tahun 2024	91
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Samosir	92
Tabel 2.2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir	92
Tabel 4.1	Target Pencapaian SPM Pendidikan	226
Tabel 4.2	Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan.....	226
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran Pendidikan.....	227
Tabel 4.4	Dukungan Personil Pendidikan.....	231
Tabel 4.5	Target Pencapaian SPM Kesehatan.....	232

Tabel 4.6	Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan	233
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran Kesehatan	235
Tabel 4.8	Dukungan Personil Kesehatan	235
Tabel 4.9	Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum	236
Tabel 4.10	Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum	236
Tabel 4.11	Alokasi Anggaran Pekerjaan Umum	237
Tabel 4.12	Dukungan Personil Pekerjaan Umum	237
Tabel 4.13	Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	238
Tabel 4.14	Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	239
Tabel 4.15	Dukungan Personil Perumahan Rakyat	240
Tabel 4.16	Target Pencapaian SPM Trantibum	241
Tabel 4.17	Realisasi Pencapaian SPM Trantibum	241
Tabel 4.18	Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana	242
Tabel 4.19	Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	243
Tabel 4.20	Dukungan Personil Penanggulangan Bencana	244
Tabel 4.21	Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	244
Tabel 4.22	Target Pencapaian SPM Sosial	246
Tabel 4.23	Realisasi Pencapaian SPM Sosial	247
Tabel 4.24	Alokasi Anggaran SPM Sosial	248
Tabel 4.25	Dukungan Personil Sosial	248



BUPATI SAMOSIR

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Bupati wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun dan dilaporkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

LPPD memuat uraian gambaran umum daerah Kabupaten Samosir, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari Capaian Kinerja Makro, Capaian kinerja keluaran (Output) dan Hasil (Outcome) penyelenggaraan urusan, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Capaian kinerja Tugas Pembantuan serta Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga dimanfaatkan pemerintah dalam melakukan pemeringkatan kinerja pemerintah daerah dan sebagai indikator pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sekaligus sebagai dasar untuk membuat langkah-langkah kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, sangat diharapkan pembinaan dan petunjuk dari Pemerintah untuk dipedomani dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Samosir. Kami berharap, melalui data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan umpan

balik bagi pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir pada masa yang akan datang, sekaligus sebagai dasar penyempurnaan laporan pada tahun-tahun mendatang.

Sekian dan terimakasih.

Pangururan, 27 Maret 2025
BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Samosir adalah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151. Kabupaten Samosir diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Dengan diresmikannya Kabupaten Samosir sebagai Daerah Otonom, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, pada tanggal 15 Januari 2004 dilantik Penjabat Bupati Samosir oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri, dan selanjutnya pada tanggal 13 September 2005 dari hasil pemilihan kepala daerah dilantik Bupati dan Wakil Bupati pertama oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia.

Sejarah Singkat Kabupaten Samosir

Sejarah terbentuknya Kabupaten Samosir, diawali dari sejarah terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang pada awal terbentuknya terdiri dari 5 (lima) distrik atau kewedanaan yaitu kewedanaan Silindung, Toba Holbung, Humbang, Samosir, dan Kewedanaan Dairi.

Mengingat demikian luasnya Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, maka pada tahun 1964 dilakukan pemekaran dengan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi yang ibukotanya berkedudukan di Sidikalang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, guna mempercepat laju pertumbuhan pembangunan serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada tahun 1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Pembangunan yang bersifat Administratif yang masing-masing wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang Pembantu Bupati, Wilayah Pembangunan I berkedudukan di

Tarutung, Wilayah Pembangunan II berkedudukan di Siborong-borong Wilayah Pembangunan III berkedudukan di Dolok Sanggul, Wilayah Pembangunan IV berkedudukan di Balige dan Wilayah Pembangunan V berkedudukan di Pangururan.

Selanjutnya, dalam pengalaman perjalanan pemerintahan, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari 27 kecamatan dan 971 desa masih dirasakan sangat luas, bahkan masih ada wilayah desa yang harus dijangkau dalam waktu tempuh lebih dari satu hari yang berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan pembangunan dan kecepatan pelayanan.

Untuk memperpendek rentang kendali serta mempercepat pelayanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara bersama masyarakat yang berada di bona pasogit dan putera-puteri Tapanuli Utara yang tinggal di perantauan, khususnya yang tinggal di Medan dan Jakarta sepakat mengusulkan pemekaran kembali Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara menjadi 2 (dua) kabupaten yang direalisasikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret 1999 di Medan.

Di tengah perjalanan 4 (empat) tahun usia Kabupaten Toba Samosir, masyarakat Samosir yang bermukim di bona pasogit bersama putera-puteri Samosir yang tinggal di perantauan kembali melakukan upaya pemekaran untuk membentuk Samosir menjadi kabupaten baru.

Proses panjang perjuangan pembentukan Kabupaten Samosir dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 27 Mei 2002 penyampaian aspirasi masyarakat Samosir kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Toba Samosir. Atas dasar penyampaian aspirasi Masyarakat Samosir, Komisi A DPRD Kabupaten Toba Samosir mengadakan jajak pendapat pada 9 (sembilan) kecamatan yang berada di Wilayah Samosir.
- b) Pada tanggal 20 Juni 2002, DPRD Kabupaten Toba Samosir menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka pembahasan dan menyikapi usul Pembentukan Kabupaten, hasilnya melalui musyawarah/mufakat ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Toba Samosir Untuk Pembentukan Kabupaten Samosir.
- c) Dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 171/866/DPRD/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Usul Pembentukan Kabupaten Samosir, kemudian

disusul dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 171/878/DPRD/2002 tanggal 24 Juni 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan masing-masing kepada: DPR RI Cq. Komisi II DPR RI, Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara.

- d) Pada tanggal 26 Juni 2002 beberapa utusan atau delegasi masyarakat Samosir didampingi Pimpinan DPRD Kabupaten Toba Samosir menemui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pembentukan Kabupaten Samosir, sebagai daerah otonom yang baru.
- e) Pada tanggal 29 Juni 2002, Tim Komisi II DPR RI dibawah Pimpinan Bapak Prof. DR. Manasse Malo bersama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengadakan kunjungan ke Samosir yang disambut Bupati Toba Samosir dan Unsur DPRD Kabupaten Toba Samosir serta masyarakat.
- f) Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan perjuangan segenap komponen masyarakat Samosir, baik yang tinggal di bona pasogit maupun yang berada di perantauan, maka berdasarkan Hak Usul Inisiatif DPR RI ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 18 Desember 2003.
- g) Kemudian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004 di Medan meresmikan Pembentukan Kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah administrasi pemerintahan sebanyak 9 (sembilan) kecamatan dan 111 (seratus sebelas desa) serta 6 (enam) kelurahan.

Atas dasar itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005 disepakatilah bahwa tanggal 7 Januari ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Samosir.

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21.27 tanggal 6 Januari 2004 diangkat dan ditetapkan Penjabat Bupati Samosir Drs. Wilmar Elyascher Simanjorang, M.Si yang dilantik pada tanggal 15 Januari 2004 oleh Gubernur Sumatera Utara.

Selanjutnya pada tanggal 27 Pebruari 2004 berbagai elemen masyarakat, para tokoh pemrakarsa, perantau dan tokoh masyarakat dari seluruh kecamatan, Penjabat Bupati Samosir beserta jajarannya, Para Camat, seluruh Kepala Desa/Lurah serta Lembaga-Lembaga Swasta yang ada di Kabupaten Samosir melaksanakan pesta

rakyat di lapangan Pangururan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas telah berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Samosir.

Sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan Pemerintah melalui proses demokrasi-ketatanegaraan, pada bulan Juni 2004 diadakan Pemilihan Legislatif untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan berdasarkan hasil Pemilihan dimaksud terpilih 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Samosir Periode 2004-2009 dengan unsur pimpinan terdiri dari: Ketua; Jhoni Naibaho, Wakil Ketua; Drs. Abad Sinaga dan Oloan Simbolon, ST.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan era reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya antara lain menetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu paket melalui pemilihan langsung.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pada tanggal 27 Juni 2005 untuk pertama kalinya diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir yakni dengan terpilihnya Ir. Mangindar Simbolon dan Ober Sihol Parulian Sagala, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir dengan masa jabatan 2005-2010, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-740 tanggal 12 Agustus 2005, kedua pejabat tersebut dilantik pada tanggal 13 September 2005, oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Samosir.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Samosir, sesuai amanat Undang-undang dan berbagai ketentuan yang berlaku sekaitan dengan tugas dan kewajiban pemerintahan, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Samosir telah berhasil menetapkan berbagai peraturan daerah baik menyangkut tentang APBD, Retribusi dan pajak daerah, kelembagaan dan organisasi perangkat daerah.

Kemudian berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif tanggal 9 April 2009 terpilih 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Samosir Periode 2009-2014 dengan unsur pimpinan terdiri dari: Ketua; Tongam Sitinjak, ST, Wakil Ketua; Jonny Sihotang dan Drs. Lundak Sagala.

Selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2010 untuk yang kedua kalinya diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir secara langsung yakni dengan terpilihnya Ir. Mangindar

Simbolon dan Ir. Mangadap Sinaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir untuk masa jabatan 2010-2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-680 Tahun 2010, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-681 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara, kedua pejabat tersebut dilantik pada tanggal 15 September 2010 oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Samosir.

Atas dasar tersebut dan beberapa catatan peristiwa dalam sejarah pembentukan Kabupaten Samosir, maka selanjutnya mulai Tahun 2011 berdasarkan kesepakatan antara Bupati Samosir dan DPRD Kabupaten Samosir ditetapkan:

- 1) bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Samosir tetap dilakukan pada tanggal 7 Januari setiap tahun melalui sidang Paripurna Istimewa DPRD;
- 2) perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir dilakukan pada bulan Pebruari setiap tahun dan Perayaan ditetapkan pada tanggal 27 Pebruari setiap tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir.

Kemudian dalam rangka memperpendek rentang kendali birokrasi serta mendekatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka Pemerintah Kabupaten Samosir pada awal Agustus 2011 telah meresmikan 17 (tujuh belas) desa baru pada 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Samosir yakni: 2 (dua) desa di Kecamatan Harian, 2 (dua) desa di Kecamatan Sitio-tio, 5 (lima) desa di Kecamatan Simanindo, 3 (tiga) desa di Kecamatan Nainggolan; satu desa di Kecamatan Sianjur Mula-mula, dan 4 (empat) desa di Kecamatan Palipi. Dengan demikian, secara administratif Kabupaten Samosir telah memiliki 128 desa dan 6 (enam) kelurahan pada 9 (sembilan) kecamatan.

Seiring perjalanan waktu, pada tanggal 24 Juli 2012 masyarakat Kabupaten Samosir berduka dengan meninggalnya Wakil Bupati Samosir Ir. Mangadap Sinaga. Berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang Undang 32 Tahun 2004 dan Pasal 131 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, DPRD Kabupaten Samosir memilih Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Wakil Bupati Samosir yang kemudian pada tanggal 1 April 2014 dilakukan pelantikan Wakil Bupati yang baru oleh Gubernur Sumatera Utara yakni Drs. Rapidin Simbolon, MM berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.12-1230 Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif tanggal 9 April 2014 terpilih 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Samosir Periode 2014-2019 dengan unsur pimpinan terdiri dari: Ketua; Rismawati Simarmata, Dipl. Hotlier, Wakil Ketua; Drs. Jonner Simbolon dan Nurmerita Sitorus, S.Sos.

Dengan berakhirnya masa jabatan Ir. Mangindar Simbolon, MM dan Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengangkat Anthony Siahaan, SE, ATD, MT sebagai Penjabat (Pj) Bupati Samosir yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 - 5261 tanggal 23 September 2015, dan dilantik pada tanggal 16 Oktober 2015 oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan tugas:

1. Menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Samosir;
2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir yang defenitif; dan
3. Menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil.

Pelantikan Penjabat Bupati ini dilakukan untuk mengisi kekosongan Jabatan Bupati Samosir sampai dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Samosir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Setelah terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Samosir periode 2016-2021, bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Pebruari 2016 di Medan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12.782 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Samosir Propinsi Sumatera Utara dan Nomor 132.12.783 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif tanggal 17 April 2019 terpilih 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Samosir Periode 2019-2024 dengan unsur pimpinan terdiri dari: Ketua; Saut Martua Tamba, dan Wakil Ketua; Basrun Sihombing dan Nasib Simbolon.

Namun pada tanggal 19 April 2020 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir meninggal dunia, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menyatakan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena meninggal dunia.

Kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/492/KPTS/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, Memberhentikan dengan hormat Ir. Basrun Sihombing dari Kedudukannya Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dan Mengangkat Saudara Batahan Siringoringo, SE.,MM sebagai pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/491/KPTS/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, Memberhentikan dengan hormat Ir. Basrun Sihombing dari Kedudukannya Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dan Mengangkat Saudara Pantas Marroha Sinaga sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Sisa Masa Jabatan 2019 - 2024.

Sesuai dengan agenda Nasional bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Bupati dan Wakil Bupati Samosir periode 2016-2021 kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir dan sebagaimana bunyi Pasal 70 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, selanjutnya untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada masa pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri menetapkan Penjabat Sementara Bupati Samosir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-2969 tanggal 24 September Tahun 2020 Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara, telah ditunjuk dan ditugaskan Lasro Marbun, SH, M.Hum untuk melaksanakan tugas sebagai Penjabat Sementara Bupati Samosir selama Bupati dan Wakil Bupati Samosir melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada serentak Tahun 2020 mulai dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.

Seiring berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Periode 2016-2021, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Samosir, diangkat Penjabat Bupati Samosir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-665 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara atas nama Harianto Butar Butar, SE, M.Si

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Samosir periode 2021-2024, Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 26 April 2021 di Medan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12.1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara.

Untuk menentukan prioritas dan arah pembangunan Kabupaten Samosir kedepan, telah dirumuskan Visi dan Misi Kabupaten Samosir tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 dengan visi **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SAMOSIR YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT SECARA EKONOMI, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN”** dan Misi:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih;
2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya.

Pada tanggal 9 September 2021 terjadi pergantian Ketua DPRD Kabupaten Samosir, dengan diresmikannya Dra. Sorta Ertaty Siahaan sebagai Pengganti Ketua DPRD Kabupaten Samosir sisa masa jabatan 2019-2024, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/487/KPTS/2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

Kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/879/KPTS/2022 tanggal 9 Nopember 2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, memberhentikan dengan hormat Batahan Siringoringo, SE. MM

(Almarhum) dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/ 401/ KPTS/ 2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, meresmikan pengangkatan Marco Christian Simbolon, SIP sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Selanjutnya berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif tanggal 14 Februari 2024 terpilih 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Samosir Periode 2024-2029 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/694/KPTS/2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Masa Jabatan 2024-2029.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Samosir merupakan wilayah jajaran dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 904-2157 m di atas permukaan laut dan secara geografis terletak pada 2°21' 38"-2°49' 48" Lintang Utara dan 98°24' 00"-99°01' 48" Bujur Timur.

Sesuai dengan letaknya yang berada di garis khatulistiwa, Kabupaten Samosir tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 17 °C - 19°C dan rata-rata kelembaban udara 85,04 persen. Rata-rata tinggi curah hujan di Kabupaten Samosir sebesar ± 1.597,10mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 191,5hari.

1. Batas Administrasi Daerah

Secara administrasi Kabupaten Samosir memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir

2. Luas wilayah

Kabupaten Samosir memiliki luas wilayah 2.069,05 Km², yang terdiri dari luas daratan seluas 1.444,25Km² dan luas danau seluas 624,80Km² yang secara Administratif terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 128 (seratus dua puluh delapan) Desa dan 6 (enam) Kelurahan. Luas wilayah per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Luas (%)
1	Sianjur Mula-mula	140,24	9,71
2	Harian	560,45	38,81
3	Sitio-tio	50,76	3,51
4	Onan Runggu	60,89	4,22
5	Nainggolan	87,86	6,08
6	Palipi	129,55	8,97
7	Pangururan	121,43	8,41
8	Ronggur Nihuta	94,87	6,57
9	Simanindo	198,20	13,72
Jumlah		1.444,25	100,00

Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka 2024

3. Topografi

Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 904-2.157m di atas permukaan laut, dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu; datar, landai, Miring dan terjal serta struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik.

c. Infomasi Umum Data Kependudukan

Salah satu masalah dalam pembangunan yang perlu ditangani adalah masalah kependudukan, mencakup jumlah pertumbuhan penduduk, komposisi dan penyebaran penduduk yang merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika kualitas manusianya baik, dan sebaliknya akan menjadi beban pembangunan bila kualitas manusianya rendah. Untuk itu, peningkatan kualitas penduduk perlu menjadi perhatian dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta, karena data kependudukan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, misalnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan masyarakat, tempat ibadah, rekreasi, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tahun 2023 penduduk Kabupaten Samosir sebanyak 146.214 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 42.946. Selanjutnya berdasarkan pemutakhiran tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Samosir jumlah penduduk Kabupaten Samosir mengalami

peningkatan sebesar 2,50% menjadi 149.875 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 45.069. Secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Samosir Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
1	Sianjur Mula-mula	140,24	3.239	10.732	77
2	Harian	560,45	3.223	11.092	20
3	Sitio-tio	50,76	2.524	8.582	169
4	Onan Runggu	60,89	3.689	11.547	190
5	Nainggolan	87,86	4.212	13.457	153
6	Palipi	129,55	5.769	19.591	151
7	Ronggur Nihuta	94,87	2.801	10.335	109
8	Pangururan	121,43	11.694	39.064	322
9	Simanindo	198,20	7.918	25.475	129
Tahun 2024		1.444,25	45.069	149.875	104
Tahun 2023		1.444,25	42.946	146.214	101
Tahun 2022		1.444,25	41.607	143.168	99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Samosir masih terdapat ketimpangan dan tidak merata. Ketimpangan dan ketidakmerataan sebaran penduduk tersebut terjadi karena variasi luas antar daerah yang diukur dengan kepadatan penduduk.

Kabupaten Samosir mempunyai luas daratan 1.444,25 Km² dengan kepadatan penduduk tahun 2024 mencapai 104 jiwa per Km². Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Harian dengan kepadatan penduduknya hanya 20 jiwa per Km², sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Sitio-tio dengan kepadatan penduduknya sebesar 169 jiwa per Km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Pangururan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 322 jiwa per Km², hal ini dimungkinkan mengingat Kecamatan Pangururan merupakan Ibu Kota Kabupaten, pusat perdagangan dan pusat pemerintahan serta tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, perekonomian dan sektor lainnya lebih memadai bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Besar kecilnya rasio jenis kelamin antara lain dipengaruhi oleh pola migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut dan sebaliknya, jika rasio jenis kelamin di bawah 100, berarti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah perempuan.

Tabel 1. 3
Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sianjur Mula-mula	5.344	5.388	10.732	99,18
2	Harian	5.548	5.544	11.092	100,07
3	Sitio-tio	4.273	4.309	8.582	99,16
4	Onan Runggu	5.670	5.877	11.547	96,48
5	Nainggolan	6.615	6.842	13.457	96,68
6	Palipi	9.674	9.917	19.591	97,55
7	Ronggur Nihuta	5.121	5.214	10.355	98,22
8	Pangururan	19.571	19.493	39.064	100,40
9	Simanindo	12.616	12.859	25.475	98,11
Tahun 2024		74.432	75.443	149.875	98,66
Tahun 2023		72.479	73.735	146.214	98,30
Tahun 2022		70.913	72.555	143.168	98,14

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Samosir tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah penduduk perempuan, dengan perbandingan setiap 98 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

3. Struktur Usia

Bila dilihat komposisi penduduk menurut usia, penduduk Kabupaten Samosir masih tergolong struktur usia produktif, hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia produktif usia 15 tahun sampai dengan usia kurang dari 64 tahun sebesar 65,31% atau 97.890 jiwa, diikuti usia 0-15 tahun sebesar 25,49% atau 38.213 jiwa dan usia 65 tahun keatas sebesar 9,18% atau 13.772 jiwa. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 4
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Golongan Umur	Jumlah		Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	4509	4131	8640

Golongan Umur	Jumlah		Total
	Laki-laki	Perempuan	
5-9	6886	6545	13431
10-14	8352	7790	16142
15-19	7676	7534	15210
20-24	7209	7021	14230
25-29	6026	5482	11508
30-34	5312	4529	9841
35-39	5203	4575	9778
40-44	5007	4830	9837
45-49	4320	4034	8354
50-54	3518	3495	7013
55-59	3032	3419	6451
60-64	2495	3173	5668
65-69	1997	2939	4936
70-74	1377	2286	3663
>75	1513	3660	5173
Jumlah	74.432	75.443	149.875
Angka beban Tanggungan Anak			39.03
Angka Beban Tanggungan Lanjut Usia			53.10
Angka Beban Tanggungan			14.06

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir 2025

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa angka beban tanggungan tercatat sebesar 53,10. Angka ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berumur kurang dari 15 tahun ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun dikali 100. Dari angka ketergantungan sebesar 53,10 diatas berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 53 orang usia belum produktif dan tidak produktif lagi (39 orang anak dan 14 orang lanjut usia). Angka ini berkurang dari angka beban tanggungan tahun 2023 sebesar 54,75

4. Jenis Pekerjaan

Struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Samosir menunjukkan bahwa sektor Pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling dominan jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari tabel di bawah ini, diperoleh gambaran bahwa sekitar 59,23% penduduk Kabupaten Samosir bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor jasa dan lainnya sebesar 31,97% dan sisanya sebesar 8,80% bekerja pada sektor manufaktur.

Tabel 1. 5
Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Lapangan Usaha	Persentase		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pertanian	60,63	57,71	59,23
2	Manufaktur	10,31	7,17	8,80
3	Jasa lainnya	29,06	35,12	31,97
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir 2025

d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Secara Administratif terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 128 (seratus dua puluh delapan) Desa dan 6 (enam) Kelurahan. Rincian Jumlah Kecamatan dan Desa serta Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Samosir

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Sianjur Mula-mula	12	-
2	Harian	13	-
3	Sitio-tio	8	-
4	Onan Runggu	12	-
5	Nainggolan	13	2
6	Palipi	17	-
7	Pangururan	25	3
8	Ronggur Nihuta	8	-
9	Simanindo	20	1
Jumlah		128	6

Sumber: Samosir Dalam Angka 2025

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samosir terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 14 Dinas, 5 Badan, 1 RSUD dan 9 Kecamatan. Secara rinci dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.7
Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	DASAR HUKUM
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMOSIR	
3	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR	
4	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN SAMOSIR	
5	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR	
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMOSIR	
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SAMOSIR	
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMOSIR	
9	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMOSIR	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMOSIR	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR	
12	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMOSIR	
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR	
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR	
17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR	
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SAMOSIR	
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR	
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMOSIR	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR	
22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMOSIR	
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HADRIANUS SINAGA KABUPATEN SAMOSIR	
24	KECAMATAN PANGURURAN	
25	KECAMATAN SIMANINDO	

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	DASAR HUKUM
26	KECAMATAN RONGGURNIHUTA	
27	KECAMATAN PALIPI	
28	KECAMATAN NANINGGOLAN	
29	KECAMATAN ONANRUNGU	
30	KECAMATAN HARIAN	
31	KECAMATAN SIANJURMULAMULA	
32	KECAMATAN SITITIO	

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.8
Rincian Aparatur Sipil Negara Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN ASN (ORANG)			JUMLAH
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	Sekretariat Daerah	16	23	54	93
2	Sekretariat DPRD	5	2	10	17
3	Inspektorat Daerah	4	18	25	47
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	9	1463	12	1484
5	Dinas Kesehatan	6	450	37	493
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8	5	38	51
7	Satuan Polisi Pamong Praja	15	2	23	40
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	8	15	29
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	9	2	19	30
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	9	13	28
11	Dinas Kependudukan dan	5	1	8	14

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN ASN (ORANG)			JUMLAH
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
	Pencatatan Sipil				
12	Dinas Perhubungan	9	1	20	30
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	2	12	19
14	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	26	36
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	4	10	17
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	5	18	30
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	34	65	110
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7	7	22	36
19	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	21	6	24	51
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	5	11	22
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	6	14
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	10	16
23	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga	14	0	245	259
24	Kecamatan Pangururan	9	0	8	17
25	Kecamatan Simanindo	8	0	10	18
26	Kecamatan Ronggumihuta	3	0	6	9
27	Kecamatan Palipi	7	0	11	18
28	Kecamatan Nainggolan	8	0	11	19
29	Kecamatan Onanrunggu	7	0	8	15
30	Kecamatan Harian	8	0	4	12
31	Kecamatan Sianjurnulamula	8	0	6	14
32	Kecamatan Siotio	5	0	3	8
	JUMLAH	252	2054	790	3096

Sumber Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Samosir 2025

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ringkasan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Unaudited) disajikan sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 1.9
Rincian Realisasi APBD Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	927.767.529.252,00	911.676.001.808,07	98,27	867.708.830.531,30
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.923.559.252,00	89.319.964.884,07	109,03	69.628.488.028,30
4.1.01	Pajak Daerah	28.477.260.949,00	32.521.241.071,00	114,20	21.331.091.060,52
4.1.01.06	Pajak Hotel	5.400.000.000,00	11.452.300.149,00	212,08	3.650.686.736,43
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	5.400.000.000,00	11.452.300.149,00	212,08	3.650.686.736,43
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	5.400.000.000,00	11.452.300.149,00	212,08	3.650.686.736,43
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.264.000.000,00	2.273.929.976,00	69,67	1.733.685.155,09
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.264.000.000,00	2.273.929.976,00	69,67	1.733.685.155,09
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.264.000.000,00	2.273.929.976,00	69,67	1.733.685.155,09
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.700.000.000,00	1.576.807.532,00	58,40	619.149.790,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.700.000.000,00	1.576.807.532,00	58,40	619.149.790,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.700.000.000,00	1.576.807.532,00	58,40	619.149.790,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	514.402.350,00	85,73	435.720.848,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00	514.402.350,00	85,73	435.720.848,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00	514.402.350,00	85,73	435.720.848,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000,00	5.005.703.659,00	125,14	4.471.707.504,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.000.000.000,00	5.005.703.659,00	125,14	4.471.707.504,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.000.000.000,00	5.005.703.659,00	125,14	4.471.707.504,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	100.000.000,00	68.595.300,00	68,60	70.673.360,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	100.000.000,00	68.595.300,00	68,60	70.673.360,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	100.000.000,00	68.595.300,00	68,60	70.673.360,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	18.000.000,00	10.803.446,00	60,02	7.627.055,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	18.000.000,00	10.803.446,00	60,02	7.627.055,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	18.000.000,00	10.803.446,00	60,02	7.627.055,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	1.247.630.944,00	41,59	856.869.947,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00	1.247.630.944,00	41,59	856.869.947,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00	1.247.630.944,00	41,59	856.869.947,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.395.260.949,00	3.410.555.698,00	100,45	3.024.731.247,00
4.1.01.15.01	PBBP2	3.395.260.949,00	3.410.555.698,00	100,45	3.024.731.247,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.395.260.949,00	3.410.555.698,00	100,45	3.024.731.247,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	6.960.512.017,00	116,01	6.460.239.418,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	6.960.512.017,00	116,01	6.460.239.418,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	6.960.512.017,00	116,01	6.460.239.418,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.756.527.288,00	9.428.616.223,00	87,65	4.685.184.249,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.896.418.000,00	2.708.958.100,00	69,52	2.134.480.300,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	517.000.000,00	493.705.100,00	95,49	293.343.300,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	20.000.000,00	77.627.000,00	388,14	5.436.500,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	497.000.000,00	416.078.100,00	83,72	287.906.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.250.600.000,00	799.020.000,00	63,89	559.826.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.250.600.000,00	799.020.000,00	63,89	559.826.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	164.800.000,00	32,96	128.772.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	164.800.000,00	32,96	128.772.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.500.318.000,00	1.251.433.000,00	83,41	1.142.029.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.500.318.000,00	1.251.433.000,00	83,41	1.142.029.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.500.000,00	0,00	0,00	7.660.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	8.500.000,00	0,00	0,00	7.660.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.223.717.288,00	6.277.266.306,00	120,17	2.266.824.249,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	886.643.288,00	1.021.417.944,00	115,20	574.779.149,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	140.073.288,00	125.477.714,00	89,58	139.248.549,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	28.100.000,00	456.000.000,00	1.622,78	16.700.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	255.720.000,00	142.955.230,00	55,90	103.871.600,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	55.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	407.750.000,00	296.985.000,00	72,84	314.459.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	50.000.000,00	45.500.000,00	91,00	86.520.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	50.000.000,00	45.500.000,00	91,00	86.520.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	151.600.000,00	45.249.000,00	29,85	8.265.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	151.600.000,00	45.249.000,00	29,85	8.265.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	160.000.000,00	0,00	0,00	9.980.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	160.000.000,00	0,00	0,00	9.980.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	338.000.000,00	4.350.000,00	1,29	26.302.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	338.000.000,00	4.350.000,00	1,29	26.302.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	316.999.000,00	58.920.000,00	18,59	44.055.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	316.999.000,00	58.920.000,00	18,59	44.055.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.209.600.000,00	4.991.758.862,00	155,53	1.416.376.100,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.209.600.000,00	4.991.758.862,00	155,53	1.416.376.100,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	110.875.000,00	110.070.500,00	99,27	100.547.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	110.875.000,00	110.070.500,00	99,27	100.547.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.636.392.000,00	442.391.817,00	27,03	283.879.700,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	283.004.700,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	283.004.700,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7.625.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7.625.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.628.767.000,00	442.391.817,00	27,16	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.628.767.000,00	442.391.817,00	27,16	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	6.936.821.342,39	99,10	6.680.842.646,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	7.000.000.000,00	6.936.821.342,39	99,10	6.680.842.646,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	7.000.000.000,00	6.936.821.342,39	99,10	6.680.842.646,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	7.000.000.000,00	6.936.821.342,39	99,10	6.680.842.646,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.689.771.015,00	40.433.286.247,68	113,29	36.931.370.072,78
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	302.787.000,00	0,00	1.183.613.507,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	269.169.000,00	0,00	788.607.507,00
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	613.306.061,00
4.1.04.01.02.0020	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	0,00	140.175.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	7.750.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	121.244.000,00	0,00	175.301.446,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	33.618.000,00	0,00	395.006.000,00
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	395.006.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	33.618.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.550.000.000,00	1.230.655.471,95	48,26	1.421.002.892,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.550.000.000,00	1.230.655.471,95	48,26	1.421.002.892,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.550.000.000,00	1.230.655.471,95	48,26	1.421.002.892,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.000.000.000,00	0,00	0,00	636.752.747,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	0,00	0,00	636.752.747,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	0,00	0,00	636.752.747,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.800.000.000,00	4.313.033.389,07	154,04	2.676.901.136,40
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.800.000.000,00	4.313.033.389,07	154,04	2.676.901.136,40
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.800.000.000,00	4.313.033.389,07	154,04	2.676.901.136,40
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	139.771.015,00	199.262.016,36	142,56	316.326.578,42
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	139.771.015,00	199.262.016,36	142,56	316.326.578,42
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	139.771.015,00	199.262.016,36	142,56	316.326.578,42
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	200.000.000,00	243.725.142,00	121,86	207.296.844,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	50.236.270,00	0,00	15.520.188,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	50.236.270,00	0,00	15.520.188,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	18.581.392,00	0,00	4.198.735,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	18.581.392,00	0,00	4.198.735,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	4.448.501,00	0,00	2.024.760,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	4.448.501,00	0,00	2.024.760,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	458.355,00	0,00	0,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	0,00	458.355,00	0,00	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	746.442,00	0,00	0,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	746.442,00	0,00	0,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	43.011,00	0,00	0,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	43.011,00	0,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	200.000.000,00	169.211.171,00	84,61	185.553.161,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	200.000.000,00	169.211.171,00	84,61	185.553.161,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	17.618.150,00	0,00	34.884.363,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	17.618.150,00	0,00	34.884.363,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	17.618.150,00	0,00	34.884.363,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	273.258.594,54	0,00	12.580.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	273.258.594,54	0,00	12.580.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	273.258.594,54	0,00	12.580.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	27.000.000.000,00	33.852.946.483,76	125,38	30.394.159.032,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	27.000.000.000,00	33.852.946.483,76	125,38	30.394.159.032,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	27.000.000.000,00	33.852.946.483,76	125,38	30.394.159.032,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	47.852.972,96
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	47.852.972,96
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	47.852.972,96
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	81.923.559.252,00	89.319.964.884,07	109,03	69.628.488.028,30
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	837.843.970.000,00	815.139.899.634,00	97,29	790.333.375.202,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	804.186.470.000,00	789.717.686.448,00	98,20	752.570.236.134,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	682.279.532.000,00	667.810.748.448,00	97,88	645.136.685.134,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.844.870.000,00	16.056.940.000,00	115,98	16.678.732.483,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.657.514.000,00	3.162.613.000,00	119,01	7.934.506.483,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.605.625.000,00	5.631.715.000,00	122,28	4.863.892.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	424.935.000,00	364.066.000,00	85,68	424.935.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	266.375.000,00	293.490.000,00	110,18	272.084.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	237.881.000,00	232.274.000,00	97,64	12.581.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	6.371.000,00	0,00	14.841.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	73.741.000,00	105.643.000,00	143,26	81.140.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.664.353.000,00	2.159.885.000,00	129,77	1.457.361.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	174.069.000,00	360.506.000,00	207,11	357.451.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00	1.143.842.000,00	100,00	1.259.941.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	2.596.535.000,00	2.596.535.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	451.925.376.000,00	451.424.590.440,00	99,89	432.618.764.342,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	376.993.567.000,00	376.993.567.000,00	100,00	432.618.764.342,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1.787.445.000,00	1.286.659.440,00	71,98	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	31.879.498.000,00	31.879.498.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.458.041.000,00	13.458.041.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	26.606.825.000,00	26.606.825.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	116.808.023.000,00	109.114.459.606,00	93,41	97.090.526.323,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	479.019.203,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	4.161.913.716,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	4.364.176.099,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	7.033.161.050,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	12.821.957.902,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	51.109.430.550,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.105.436.180,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.036.255.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.454.123.640,00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.220.251.776,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	119.997.000,00	111.288.000,00	92,74	771.188.617,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	1.499.850.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.033.762.590,00
4.2.01.01.03.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	526.283.000,00	523.909.220,00	99,55	0,00
4.2.01.01.03.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	15.083.444.000,00	14.459.078.262,00	95,86	0,00
4.2.01.01.03.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	2.088.898.000,00	2.041.517.670,00	97,73	0,00
4.2.01.01.03.0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	357.818.000,00	357.450.000,00	99,90	0,00
4.2.01.01.03.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	32.272.193.000,00	29.902.572.869,00	92,66	0,00
4.2.01.01.03.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	17.772.795.000,00	17.178.043.800,00	96,65	0,00
4.2.01.01.03.0078	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	6.179.199.000,00	6.047.427.350,00	97,87	0,00
4.2.01.01.03.0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate	17.433.187.000,00	16.644.081.210,00	95,47	0,00
4.2.01.01.03.0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	8.300.000.000,00	8.141.369.226,00	98,09	0,00
4.2.01.01.03.0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	799.707.000,00	799.707.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03.0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate	3.090.000.000,00	1.020.326.900,00	33,02	0,00
4.2.01.01.03.0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate	1.631.598.000,00	1.210.319.999,00	74,18	0,00
4.2.01.01.03.0094	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	8.133.785.000,00	7.684.310.100,00	94,47	0,00
4.2.01.01.03.0095	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	3.019.119.000,00	2.993.058.000,00	99,14	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	99.701.263.000,00	91.214.758.402,00	91,49	98.748.661.986,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	27.843.240.000,00	27.696.333.462,00	99,47	27.799.061.970,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.305.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	44.952.904.000,00	44.952.904.000,00	100,00	43.507.308.700,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.729.250.000,00	1.729.250.000,00	100,00	1.516.975.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	840.051.000,00	840.051.000,00	100,00	932.308.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	1.961.033.700,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	0,00	0,00	0,00	26.552.700,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	11.826.945.160,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.868.471.000,00	2.672.207.429,00	69,08	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	464.711.000,00	453.425.320,00	97,57	422.862.000,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.838.000.000,00	1.708.184.000,00	92,94	1.165.875.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	602.840.000,00	600.953.000,00	99,69	438.250.350,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	3.983.403.700,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	219.400.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	650.000.000,00	650.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00	193.154.305,00	9,79	3.643.685.706,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.195.000.000,00	1.195.000.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.999.360.000,00	1.599.082.550,00	79,98	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	34.560.000,00	17.280.000,00	50,00	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.847.290.000,00	1.261.139.889,00	44,29	0,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	256.601.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.576.225.000,00	5.615.793.447,00	65,48	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	682.279.532.000,00	667.810.748.448,00	97,88	645.136.685.134,00
4.2.01.05	Dana Desa	103.519.877.000,00	103.519.877.000,00	100,00	101.652.622.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	103.519.877.000,00	103.519.877.000,00	100,00	101.652.622.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	103.519.877.000,00	103.519.877.000,00	100,00	101.652.622.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	18.387.061.000,00	18.387.061.000,00	100,00	5.780.929.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	18.387.061.000,00	18.387.061.000,00	100,00	5.780.929.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	18.387.061.000,00	18.387.061.000,00	100,00	5.780.929.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	121.906.938.000,00	121.906.938.000,00	100,00	107.433.551.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.657.500.000,00	25.422.213.186,00	75,53	37.763.139.068,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	33.000.000.000,00	25.422.213.186,00	77,04	31.037.327.598,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.000.000.000,00	25.422.213.186,00	77,04	31.037.327.598,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.422.533.202,00	2.908.754.295,00	34,54	6.702.286.676,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.206.630.983,00	2.444.775.333,00	58,12	4.206.630.983,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.696.036.251,00	4.769.689.050,00	61,98	7.696.036.251,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.350.870.947,00	420.925.491,00	31,16	1.108.445.071,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.323.928.617,00	14.878.069.017,00	131,39	11.323.928.617,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	657.500.000,00	0,00	0,00	6.725.811.470,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	657.500.000,00	0,00	0,00	6.725.811.470,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	657.500.000,00	0,00	0,00	6.725.811.470,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	33.657.500.000,00	25.422.213.186,00	75,53	37.763.139.068,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	837.843.970.000,00	815.139.899.634,00	97,29	790.333.375.202,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.000.000.000,00	7.216.137.290,00	90,20	7.746.967.301,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000.000,00	7.216.137.290,00	90,20	7.746.967.301,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.000.000.000,00	7.216.137.290,00	90,20	7.746.967.301,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.000.000.000,00	7.216.137.290,00	90,20	7.746.967.301,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	8.000.000.000,00	7.216.137.290,00	90,20	7.746.967.301,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.000.000.000,00	7.216.137.290,00	90,20	7.746.967.301,00
	JUMLAH PENDAPATAN	927.767.529.252,00	911.676.001.808,07	98,27	867.708.830.531,30
5	BELANJA DAERAH	979.740.001.962,00	937.525.096.241,17	95,69	880.482.580.805,09
5.1	BELANJA OPERASI	637.815.901.671,00	618.317.453.962,18	96,94	575.587.453.363,85
5.1.01	Belanja Pegawai	354.066.987.955,00	348.970.750.947,50	98,56	318.023.273.823,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	231.859.617.636,40	228.007.468.816,00	98,34	210.851.322.674,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	173.385.315.131,00	171.852.095.195,00	99,12	156.598.103.031,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	146.899.785.025,00	145.563.931.023,00	99,09	139.405.960.331,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	26.485.530.106,00	26.288.164.172,00	99,25	17.192.142.700,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.534.310.183,40	16.354.154.417,00	98,91	14.853.852.690,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.966.684.764,40	13.803.027.663,00	98,83	13.207.891.184,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.567.625.419,00	2.551.126.754,00	99,36	1.645.961.506,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.517.649.000,00	3.456.864.000,00	98,27	3.483.895.700,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.517.649.000,00	3.456.864.000,00	98,27	3.483.895.700,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.869.600.378,00	9.770.401.000,00	98,99	10.379.488.950,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.801.560.378,00	9.702.361.000,00	98,99	10.191.433.950,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	68.040.000,00	68.040.000,00	100,00	188.055.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.397.550.625,00	3.336.380.000,00	98,20	2.766.810.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.921.747.125,00	1.872.535.000,00	97,44	1.862.860.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.475.803.500,00	1.463.845.000,00	99,19	903.950.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.976.338.067,30	9.875.263.620,00	98,99	9.715.540.760,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.182.506.254,30	8.093.659.200,00	98,91	8.455.577.600,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.793.831.813,00	1.781.604.420,00	99,32	1.259.963.160,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	216.611.387,00	176.778.462,00	81,61	121.479.897,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	216.611.387,00	176.778.462,00	81,61	121.479.897,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.013.553,00	2.592.715,00	86,04	2.398.096,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.462.814,00	2.050.935,00	83,28	2.066.835,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	550.739,00	541.780,00	98,37	331.261,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.522.962.521,70	11.769.467.659,00	87,03	11.639.388.381,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.318.285.099,70	10.631.663.354,00	86,31	10.858.171.817,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.204.677.422,00	1.137.804.305,00	94,45	781.216.564,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	358.572.177,00	353.377.002,00	98,55	322.633.497,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	303.660.418,00	298.929.743,00	98,44	286.209.761,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	54.911.759,00	54.447.259,00	99,15	36.423.736,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.077.694.613,00	1.060.094.746,00	98,37	967.731.672,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	914.807.365,00	898.601.024,00	98,23	858.463.654,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	162.887.248,00	161.493.722,00	99,14	109.268.018,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	59.903.020.985,60	59.079.904.162,00	98,63	41.678.259.700,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	59.903.020.985,60	59.079.904.162,00	98,63	41.678.259.700,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	56.809.671.385,60	55.989.894.162,00	98,56	39.649.155.700,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.093.349.600,00	3.090.010.000,00	99,89	2.029.104.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.347.017.500,00	52.157.893.018,50	99,64	45.776.983.583,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	362.937.657,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	362.937.657,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	48.577.260.500,00	48.569.678.845,50	99,98	42.910.073.526,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	48.577.260.500,00	48.569.678.845,50	99,98	42.910.073.526,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	840.051.000,00	813.576.600,00	96,85	914.992.400,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	840.051.000,00	813.576.600,00	96,85	914.992.400,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.729.250.000,00	1.677.000.000,00	96,98	1.588.980.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.729.250.000,00	1.677.000.000,00	96,98	1.588.980.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.107.356.000,00	1.052.037.573,00	95,00	0,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.107.356.000,00	1.052.037.573,00	95,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	93.100.000,00	45.600.000,00	48,98	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	93.100.000,00	45.600.000,00	48,98	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.288.544.979,00	9.107.235.455,00	98,05	8.936.099.628,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	557.340.000,00	556.605.000,00	99,87	548.940.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	557.340.000,00	556.605.000,00	99,87	548.940.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	59.496.000,00	53.869.200,00	90,54	53.772.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	59.496.000,00	53.869.200,00	90,54	53.772.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	69.230.889,00	64.598.640,00	93,31	64.308.960,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	69.230.889,00	64.598.640,00	93,31	64.308.960,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	55.734.000,00	47.638.500,00	85,47	47.187.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	55.734.000,00	47.638.500,00	85,47	47.187.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	808.143.000,00	807.077.250,00	99,87	795.963.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	808.143.000,00	807.077.250,00	99,87	795.963.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.330.600,00	70.430.850,00	80,65	76.368.600,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	87.330.600,00	70.430.850,00	80,65	76.368.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.428.623,00	10.550.925,00	78,57	11.510.100,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.428.623,00	10.550.925,00	78,57	11.510.100,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.877.400.000,00	1.877.400.000,00	100,00	1.852.200.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.877.400.000,00	1.877.400.000,00	100,00	1.852.200.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	302.526.000,00	190.650.000,00	63,02	299.250.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	302.526.000,00	190.650.000,00	63,02	299.250.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000,00	769.542,00	85,89	841.904,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000,00	769.542,00	85,89	841.904,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	34.650,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	34.650,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.058.360.217,00	2.029.020.548,00	98,57	2.063.957.464,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	78.091.295,00	59.747.252,00	76,51	113.627.512,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.167.262,00	1.143.324,00	36,10	1.132.488,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	9.501.660,00	3.429.972,00	36,10	3.397.464,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.967.600.000,00	1.964.700.000,00	99,85	1.945.800.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.194.400.000,00	3.194.400.000,00	100,00	3.121.800.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.194.400.000,00	3.194.400.000,00	100,00	3.121.800.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	204.225.000,00	204.225.000,00	100,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	204.225.000,00	204.225.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.306.854,00	165.009.496,00	99,22	165.074.578,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.039.440,00	2.520.000,00	82,91	2.520.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.039.440,00	2.520.000,00	82,91	2.520.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.982.000,00	98.280.000,00	99,29	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.982.000,00	98.280.000,00	99,29	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.063.366,00	3.041.640,00	99,29	2.824.380,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.063.366,00	3.041.640,00	99,29	2.824.380,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	794.650,00	788.616,00	99,24	1.071.098,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	794.650,00	788.616,00	99,24	1.071.098,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.974,00	1.960,00	99,29	1.820,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.974,00	1.960,00	99,29	1.820,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.372.400,00	5.328.000,00	99,17	5.328.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.372.400,00	5.328.000,00	99,17	5.328.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.256,00	112.320,00	99,17	112.320,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.256,00	112.320,00	99,17	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	339.768,00	336.960,00	99,17	336.960,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	339.768,00	336.960,00	99,17	336.960,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	502.480.000,00	453.240.000,00	90,20	510.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	102.480.000,00	93.240.000,00	90,98	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	102.480.000,00	93.240.000,00	90,98	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	360.000.000,00	90,00	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	360.000.000,00	90,00	400.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	5.553.545.010,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	5.553.545.010,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	5.553.545.010,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	4.551.108.650,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	4.551.108.650,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	4.551.108.650,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.104.535.208,00	231.304.983.172,68	94,37	230.881.246.336,85
5.1.02.01	Belanja Barang	40.296.089.786,29	36.177.791.801,18	89,78	47.480.577.731,61
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.105.619.786,29	36.076.541.801,18	89,95	47.453.042.031,61
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	256.326.020,00	254.428.800,00	99,26	94.594.175,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	252.416.450,00	239.723.190,00	94,97	431.660.772,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.799.188.130,00	1.535.241.064,00	85,33	1.369.291.514,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	15.860.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	238.498.780,00	218.554.250,00	91,64	108.799.850,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	83.219.000,00	72.115.000,00	86,66	86.242.200,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.307.687.948,71	1.243.483.148,24	95,09	50.407.609,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.701.300,00	2.380.000,00	88,11	4.500.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	46.060.320,00	38.330.000,00	83,22	22.243.500,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	9.379.800,00	8.647.200,00	92,19	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.828.548.465,00	2.725.150.413,00	96,34	1.658.463.410,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	57.400.607,00	56.362.350,00	98,19	759.138.628,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.329.727.099,13	3.012.859.606,00	90,48	3.246.656.761,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	59.243.000,00	58.830.000,00	99,30	92.030.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	10.330.000,00	10.329.800,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	457.388.380,00	448.558.950,00	98,07	564.166.430,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	396.385.465,00	258.647.186,00	65,25	406.949.496,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	515.995.016,00	499.174.645,00	96,74	432.169.701,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	197.655.520,00	189.394.640,00	95,82	225.573.795,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	75.290.000,00	74.190.000,00	98,54	84.753.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	226.207.500,00	209.927.000,00	92,80	321.140.400,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	779.359.039,00	703.770.000,00	90,30	605.219.476,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	695.659.381,00	689.158.265,94	99,07	2.058.376.782,91
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	340.070.089,60	273.657.250,00	80,47	2.453.559.955,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.132.826.211,50	7.702.687.973,00	84,34	11.198.519.990,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.985.798.375,00	4.546.492.960,00	91,19	8.386.295.927,70
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.052.505.364,00	1.954.941.710,00	95,25	2.458.615.122,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	237.801.140,00	204.388.600,00	85,95	186.092.230,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.440.000,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	34.860.000,00	31.424.000,00	90,14	17.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.658.579.740,35	6.841.217.600,00	89,33	7.741.441.400,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.255.293.895,00	1.211.471.000,00	96,51	1.088.251.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	123.600.000,00	116.800.000,00	94,50	457.901.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	125.000.000,00	123.640.000,00	98,91	168.389.973,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	79.994.560,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	120.000.000,00	109.750.000,00	91,46	60.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	112.500.000,00	112.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	70.190.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.045.000,00	8.025.200,00	99,75	63.886.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	55.000.000,00	54.875.000,00	99,77	53.750.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	500.000,00	500.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	44.750.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	58.000.000,00	54.350.000,00	93,71	35.400.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	43.900.000,00	43.900.000,00	100,00	57.630.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	6.822.750,00	6.815.000,00	99,89	146.496.874,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	27.535.700,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00	0,00	18.702.200,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	8.833.500,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	190.470.000,00	101.250.000,00	53,16	0,00
5.1.02.01.04.0018	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0136	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	89.120.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	70.648.206.143,94	66.022.750.788,00	93,45	71.533.028.434,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	45.619.442.112,94	42.513.004.062,00	93,19	49.098.554.508,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.352.290.000,00	2.065.285.000,00	87,80	2.405.016.660,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	878.387.500,00	796.800.000,00	90,71	1.070.078.800,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	416.004.000,00	413.400.000,00	99,37	318.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	11.600.000,00	7.800.000,00	67,24	6.400.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	848.350.000,00	828.150.000,00	97,62	1.961.005.261,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	323.800.000,00	320.200.000,00	98,89	394.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.467.599.998,00	2.159.535.000,00	87,52	1.552.921.250,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.383.860.604,94	7.629.726.827,00	91,00	9.491.724.090,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	169.185.000,00	107.125.440,00	63,32	137.706.600,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.847.957.600,00	1.806.956.566,00	97,78	1.647.480.906,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.728.000.000,00	1.687.500.000,00	97,66	1.314.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	378.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	108.000.000,00	105.000.000,00	97,22	97.500.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	141.000.000,00	139.000.000,00	98,58	57.600.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	630.690.000,00	623.790.000,00	98,91	92.070.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	122.400.000,00	102.000.000,00	83,33	117.300.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	782.600.000,00	780.600.000,00	99,74	567.700.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.312.000.000,00	3.285.400.000,00	99,20	4.835.300.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.358.200.000,00	6.070.022.532,00	95,47	5.246.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	889.681.412,00	819.355.240,00	92,10	479.540.965,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.352.555.318,00	2.294.762.500,00	97,54	3.272.550.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	135.600.000,00	114.300.000,00	84,29	873.900.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	8.429.745,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	22.500.000,00	20.325.000,00	90,33	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	61.250.000,00	57.750.000,00	94,29	116.300.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	65.000.000,00	63.700.000,00	98,00	42.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	84.000.000,00	42.000.000,00	50,00	310.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	5.741.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000,00	90.000.000,00	90,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.230.100.000,00	1.227.454.288,00	99,78	2.276.340.600,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	134.328.432,00	90.595.000,00	67,44	230.826.747,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	108.600.000,00	103.500.000,00	95,30	139.355.868,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	33.600.000,00	31.200.000,00	92,86	0,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	155.000.000,00	9.900.000,00	6,39	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	759.784.000,00	712.056.000,00	93,72	739.466.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	72.006.600,00	45.332.251,00	62,96	65.367.308,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	274.795.475,00	177.232.591,00	64,50	192.987.555,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.714.735.580,00	4.404.321.301,00	93,42	1.335.455.747,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	699.715.000,00	641.521.100,00	91,68	717.203.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.372.225.848,00	2.217.809.892,00	93,49	2.261.487.535,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	25.570.000,00	20.204.004,00	79,01	6.842.818,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	3.290.855.580,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	338.040.000,00	316.710.000,00	93,69	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00	84.683.530,00	84,68	19.930.218,00
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	1.002.400.000,00
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.074.923.400,00	15.066.952.600,00	99,95	12.792.010.700,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	13.826.017.000,00	13.826.015.000,00	100,00	11.697.689.500,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	1.248.906.400,00	1.240.937.600,00	99,36	1.094.321.200,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	374.000.000,00	331.714.690,00	88,69	155.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	304.000.000,00	267.500.000,00	87,99	155.000.000,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	70.000.000,00	64.214.690,00	91,74	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.716.404.000,00	1.643.816.000,00	95,77	952.479.000,00
5.1.02.02.04.0016	Belanja Sewa Kapal Tarik	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	43.000.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	141.900.000,00	120.500.000,00	84,92	99.550.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.760.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.02.04.0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	6.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	125.962.000,00	123.334.000,00	97,91	92.429.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply	647.750.000,00	635.250.000,00	98,07	312.750.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	667.032.000,00	642.732.000,00	96,36	315.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	735.225.000,00	671.725.000,00	91,36	1.941.110.341,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	44.826.131,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	13.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	267.375.000,00	230.875.000,00	86,35	935.240.200,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	146.000.000,00	142.500.000,00	97,60	181.693.690,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	202.500.000,00	195.000.000,00	96,30	614.050.320,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	69.350.000,00	53.350.000,00	76,93	125.300.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.645.711.631,00	4.509.940.370,00	79,88	5.043.881.859,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.494.148.915,00	1.900.144.360,00	76,18	1.493.864.189,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	62.000.000,00	49.956.660,00	80,58	204.803.880,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	446.938.980,00	215.774.570,00	48,28	1.166.490.490,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.420.317.736,00	1.286.335.030,00	90,57	1.196.067.260,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	99.797.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	736.285.000,00	572.654.550,00	77,78	738.965.850,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	87.975.000,00	87.029.200,00	98,92	64.850.190,00
5.1.02.02.08.0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	398.046.000,00	398.046.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	79.043.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	39.627.000,00	26,42	30.536.100,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00	30.536.100,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	40.000.000,00	39.627.000,00	99,07	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	12.872.726,00
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.872.726,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.329.500.000,00	1.242.971.066,00	93,49	1.417.010.200,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.223.000.000,00	1.137.495.066,00	93,01	1.057.648.200,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	106.500.000,00	105.476.000,00	99,04	359.362.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	39.573.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	39.573.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.465.092.569,00	15.888.904.978,00	96,50	16.140.280.278,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	570.000.000,00	569.539.400,00	99,92	0,00
5.1.02.03.01.0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	570.000.000,00	569.539.400,00	99,92	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.598.903.091,00	12.128.983.335,00	96,27	11.816.477.486,00
5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	6.480.000,00	5.910.000,00	91,20	3.150.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	7.590.322.031,00	7.573.659.985,00	99,78	7.615.219.262,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	11.094.620,00	10.368.500,00	93,46	8.950.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.740.000,00	3.700.000,00	98,93	11.500.000,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	30.000.000,00	29.800.000,00	99,33	14.175.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.997.780,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.828.480.462,00	2.653.896.048,00	93,83	2.416.951.891,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	120.645.400,00	114.042.344,00	94,53	0,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	93.515.000,00	83.918.162,00	89,74	706.919.528,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	393.708.898,00	301.280.662,00	76,52	323.306.311,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	52.800.000,00	32.107.950,00	60,81	23.364.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	726.613.800,00	684.474.993,00	94,20	239.207.689,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	171.072.500,00	168.593.711,00	98,55	0,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	32.400.000,00	13.930.000,00	42,99	14.950.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	80.960.000,00	29.044.000,00	35,87	18.789.625,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	20.240.000,00	20.230.500,00	99,95	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	63.360.000,00	53.118.000,00	83,84	20.800.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.500.000,00	2.860.000,00	44,00	12.432.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.930.000,00	1.910.000,00	98,96	2.120.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	4.622.000,00
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	30.350.000,00	30.335.000,00	99,95	21.300.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	236.810.000,00	227.548.480,00	96,09	218.816.200,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	97.880.380,00	88.255.000,00	90,17	75.469.800,00
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.836.400,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.732.518.928,00	1.687.829.029,00	97,42	2.639.632.163,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.730.808.928,00	1.686.184.029,00	97,42	2.206.930.302,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	33.337.361,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.710.000,00	1.645.000,00	96,20	0,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	108.473.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	290.891.500,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.503.670.550,00	1.442.753.214,00	95,95	1.684.170.629,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	750.000.000,00	749.806.117,00	99,97	990.335.046,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	300.000.000,00	299.980.000,00	99,99	248.027.500,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	6.822.633,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	375.000.000,00	342.040.307,00	91,21	0,00
5.1.02.03.04.0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	1.106.900,00	1.106.900,00	100,00	21.031.100,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	75.000.000,00	47.256.240,00	63,01	219.510.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.563.650,00	2.563.650,00	100,00	198.444.350,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00	59.800.000,00	99,67	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	60.000.000,00	59.800.000,00	99,67	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.398.088.125,77	39.470.168.627,00	95,34	38.365.987.902,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.398.088.125,77	39.470.168.627,00	95,34	38.017.147.581,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.422.601.149,77	28.330.162.227,00	96,29	26.807.549.752,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.433.202.976,00	10.600.926.400,00	92,72	11.209.597.829,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	542.284.000,00	539.080.000,00	99,41	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	348.840.321,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas BiasaLuar Negeri	0,00	0,00	0,00	348.840.321,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.194.143.419,00	14.500.873.035,00	95,44	14.331.034.685,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.381.020.000,00	4.992.242.900,00	92,78	2.653.495.929,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	479.110.000,00	436.460.000,00	91,10	316.900.029,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.596.910.000,00	3.596.894.150,00	100,00	54.200.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	0,00	0,00	0,00	499.516.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	472.500.000,00	126.388.750,00	26,75	1.782.879.900,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	832.500.000,00	832.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.813.123.419,00	9.508.630.135,00	96,90	11.677.538.756,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.529.833.419,00	8.344.680.135,00	97,83	10.178.966.264,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.283.290.000,00	1.163.950.000,00	90,70	1.498.572.492,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.821.282.627,00	19.633.938.117,00	99,05	12.960.583.929,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.821.282.627,00	19.633.938.117,00	99,05	12.960.583.929,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.821.282.627,00	19.633.938.117,00	99,05	12.960.583.929,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.148.943.344,00	6.179.084.693,00	86,43	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.148.943.344,00	6.179.084.693,00	86,43	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.148.943.344,00	6.179.084.693,00	86,43	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.132.689.193,00	33.431.471.133,50	97,95	30.069.753.377,24
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.132.689.193,00	33.431.471.133,50	97,95	30.069.753.377,24
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.132.689.193,00	33.431.471.133,50	97,95	30.069.753.377,24
5.1.05	Belanja Hibah	36.827.678.508,00	36.308.179.842,00	98,59	22.419.745.204,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	21.485.720.000,00	21.476.323.000,00	99,96	11.225.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	21.485.720.000,00	21.476.323.000,00	99,96	11.225.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	21.485.720.000,00	21.476.323.000,00	99,96	11.225.000.000,00
5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
5.1.05.03.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
5.1.05.03.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.810.000.000,00	3.581.708.100,00	94,01	3.689.832.775,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.115.000.000,00	976.708.100,00	87,60	2.251.027.775,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.115.000.000,00	976.708.100,00	87,60	280.000.000,00
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.971.027.775,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	230.000.000,00	200.000.000,00	86,96	488.805.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	230.000.000,00	200.000.000,00	86,96	488.805.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.290.000.000,00	2.230.000.000,00	97,38	950.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.290.000.000,00	2.230.000.000,00	97,38	950.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.886.420.000,00	4.058.897.163,00	104,44	3.928.662.559,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.886.420.000,00	4.058.897.163,00	104,44	3.928.662.559,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.886.420.000,00	4.058.897.163,00	104,44	3.928.662.559,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	581.618.508,00	570.489.029,00	98,09	576.249.870,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	581.618.508,00	570.489.029,00	98,09	576.249.870,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	581.618.508,00	570.489.029,00	98,09	576.249.870,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.063.920.000,00	1.620.762.550,00	78,53	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.029.360.000,00	1.620.762.550,00	79,87	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.029.360.000,00	1.620.762.550,00	79,87	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	34.560.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	34.560.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.816.700.000,00	1.733.540.000,00	95,42	4.263.188.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.816.700.000,00	1.733.540.000,00	95,42	983.988.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.816.700.000,00	1.733.540.000,00	95,42	983.988.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.816.700.000,00	1.733.540.000,00	95,42	983.988.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.279.200.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.279.200.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.279.200.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	637.815.901.671,00	618.317.453.962,18	96,94	575.587.453.363,85
5.2	BELANJA MODAL	187.047.735.913,00	166.049.771.547,99	88,77	155.721.596.187,24
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.536.212.000,00	8.453.187.785,00	67,43	5.213.242.215,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	12.536.212.000,00	8.453.187.785,00	67,43	5.213.242.215,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	12.536.212.000,00	8.453.187.785,00	67,43	5.213.242.215,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	12.536.212.000,00	8.453.187.785,00	67,43	5.213.242.215,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.539.452.463,00	26.575.455.960,00	93,12	30.361.121.949,12
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	161.000.000,00	55.800.000,00	34,66	242.289.158,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	121.034.357,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	121.034.357,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	161.000.000,00	55.800.000,00	34,66	121.254.801,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	156.000.000,00	55.800.000,00	35,77	28.194.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.000.000,00	0,00	0,00	28.596.571,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	0,00	41.364.250,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	23.099.980,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.401.519.000,00	6.723.056.240,00	90,83	2.046.921.776,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.861.519.000,00	6.191.056.240,00	90,23	1.755.921.776,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	695.500.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	719.119.000,00	719.058.000,00	99,99	677.100.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	90.000.000,00	87.998.240,00	97,78	33.170.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	360.000.000,00	344.000.000,00	95,56	350.151.776,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.692.400.000,00	5.040.000.000,00	88,54	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	540.000.000,00	532.000.000,00	98,52	291.000.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	540.000.000,00	532.000.000,00	98,52	291.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	4.536.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	4.536.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	4.536.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.073.540.841,00	3.907.434.979,00	95,92	5.390.272.231,12
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	100.842.250,00	83.571.000,00	82,87	1.233.692.831,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	13.847.970,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.553.000,00	2.553.000,00	100,00	77.503.430,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	98.289.250,00	81.018.000,00	82,43	1.142.341.431,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.972.698.591,00	3.823.863.979,00	96,25	4.127.551.180,12
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.827.825.591,00	3.693.838.979,00	96,50	3.862.997.268,12
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	24.000.000,00	22.950.000,00	95,63	60.430.171,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	88.373.000,00	77.345.000,00	87,52	10.994.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	20.000.000,00	19.730.000,00	98,65	6.248.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.500.000,00	10.000.000,00	80,00	161.011.901,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	25.869.840,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	29.028.220,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	28.628.220,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	314.930.000,00	289.955.000,00	92,07	546.650.440,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	247.430.000,00	227.955.000,00	92,13	466.212.065,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	13.656.000,00	13.470.000,00	98,64	35.699.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	31.500.000,00	31.484.000,00	99,95	258.266.470,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	75.075.000,00	69.786.000,00	92,96	65.831.700,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	127.199.000,00	113.215.000,00	89,01	48.891.920,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	57.522.975,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	67.500.000,00	62.000.000,00	91,85	80.438.375,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	15.000.000,00	9.500.000,00	63,33	66.238.375,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	6.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.372.967.691,00	7.722.078.002,00	92,23	14.918.149.348,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.338.002.069,00	5.005.810.502,00	93,78	6.447.328.600,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	2.601.785.600,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	87.890.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.153.400.382,00	1.074.109.302,00	93,13	0,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	2.778.165.000,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	420.312.170,00	403.335.000,00	95,96	0,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	979.488.000,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	251.857.308,00	245.550.000,00	97,50	0,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	343.825.150,00	326.180.000,00	94,87	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.168.607.059,00	2.956.636.200,00	93,31	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.034.965.622,00	2.716.267.500,00	89,50	8.470.820.748,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.034.965.622,00	2.716.267.500,00	89,50	8.470.820.748,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.988.197.922,00	2.874.952.280,00	96,21	197.394.360,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.522.600.922,00	1.411.386.280,00	92,70	195.256.500,00
5.2.02.08.01.0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	486.628.016,00	483.628.000,00	99,38	0,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	1.035.972.906,00	927.758.280,00	89,55	0,00
5.2.02.08.01.0046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	0,00	0,00	0,00	195.256.500,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	56.925.000,00	56.900.000,00	99,96	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	56.925.000,00	56.900.000,00	99,96	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	2.137.860,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	2.137.860,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.408.672.000,00	1.406.666.000,00	99,86	0,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.408.672.000,00	1.406.666.000,00	99,86	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.621.967.558,00	1.493.555.999,00	92,08	3.660.332.802,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.181.237.840,00	1.116.606.000,00	94,53	2.867.681.894,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	7.010.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	989.228.119,00	932.914.000,00	94,31	857.667.934,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	184.999.721,00	183.692.000,00	99,29	2.010.013.960,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	440.729.718,00	376.949.999,00	85,53	792.650.908,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	28.650.000,00	28.420.000,00	99,20	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	5.579.160,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	412.079.718,00	348.529.999,00	84,58	787.071.748,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	3.334.913.529,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	3.334.913.529,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	3.334.913.529,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	11.849.805,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	11.849.805,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.849.805,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	131.980.766,00	103.787.800,00	78,64	2.112.500,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	131.980.766,00	103.787.800,00	78,64	2.112.500,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	131.980.766,00	103.787.800,00	78,64	2.112.500,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.008.773.367,00	2.941.061.130,00	97,75	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.008.773.367,00	2.941.061.130,00	97,75	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.008.773.367,00	2.941.061.130,00	97,75	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	464.575.318,00	463.774.530,00	99,83	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	464.575.318,00	463.774.530,00	99,83	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	464.575.318,00	463.774.530,00	99,83	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.354.785.237,00	43.497.412.379,11	89,95	36.255.712.043,57
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	48.354.785.237,00	43.497.412.379,11	89,95	36.255.712.043,57
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.354.785.237,00	43.497.412.379,11	89,95	35.789.744.560,96
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.648.044.124,00	1.402.832.448,16	85,12	1.333.231.130,00
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	182.356.621,00	182.296.002,00	99,97	1.722.512.781,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.486.724.664,00	12.680.141.040,95	87,53	199.554.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.308.250.560,00	17.795.783.332,00	92,17	14.328.022.554,63
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	444.446.347,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	913.293.600,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	8.596.910.018,00	7.386.523.706,00	85,92	16.638.752.773,33
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	4.132.499.250,00	4.049.835.850,00	98,00	209.931.375,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	465.967.482,61
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	142.025.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	323.942.482,61
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.159.986.607,00	85.170.608.423,88	89,50	80.401.025.427,55
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	75.847.159.065,00	69.386.456.752,00	91,48	73.481.840.166,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	72.438.373.165,00	66.219.091.959,00	91,41	72.564.906.066,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	72.346.190.733,00	66.211.603.059,00	91,52	71.513.067.737,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	92.182.432,00	7.488.900,00	8,12	736.899.364,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	314.938.965,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.408.785.900,00	3.167.364.793,00	92,92	916.934.100,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	3.408.785.900,00	3.167.364.793,00	92,92	916.934.100,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.331.777.810,00	5.997.475.460,00	81,80	6.268.872.961,55
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.146.124.710,00	2.434.763.410,00	77,39	1.504.964.490,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	0,00	0,00	24.596.700,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.146.124.710,00	2.434.763.410,00	77,39	1.480.367.790,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.185.653.100,00	3.562.712.050,00	85,12	4.763.908.471,55
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.185.653.100,00	3.562.712.050,00	85,12	4.753.978.471,55
5.2.04.02.04.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	0,00	0,00	0,00	9.930.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.874.729.500,00	2.843.561.545,00	98,92	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.410.000.000,00	1.379.332.045,00	97,82	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.410.000.000,00	1.379.332.045,00	97,82	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.464.729.500,00	1.464.229.500,00	99,97	0,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.464.729.500,00	1.464.229.500,00	99,97	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	9.002.591.652,00	6.839.386.087,00	75,97	650.312.300,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	9.002.591.652,00	6.839.386.087,00	75,97	332.342.300,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	9.002.591.652,00	6.839.386.087,00	75,97	332.342.300,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	317.970.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	317.970.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	103.728.580,00	103.728.579,88	100,00	0,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	103.728.580,00	103.728.579,88	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	103.728.580,00	103.728.579,88	100,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.457.299.606,00	2.353.107.000,00	95,76	3.490.494.552,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	35.535.600,00	35.535.600,00	100,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	35.535.600,00	35.535.600,00	100,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	9.010.800,00	9.010.800,00	100,00	0,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	414.000,00	414.000,00	100,00	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	2.102.400,00	2.102.400,00	100,00	0,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	22.060.800,00	22.060.800,00	100,00	0,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.134.000,00	1.134.000,00	100,00	0,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	813.600,00	813.600,00	100,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	3.490.494.552,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	3.490.494.552,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	199.500.000,00
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.290.994.552,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.321.764.006,00	2.317.571.400,00	99,82	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.321.764.006,00	2.317.571.400,00	99,82	0,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.321.764.006,00	2.317.571.400,00	99,82	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	187.047.735.913,00	166.049.771.547,99	88,77	155.721.596.187,24
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.646.184.978,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.646.184.978,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.646.184.978,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.646.184.978,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.646.184.978,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.646.184.978,00	0,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	153.230.179.400,00	153.157.870.731,00	99,95	149.173.531.254,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.923.378.000,00	3.923.378.000,00	100,00	3.462.995.304,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	2.847.726.000,00	2.847.726.000,00	100,00	2.446.295.395,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.847.726.000,00	2.847.726.000,00	100,00	2.446.295.395,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.847.726.000,00	2.847.726.000,00	100,00	2.446.295.395,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.075.652.000,00	1.075.652.000,00	100,00	1.016.699.909,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.075.652.000,00	1.075.652.000,00	100,00	1.016.699.909,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.075.652.000,00	1.075.652.000,00	100,00	1.016.699.909,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149.306.801.400,00	149.234.492.731,00	99,95	145.710.535.950,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149.306.801.400,00	149.234.492.731,00	99,95	145.710.535.950,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	145.710.535.950,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	145.710.535.950,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149.306.801.400,00	149.234.492.731,00	99,95	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	103.519.877.000,00	103.519.877.000,00	100,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	45.786.924.400,00	45.714.615.731,00	99,84	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	153.230.179.400,00	153.157.870.731,00	99,95	149.173.531.254,00
	JUMLAH BELANJA	979.740.001.962,00	937.525.096.241,17	95,69	880.482.580.805,09
	SURPLUS/DEFISIT	(51.972.472.710,00)	(25.849.094.433,10)	49,74	(12.773.750.273,79)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	51.972.472.710,00	52.030.776.116,28	100,11	70.804.526.389,92
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.972.472.710,00	58.030.776.116,28	100,10	70.804.526.389,92
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.972.472.710,00	58.030.776.116,28	100,10	70.804.526.389,92
6.1.01.05	Penghematan Belanja	57.972.472.710,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	57.972.472.710,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	51.750.097.631,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.222.375.079,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	58.030.776.116,28	0,00	70.804.526.389,92
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	58.030.776.116,28	0,00	70.804.526.389,92
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	58.030.776.116,28	0,00	70.804.526.389,92
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.972.472.710,00	58.030.776.116,28	100,10	70.804.526.389,92
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	51.972.472.710,00	52.030.776.116,28	100,11	70.804.526.389,92
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	26.181.681.683,18	0,00	58.030.776.116,13

h. Pelaksanaan program berdasarkan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung urusan pemerintahan

Tabel 1.10
Rincian Pelaksanaan Program Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	570.040.447.588	543.821.903.028

NO	URAIAN PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	255.683.096.090	248.874.687.656
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	255.683.096.090	248.874.687.656
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	185.874.319.540	182.951.898.071
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	69.510.606.550	65.667.435.786
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	263.245.000	230.778.799
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	34.925.000	24.575.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	171.714.073.299	164.503.599.595
	Dinas Kesehatan	81.410.465.673	78.316.252.580
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.573.667.749	39.188.431.159
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	40.147.754.629	37.682.496.937
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.251.752.895	1.052.142.644
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	292.441.000	254.325.440
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	144.849.400	138.856.400
	Puskesmas Ambarita	1.140.247.687	1.004.359.967
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.955.800	9.125.500
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.119.095.887	984.038.467
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.196.000	11.196.000
	Puskesmas Tuktuk Siadong	835.759.831	788.892.780
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.788.400	8.933.644
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	807.004.431	760.992.136
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.967.000	18.967.000
	Puskesmas Harian	1.273.235.978	859.487.795
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.263.680.978	852.947.795
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.555.000	6.540.000
	Puskesmas Buhit	3.131.041.674	3.034.805.086
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.106.551.674	3.012.415.086
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.490.000	22.390.000
	Puskesmas Simarmata	878.540.985	779.117.476
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.988.400	6.681.032
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	856.152.585	758.036.444
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.400.000	14.400.000
	Puskesmas Mogang	1.952.207.669	1.818.542.463
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.926.482.669	1.801.667.463
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	25.725.000	16.875.000
	Puskesmas Sitio-tio	1.093.271.978	914.925.019
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.079.276.978	904.900.019

NO	URAIAN PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1	2	3	4
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.995.000	10.025.000
	Puskesmas Sirait	1.637.580.527	1.338.223.311
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.584.110.527	1.320.503.311
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	53.470.000	17.720.000
	Puskesmas Onan Runggu	1.354.166.063	1.283.194.084
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.336.873.063	1.266.321.084
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.293.000	16.873.000
	Puskesmas Ronggur nihuta	1.260.301.593	1.182.312.138
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.237.441.593	1.159.452.138
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.860.000	22.860.000
	Puskesmas Limbong	1.496.928.592	1.402.033.476
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.487.328.592	1.392.433.476
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.600.000	9.600.000
	Puskesmas Lontung	620.086.289	587.907.395
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.304.600	5.304.600
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	606.981.689	574.802.795
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.800.000	7.800.000
	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga	73.630.238.760	71.193.546.024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.499.346.873	24.910.728.122
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.130.891.887	46.282.817.902
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.978.951.715	107.751.340.100
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	118.978.951.715	107.751.340.100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.551.691.022	15.497.686.705
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.798.927.810	6.713.553.370
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.203.401.946	7.784.558.483
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	799.707.000	793.072.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	677.954.100	512.638.100
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.005.607.392	2.638.196.810
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	77.533.308.445	70.819.157.859
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	200.000.000	148.875.203
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100.000.000	-
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.108.354.000	2.843.601.570
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.100.000.000	6.692.217.300
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.100.000.000	6.692.217.300
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.100.000.000	6.692.217.300
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.773.801.285	9.412.087.254
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.614.444.825	2.447.511.735

NO	URAIAN PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.477.583.513	2.346.851.946
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	136.861.312	100.659.789
Satuan Polisi Pamong Praja		7.159.356.460	6.964.575.519
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.083.609.855	5.979.816.496
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	940.944.605	850.656.417
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	134.802.000	134.102.606
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		6.790.525.199	6.587.971.124
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		6.790.525.199	6.587.971.124
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.235.570.799	5.167.049.624
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	190.920.000	139.000.000
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.104.430.750	1.028.538.000
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	172.599.650	167.350.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		85.397.004.997	79.105.539.764
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		797.005.196	694.204.618
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan		330.027.400	287.691.704
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	15.774.889
2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	330.027.400	271.916.815
UPT. Balai Latihan Kerja Kab. Samosir		466.977.796	406.512.914
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	225.991.985	168.619.064
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	240.985.811	237.893.850
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		3.715.150.387	3.652.080.387
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3.715.150.387	3.652.080.387
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.621.496.387	3.571.878.237
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	5.000.000	-
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	43.654.000	41.261.000
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	45.000.000	38.941.150
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		12.181.255.549	11.924.130.894
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		12.181.255.549	11.924.130.894
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.973.072.962	11.736.975.944
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	141.393.681	130.604.550
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	66.788.906	56.550.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		13.084.900.000	8.871.801.338
Sekretariat Daerah		-	4.974.670.000
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	4.974.670.000
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	13.084.900.000	3.897.131.338
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		13.043.655.813	12.714.178.263
Dinas Lingkungan Hidup		12.565.475.813	12.238.824.711
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.205.665.167	6.107.457.476

NO	URAIAN PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1	2	3	4
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	299.364.446	246.088.600
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.074.930.950	2.030.963.695
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	44.499.310	39.062.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	55.820.000	55.790.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.885.195.940	3.759.462.940
UPTD Kebun Raya Samosir		478.180.000	475.353.552
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	322.751.040	321.897.452
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	155.428.960	153.456.100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.684.566.859	2.662.213.400
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.684.566.859	2.662.213.400
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.418.908.479	2.396.983.950
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	174.708.380	174.279.450
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	44.750.000	44.750.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	46.200.000	46.200.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		963.652.180	878.247.128
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		963.652.180	878.247.128
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	413.650.000	395.602.576
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	550.002.180	482.644.552
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		4.083.279.678	3.760.501.130
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4.083.279.678	3.760.501.130
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	207.600.000	172.763.499
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.573.079.678	2.350.619.631
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.302.600.000	1.237.118.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		8.787.901.729	8.648.366.833
Dinas Perhubungan		8.787.901.729	8.648.366.833
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.944.744.665	3.880.388.368
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.755.557.064	4.680.378.465
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	87.600.000	87.600.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		5.445.816.578	5.111.301.274
Dinas Komunikasi dan Informatika		5.445.816.578	5.111.301.274
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.531.128.749	2.443.802.059
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	721.659.149	616.287.215
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.193.028.680	2.051.212.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		5.558.956.931	5.491.851.667
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan		5.524.956.931	5.474.297.867
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.478.245.931	4.449.606.445

NO	URAIAN PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1	2	3	4
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	496.711.000	476.823.400
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	550.000.000	547.868.022
UPT. Metrologi Legal Daerah Kabupaten Samosir		34.000.000	17.553.800
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.000.000	17.553.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		4.362.827.941	4.272.635.654
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4.362.827.941	4.272.635.654
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.760.107.941	2.674.051.171
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	500.000.000	498.868.043
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	154.700.000	153.372.444
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	325.180.000	324.376.196
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	602.840.000	602.047.800
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	20.000.000	19.920.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		5.170.230.400	4.994.499.956
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		5.170.230.400	4.994.499.956
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.581.779.800	3.527.438.012
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	1.588.450.600	1.467.061.944
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		5.134.835.216	5.050.800.818
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		5.134.835.216	5.050.800.818
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.315.367.965	4.248.992.518
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	730.601.251	725.451.900
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	88.866.000	76.356.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		317.970.640	314.660.884
Sekretariat Daerah		-	9.213.778
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	9.213.778
ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB		317.970.640	305.447.106
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	317.970.640	305.447.106
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		64.999.900	64.065.520
ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB		64.999.900	64.065.520
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	64.999.900	64.065.520
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		32.161.042.780	28.431.211.311
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		2.107.619.224	1.069.544.636
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		2.107.619.224	1.069.544.636
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	100.844.800	100.556.672
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	799.274.424	480.636.449
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.207.500.000	488.351.515
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		18.942.405.868	17.323.483.388
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		18.942.405.868	17.323.483.388
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.980.174.613	9.477.648.596
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.839.231.255	6.800.402.042
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.123.000.000	1.045.432.750
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		8.768.707.969	7.823.330.224

NO	URAIAN PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1	2	3	4
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.768.707.969	7.823.330.224
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.954.336.897	4.685.206.324
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.288.297.172	1.701.049.750
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	385.837.000	344.386.200
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	117.141.000	113.550.000
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.023.095.900	979.137.950
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	369.549.719	346.108.778
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	369.549.719	346.108.778
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	99.750.000	85.620.778
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	24.000.000	23.850.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	245.799.719	236.638.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.972.760.000	1.868.744.285
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	1.972.760.000	1.868.744.285
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.972.760.000	1.868.744.285
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	58.551.788.716	56.936.049.942
	SEKRETARIAT DAERAH	31.096.352.471	29.836.975.161
	Sekretariat Daerah	12.647.878.125	15.218.778.748
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.647.878.125	14.340.921.482
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	814.874.550
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	62.982.716
	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB	4.537.904.000	3.563.248.180
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.537.904.000	3.563.248.180
	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB	1.024.818.588	918.661.239
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.024.818.588	918.661.239
	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB	12.372.800.858	9.644.395.490
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.372.800.858	9.644.395.490
	Kecamatan Pangururan	61.078.100	58.078.100
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	61.078.100	58.078.100
	Kecamatan Simanindo	80.000.000	69.946.500
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	80.000.000	69.946.500
	Kecamatan Palipi	69.060.000	68.879.500
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	69.060.000	68.879.500
	Kecamatan Nainggolan	64.051.800	61.593.000
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	64.051.800	61.593.000
	Kecamatan Onanrunggu	76.135.000	75.535.404
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	76.135.000	75.535.404
	Kecamatan Ronggur Nihuta	53.197.000	53.197.000
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	53.197.000	53.197.000
	Kecamatan Harian	62.680.000	59.340.000
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	62.680.000	59.340.000
	Kecamatan Sitio-tio	46.749.000	45.322.000

NO	URAIAN PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1	2	3	4
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	46.749.000	45.322.000
	SEKRETARIAT DPRD	27.455.436.245	27.099.074.781
	Sekretariat Dewan	27.455.436.245	27.099.074.781
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.043.879.245	20.774.191.451
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.411.557.000	6.324.883.330
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	178.788.302.783	175.948.886.029
	PERENCANAAN	5.011.216.799	4.942.474.524
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.011.216.799	4.942.474.524
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.457.362.277	4.406.501.753
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	236.323.848	223.191.963
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	317.530.674	312.780.808
	KEUANGAN	169.368.369.780	166.713.747.235
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	169.368.369.780	166.713.747.235
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.848.562.028	9.538.012.185
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	157.245.454.576	155.217.529.817
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	871.007.600	583.302.136
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.403.345.576	1.374.903.097
	KEPEGAWAIAN	3.619.429.504	3.554.548.224
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.619.429.504	3.554.548.224
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.205.584.704	3.151.037.407
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	413.844.800	403.510.817
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	129.412.400	123.291.950
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	129.412.400	123.291.950
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	129.412.400	123.291.950
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	659.874.300	614.824.096
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	659.874.300	614.824.096
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	659.874.300	614.824.096
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.443.189.155	6.294.817.037
	INSPEKTORAT DAERAH	6.443.189.155	6.294.817.037
	Inspektorat	6.443.189.155	6.294.817.037
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.688.529.155	5.546.013.300
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	592.896.000	590.137.393
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	161.764.000	158.666.344
	UNSUR KEWILAYAHAN	23.362.100.343	22.102.128.526
	KECAMATAN	23.362.100.343	22.102.128.526
	Kecamatan Pangururan	4.707.815.868	4.678.928.801
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.468.730.868	4.439.957.701
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83.610.000	83.583.100
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	119.200.000	119.158.000
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.275.000	36.230.000

NO	URAIAN PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1	2	3	4
	Kelurahan Pasar	236.772.480	234.910.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	236.772.480	234.910.000
	Kelurahan Siogungogung	258.077.000	221.798.415
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	258.077.000	221.798.415
	Kelurahan Pintu Sona	241.960.000	234.278.400
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	241.960.000	234.278.400
	Kecamatan Simanindo	3.023.861.432	2.883.662.977
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.805.946.532	2.706.385.977
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90.765.100	71.238.000
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	114.199.800	99.999.000
11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.950.000	6.040.000
	Kelurahan Tuktuk Siadong	274.145.240	112.089.100
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	274.145.240	112.089.100
	Kecamatan Palipi	2.159.849.466	2.058.672.354
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.022.483.601	1.951.587.104
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.885.615	30.065.000
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	87.080.250	68.020.250
16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.400.000	9.000.000
	Kecamatan Nainggolan	2.900.260.500	2.848.907.893
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.778.675.380	2.728.881.893
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.570.600	42.453.000
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.014.520	62.573.000
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	15.000.000
	Kelurahan Sirumahombar	286.535.000	199.621.400
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	286.535.000	199.621.400
	Kelurahan Parhusip III	287.465.219	76.021.400
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	287.465.219	76.021.400
	Kecamatan Onanrunggu	2.184.595.350	2.021.120.295
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.058.690.350	1.901.875.295
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.845.000	40.125.000
25	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	720.000	-
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.020.000	74.800.000
27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.320.000	4.320.000
	Kecamatan Ronggur Nihuta	1.436.624.304	1.397.017.888
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.321.493.229	1.289.707.888
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	28.290.275	25.507.000

NO	URAIAN PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1	2	3	4
	KELURAHAN		
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81.440.800	78.863.000
31	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.400.000	2.940.000
Kecamatan Sianjur Mula-mula		2.067.615.817	1.970.570.637
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.887.599.567	1.838.641.637
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63.622.100	40.545.000
34	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	116.394.150	91.384.000
Kecamatan Harian		1.851.477.089	1.780.992.562
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.705.189.089	1.650.401.562
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.620.000	35.698.000
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	93.652.000	78.892.000
38	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.016.000	16.001.000
Kecamatan Sitio-tio		1.445.045.578	1.383.536.404
39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.338.749.303	1.293.287.404
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.754.275	45.550.000
41	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.342.000	42.599.000
42	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.200.000	2.100.000
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		24.996.125.600	24.884.560.604
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		24.996.125.600	24.884.560.604
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		24.996.125.600	24.884.560.604
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.023.785.292	1.984.129.052
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	400.000.000	386.986.795
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	22.067.338.508	22.046.812.029
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	104.357.800	101.792.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	75.644.000	59.991.800
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	325.000.000	304.848.928
TOTAL		24.994.025.600	24.884.560.604
Jumlah		979.740.001.962	937.525.096.241

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat belum sesuai harapan. Mengacu kepada permasalahan yang ditemukan, selanjutnya dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang

yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pencapaian kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai potensi kondisi yang belum ideal di masa depan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

Permasalahan Strategis yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir diantaranya:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Samosir, terutama yang dibangun oleh berbagai urusan penunjang pemerintahan masih berada pada kondisi yang belum optimal. Walaupun dari tata kelola keuangan yang dinilai dari Opini BPK Samosir sudah WTP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, namun akuntabilitas, penataan dan penguatan organisasi, perencanaan hingga pengawasannya belum optimal.

2. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki isu strategis kesehatan berupa rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Derajat kesehatan bermanfaat dalam memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang. Apabila derajat kesehatan rendah, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja penduduk.

3. Rendahnya Daya Saing Pendidikan

Identifikasi permasalahan dalam urusan pendidikan menunjukkan bahwa Kabupaten Samosir memiliki isu strategis berupa masih rendahnya daya saing pendidikan. Permasalahan tersebut direfleksikan oleh masih sedikitnya peserta didik di Kabupaten Samosir yang melanjutkan pendidikan di sekolah unggulan. Sementara itu, pada level akses dan kualitas pendidikan, capaian pembangunan pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, pembangunan pendidikan dalam periode ini difokuskan untuk meningkatkan daya saing pendidikan agar tercipta sumber daya manusia yang handal, bermartabat dan berdaya saing dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang pendidikan yang lain.

4. Tingginya angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Samosir masih berada di level 2 digit dengan tren 2 tahun terakhir terus meningkat yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini

menjadi perhatian karena tingkat kemiskinan ini masih berada jauh di atas tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang cenderung menurun dan mendekati 1 digit.

5. Kelestarian Budaya Asli Samosir Mengalami Degradasi

Kabupaten Samosir memiliki kebudayaan yang cukup beragam baik kebudayaan yang bersifat benda maupun nonbenda. Akan tetapi, kekayaan dan keragaman kebudayaan Kabupaten Samosir selama ini mengalami degradasi yang disebabkan oleh kurangnya pengenalan budaya terhadap generasi muda Kabupaten Samosir dan masuknya pengaruh budaya asing.

6. Belum Optimalnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar yang berkualitas di Kabupaten Samosir masih belum merata. Masih terdapat daerah/kawasan yang tidak memiliki sarana/prasarana untuk menunjang penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi, pertanian, pariwisata, perhubungan, dll

7. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh semakin menurunnya kualitas air, udara dan tutupan hutan. Tingginya laju deforestasi akibat alih fungsi lahan dan kebakaran hutan berakibat pada semakin menurunnya kualitas udara dan tutupan hutan. Belum adanya sistem pengelolaan sampah terpadu (TPS-3R dan TPA) menyebabkan semakin besarnya volume pencemaran sampah dan penggunaan pestisida yang berkelanjutan yang berkontribusi pada pencemaran air.

8. Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan PDRB berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor andalan utama. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada masing-masing sektor dan masih rendahnya daya ungkit penanaman modal, akibat masih sedikitnya nilai investasi di Kabupaten Samosir. Pertumbuhan ekonomi juga yang berkualitas dilihat dari aspek keadilannya. Pertumbuhan ekonomi yang adil dinilai dengan indeks gini yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Samosir 5 (lima) tahun mendatang.

9. Ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas

Dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu dari 5 KSPN Super Prioritas bersama Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara), membuka peluang bagi pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba termasuk Kabupaten Samosir untuk mendapatkan pembangunan di segala

sektor terutama dari Pemerintah Atasan (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat). Dengan adanya KSPN Danau Toba ini, Pemerintah Samosir harus dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Disamping penetapan isu strategis Kabupaten Samosir dalam lima tahun kedepan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 untuk penetapan perencanaan tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan juga isu strategis Kabupaten Samosir yang akan mempengaruhi perencanaan tahun 2023 berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Isu-isu strategis Kabupaten Samosir yang perlu ditangani dalam pembangunan adalah :

1. Tingginya angka kemiskinan;
Covid 19 berdampak terhadap turunnya kesejahteraan masyarakat. Penurunan tingkat pendapatan masyarakat akibat adanya pembatasan sosial mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Kurangnya inovasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat;
Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi yang belum terintegrasi serta akses dan konten informasi yang belum merata menyebabkan belum optimalnya penerapan pelayanan publik untuk pelayanan dasar dan perizinan (fasilitasi izin komoditi hasil koperasi Usaha tani, seperti label halal dan *brand*). Hal ini disebabkan masih rendahnya kemampuan teknologi inovasi SDM Aparatur dalam percepatan peningkatan pelayanan publik.
3. Belum optimalnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dampak covid-19;
Pandemi Covid 19 sangat berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir. Terdapat 3 isu strategis dampak covid 19 terhadap perekonomian Kabupaten samosir yaitu: menurunnya kontribusi sektor unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata serta menurunnya penerimaan daerah dari pajak dan retribusi akibat terganggunya sektor pariwisata serta menurunnya pendapatan daerah dari penerimaan pemerintah Pusat.
4. Rendahnya kualitas hidup sosial masyarakat;
5. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Samosir adalah jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas disamping perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta rendahnya kondisi kesehatan lingkungan akibat kurangnya sanitasi.
6. Rendahnya daya saing pendidikan;

Kualitas pendidikan masih rendah dan belum sepenuhnya dapat mengembangkan potensi peserta didik dan kecakapan hidupnya. Kualitas pendidikan juga masih mengalami ketimpangan antar satuan pendidikan antar kecamatan.

7. Rentannya pandemi Covid-19 dan bencana lainnya;

8. Kelestarian Budaya Asli mengalami degradasi;

Kelestarian budaya sangat berpengaruh pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kabupaten Samosir sebagai salah satu daerah yang mengandalkan sektor Pariwisata sebagai penyumbang PAD sangat terdampak signifikan akibat adanya Pandemi Covid 19. Sektor ini terdampak akibat penurunan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Salah satu rantai produksi pada sektor ini adalah SDM

9. Kurang optimalnya sarana prasarana publik;

Sarana dan prasarana publik merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang produktif. Dalam rangka peningkatan perekonomian untuk pemulihan pembangunan ekonomi pasca Covid19, percepatan peningkatan konektivitas transportasi jalan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pemulihan sektor unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata. Pemenuhan air bersih sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan sanitasi dan perilaku hidup bersih masyarakat.

10. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Belum optimalnya penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dalam mendukung kinerja ASN serta rendahnya inovasi dan kreativitas SDM aparatur mengharuskan Kabupaten Samosir untuk melakukan pengembangan dan pengoptimalan dalam penggunaan SPBE serta meningkatkan manajemen Aparatur.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah. Visi harus mampu menjelaskan menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat atau daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar bagi semua elemen dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan

pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan, yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SAMOSIR YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT,
SECARA EKONOMI, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN”**

Tabel 1.11
Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi
Samosir	Seluruh wilayah dan unsur masyarakat yang bermukim di Kabupaten Samosir
Sejahtera	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Kabupaten Samosir untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Bermartabat	Berperilaku hidup berdasarkan nurani yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak asasi manusia, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
Ekonomi	Mampu meningkatkan pendapatan diri sendiri dan keluarga melalui usaha-usaha sendiri maupun secara berkelompok.
Kesehatan	Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis
Pendidikan	Dapat mengembangkan potensi dirinya dengan tujuan mendapatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat

2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi.

Sesuai dengan Visi RPJMD ini, kemudian diturunkan kedalam 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih;
2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya.

Makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan sebagai mana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12
Makna Misi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih	Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terarah, terbuka, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemilihan para penyelenggara pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang dapat bekerja secara efektif, responsif dan bersih
2.	Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas	Mengoptimalkan potensi sumber daya daerah (Pertanian dan Pariwisata) yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah
3.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya	Meningkatkan sumber daya manusia yang handal, religius dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026. Selanjutnya dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Kabupaten Samosir menetapkan 10 (Sepuluh) Program Pembangunan Daerah atau disebut juga sebagai Program Unggulan Daerah yang dilaksanakan dengan kolaborasi antar semua stakeholder pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Tenaga Medis yang Handal ;
2. Peningkatan Kemampuan Guru, Pembangunan dan Inisiasi Sekolah Vokasi/Akademik Komunitas dan Pemberian Beasiswa pada Pelajar/Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi ;

3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau BPJS Gratis ;
4. Peningkatan dan Pemerataan Jalan dan Jembatan Penghubung antar Desa dan Pengadaan Alat Berat untuk Pembukaan jalan;
5. Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis kabupaten, Irigasi, Air Bersih dan Tata Kelola Persampahan;
6. Peningkatan Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Internet di seluruh Kabupaten Samosir;
7. Menjalin Kerjasama dengan Investor dalam rangka Pengadaan Teknologi dalam penyediaan Air Minum;
8. Pembangunan Pariwisata Samosir dengan melibatkan para pemuda dan masyarakat;
9. Menghadirkan 6 (enam) Produk UMKM Kabupaten berdasarkan potensi di 128 (seratus dua puluh delapan) desa dan 6 (enam) kelurahan;
10. Ketersediaan pupuk dan bibit yang merata.

Selanjutnya program pembangunan daerah sesuai dengan program yang ada pada Dokumen RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026 pada Tahun 2024 sebanyak 167 Program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.13
Tabel Rencana Pembangunan Berdasarkan RPJMD 2021-2026

No.	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Program pengelolaan pendidikan	Persentase PAUD yang memiliki guru sesuai jumlah Rombel	DISDIKPORA
2	Program pengembangan kurikulum	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	DISDIKPORA
3	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memperoleh SK PAK	DISDIKPORA
4	Program pengembangan bahasa dan sastra	Persentase sekolah yang memiliki Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten	DISDIKPORA
5	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH)	DINAS KESEHATAN
6	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki ketenagaan minimal	DINAS KESEHATAN

No.	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
7	Program persediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Ketentuan	DINAS KESEHATAN
8	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan desa siaga aktif	DINAS KESEHATAN
9	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	DISPUTR
10	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga berakses air bersih	DISPUTR
11	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi	DISPUTR
12	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Panjang drainase yang dibangun	DISPUTR
13	Program pengembangan permukiman	jumlah permukiman yang ditangani	DISPUTR
14	Program penyelenggaraan jalan	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	DISPUTR
15	Program pengembangan jasa konstruksi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	DISPUTR
16	Program penyelenggaraan penataan ruang	Perkada penyelenggaraan penataan ruang yang disusun	DISPUTR
17	Program kawasan permukiman	Persentase areal kawasan kumuh	DISPUTR
18	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
19	Program penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
20	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
21	Program pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	DINSOSPMD
22	Program rehabilitasi sosial	Persentasi PMKS yang direhabilitasi	DINSOSPMD
23	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	DINSOSPMD
24	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	DINSOSPMD
25	Program perencanaan tenaga kerja	Dokumen RTKD yang disusun	DISKOPNAKERINDAG

No.	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
26	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja terlatih	DISKOPNAKERINDAG
27	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan	DISKOPNAKERINDAG
28	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Nilai APE	DISP3PPKB
29	Program perlindungan perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	DISP3PPKB
30	Program peningkatan kualitas keluarga	Jumlah produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha perempuan	DISP3PPKB
31	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Nilai KLA	DISP3PPKB
32	Program perlindungan khusus anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi	DISP3PPKB
33	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Ketersediaan Pangan Utama	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
34	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
35	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase desa rentan rawan pangan tertangani	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
36	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
37	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
38	Program penetapan tanah ulayat	Jumlah tanah ulayat yang ditetapkan	SEKRETARIAT DAERAH
39	Program pengelolaan izin membuka tanah	Jumlah laporan pengelolaan izin membuka tanah	SEKRETARIAT DAERAH
40	Program penatagunaan tanah	Persentase penatagunaan tanah	SEKRETARIAT DAERAH
41	Program perencanaan lingkungan hidup	Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
42	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air (IKA)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
43	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
44	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
45	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
46	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Cakupan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
47	Program pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
48	Program pendaftaran penduduk	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan bidang pendaftaran penduduk	DISDUKCAPIL
49	Program pencatatan sipil	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	DISDUKCAPIL
50	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah pengguna database kependudukan	DISDUKCAPIL
51	Program penataan desa	Rata-rata persentase desa yang memiliki sarana prasarana pemerintahan yang menjadi kewenangan desa	DINSOSPMD
52	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Kawasan Perdesaan yang aktif	DINSOSPMD
53	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	DINSOSPMD
54	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	DINSOSPMD
55	Program pengendalian penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	DISP3PPKB
56	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	DISP3PPKB
57	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan kelompok yang melakukan kegiatan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	DISP3PPKB

No.	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
58	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah dokumen RI Jaringan LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN
59	Program pengelolaan pelayaran	Jumlah dermaga yang terbangun/ terpelihara	DINAS PERHUBUNGAN
60	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
61	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase jumlah sistem informasi yang dibangun terhadap kebutuhan/permintaan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
62	Program pengelolaan aplikasi informatika	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
63	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Jumlah Usaha mikro yang mendapatkan bantuan permodalan	DISKOPNAKERINDAG
64	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang dibina	DISKOPNAKERINDAG
65	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi dan UMKM	DISKOPNAKERINDAG
66	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase Rata-rata Peningkatan Omset Usaha Mikro	DISKOPNAKERINDAG
67	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan investor	DISPMPTSP
68	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan Nilai Realisasi	DISPMPTSP
69	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase aplikasi sistem informasi pelayanan yang dimanfaatkan	DISPMPTSP
70	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase wirausaha muda	DISDIKPORA
71	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Jumlah anggota Pramuka yang ditingkatkan kapasitasnya	DISDIKPORA
72	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase ketersediaan data sektoral yang terbaru	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
73	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase keamanan informasi sistem informasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
74	Program pengembangan kebudayaan	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
75	Program pengembangan kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
76	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		dilestarikan	
77	Program pengelolaan permuseuman	Jumlah Museum yang dikelola	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
78	Program pembinaan perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan daerah	SEKRETARIAT DAERAH
79	Program pengelolaan arsip	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan arsip terstandar	SEKRETARIAT DAERAH
80	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah kelompok nelayan dibina	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
81	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan dibina	
82	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah Monitoring perikanan tangkap	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
83	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pelatihan poklhasr yang dibina	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
84	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
85	Program pemasaran pariwisata	Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
86	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
87	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produksi Sektor Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
88	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Produksi Sektor Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
89	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Produksi sektor Peternakan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
90	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Produksi Sektor Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
91	Program penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
92	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direvitalisasi	DISKOPNAKERINDAG
93	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	DISKOPNAKERINDAG

No.	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
94	Program pengembangan ekspor	Jumlah Komoditi yang diekspor	DISKOPNAKERINDAG
95	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
96	Program perekonomian dan pembangunan	Cakupan perumusan dan pengendalian pembangunan, perekonomian dan pengadaan barang jasa	SEKRETARIAT DAERAH
97	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Persentase terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN
98	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan yang dievaluasi	BAPPEDA LITBANG
99	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA LITBANG
100	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan anggaran pendapatan yang bersumber dari non APBD	BPKPD
101	Program pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah yang disusun	BPKPD
102	Program pengelolaan pendapatan daerah	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah (dalam juta)	BPKPD
103	Program kepegawaian daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kualifikasi dan/atau kompetensi	BKPSDM
104	Program pengembangan sumber daya manusia	Jumlah pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan oleh BKPSDM yang bersertifikat	BKPSDM
105	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase kajian yang diimplementasikan/dimanfaatkan dalam perencanaan	BAPPEDA LITBANG
106	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT	INSPEKTORAT
107	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	INSPEKTORAT
108	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	KECAMATAN PANGURURAN
109	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	KECAMATAN SIMANINDO

No.	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
110	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	KECAMATAN PALIPI
111	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	KECAMATAN NAINGGOLAN
112	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	KECAMATAN ONANRUNGGU
113	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
114	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
115	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	KECAMATAN HARIAN
116	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase urusan pemerintahan yang didelegasikan ke kecamatan berjalan baik	KECAMATAN SITIO-TIO
117	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	KECAMATAN PANGURURAN
118	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	KECAMATAN SIMANINDO
119	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	KECAMATAN PALIPI
120	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	KECAMATAN NAINGGOLAN
121	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	KECAMATAN ONANRUNGGU
122	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
123	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
124	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	KECAMATAN HARIAN

No.	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
125	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase peningkatan desa yang masyarakatnya dibina/diberdayakan	KECAMATAN SITIO-TIO
126	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN PANGURURAN
127	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN SIMANINDO
128	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN PALIPI
129	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN NAINGGOLAN
130	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN ONANRUNGGU
131	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
132	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
133	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN HARIAN
134	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	KECAMATAN SITIO-TIO
135	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN PANGURURAN
136	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN SIMANINDO
137	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN PALIPI
138	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN NAINGGOLAN
139	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN ONANRUNGGU
140	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
141	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
142	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN HARIAN

No.	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		pemerintahan umum	
143	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN SITIO-TIO
144	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN PANGURURAN
145	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN SIMANINDO
146	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN PALIPI
147	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN NAINGGOLAN
148	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN ONANRUNGGU
149	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
150	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
151	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN HARIAN
152	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KECAMATAN SITIO-TIO
153	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	KECAMATAN PANGURURAN
154	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	KECAMATAN SIMANINDO
155	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	KECAMATAN PALIPI
156	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	KECAMATAN NAINGGOLAN
157	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	KECAMATAN ONANRUNGGU
158	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
159	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA

No.	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
160	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	KECAMATAN HARIAN
161	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	KECAMATAN SITIO-TIO
162	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
163	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Cakupan kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
164	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi masyarakat yang dibina/terdaftar	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
165	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Cakupan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
166	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Cakupan kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
167	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran	SEKRETARIAT DEWAN

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir pada tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Samosir Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024. Selanjutnya program pembangunan daerah sesuai dengan program yang ada pada RKPD Kabupaten Samosir tahun 2024 yaitu sebanyak 257 kegiatan dengan rincian sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1.14

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
11	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pendidikan Dasar	OLAHRAGA
12	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
13	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
14	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
15	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
16	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
17	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
18	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
19	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	DINAS KESEHATAN
20	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum pada Bayi baru lahir Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart Persentase Warga Negara Usia 60 tahun Keatas mendapatkan Skrining	DINAS KESEHATAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Kesehatan Sesuai Standar Prevalensi kekurangan gizi (underweight) Balita.	
21	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	DINAS KESEHATAN
22	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
23	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
24	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
25	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DINAS KESEHATAN
26	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tersedianya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DINAS KESEHATAN
27	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tersedianya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	DINAS KESEHATAN
28	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah	DINAS KESEHATAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tangga	
29	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
30	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
31	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS KESEHATAN
32	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
33	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Rumah Sakit	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
34	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
35	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
36	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pembangunan perkuatan tanah yang dibangun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
37	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan saluran irigasi dalam kondisi baik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
38	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga pengguna layanan air bersih	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
39	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sanitasi yang dibangun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang dibangun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
41	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun sesuai Persyaratan Bangunan Gedung	DINAS UMUM PEKERJAAN DAN TATA RUANG
42	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun baru	DINAS UMUM PEKERJAAN DAN TATA RUANG
43	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	DINAS UMUM PEKERJAAN DAN TATA RUANG
44	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Sistem informasi jasa konstruksi	DINAS UMUM PEKERJAAN DAN TATA RUANG
45	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tingkat pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	DINAS UMUM PEKERJAAN DAN TATA RUANG
46	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen turunan yang ditetapkan	DINAS UMUM PEKERJAAN DAN TATA RUANG
47	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan permukiman kumuh yang ditangani	DINAS UMUM PEKERJAAN DAN TATA RUANG
48	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas area kumuh yang ditangani	DINAS UMUM PEKERJAAN DAN TATA RUANG
49	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat di Lokasi rawan bencana yang mengikuti Sosialisasi rawan bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
50	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Menurunnya Kejadian Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
51	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban bencana yang diselamatkan, dan di Evakuasi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
52	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Pedoman Kebijakan Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
53	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik yang dimasyarakat ditangani	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
54	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian pelanggaran Ketertiban dan ketertiban umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
55	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam satu daerah kabupaten kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
56	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berkompeten	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
57	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang ditangani	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
58	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS dan PPKS yang dimutahirkan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
59	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kesiapsiagaan bencana yang disampaikan oleh Tagana	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
60	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
61	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
62	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
63	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
64	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
65	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
66	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
67	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
68	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
69	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
70	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
71	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
72	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
73	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
74	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
75	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
76	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
77	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
78	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
79	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
80	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
81	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
82	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
83	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
84	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
85	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memanfaatkan perencanaan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
86	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang memenuhi standar	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
87	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase titik pantau dengan kualitas air yang baik	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
88	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah keanekaragaman hayati yang dikelola	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
89	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
90	Pengelolaan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana yang layak pakai	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
91	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR
92	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
93	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
94	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
95	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
96	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
97	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
98	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
99	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang memiliki forum anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
100	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
101	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendampingan yang diberikan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
102	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
103	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan data kependudukan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
104	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
105	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Terpenuhinya Operasional Penggerakan Kader IMP	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
106	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan KB (Faskes) yang terpenuhi kebutuhan alokon	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
107	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi yang ikut berperan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
108	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok Unit Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) yang dibina	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
109	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Persentase organisasi yang ikut berperan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	ber-KB	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
110	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	DINAS PERHUBUNGAN
111	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal dalam kondisi baik	DINAS PERHUBUNGAN
112	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib KIR yang laik jalan	DINAS PERHUBUNGAN
113	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Ruas jalan kemacetan yang ditangani	DINAS PERHUBUNGAN
114	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah dokumen dan penerbitan yang tersedia	DINAS PERHUBUNGAN
115	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lintasan dan Pengoperasian Kapal yang terlayani	DINAS PERHUBUNGAN
116	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan yang berkualitas baik	DINAS PERHUBUNGAN
117	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah operator pelayaran yang melengkapi syarat-syarat administrasi dan dokumen kalayakan operasional pelayaran	DINAS PERHUBUNGAN
118	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
119	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
120	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
121	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pelatihan unit kompetensi	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
122	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kerja di daerah Kabupaten/ota	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
123	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelatihan unit berdasarkan kompetensi	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
124	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
125	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pelaku usaha yang memiliki legalitas	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
126	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah USaha Mikro	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
127	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang sudah layak	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
128	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
129	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang terbangun	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
130	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan industri kabupaten	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA,

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
131	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pelatihan unit berdasarkan kompetensi	UPT. BALAI LATIHAN KERJA KAB. SAMOSIR
132	Penataan Organisasi	Terlaksananya penataan organisasi	UPT. METROLOGI LEGAL DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
133	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Penerima Insentif/Kemudahan Berinvestasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
134	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi/Dokumen Kebijakan Investasi yang disusun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
135	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
136	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Kegiatan/Usaha yang terbit	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
137	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
138	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi perizinan yang digunakan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
139	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
140	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
141	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
142	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
143	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
144	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
145	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
146	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
147	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
148	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
149	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
150	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
151	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
152	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Operasional KDH/WKDH	SEKRETARIAT DAERAH
153	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
154	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya administrasi tata pemerintahn	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
155	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
156	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang tidak tumpang tindih	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
157	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDAKAB
158	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya kebijakan perekonomian	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
159	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya administrasi pembangunan	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
160	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - SETDAKAB
161	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
162	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten Samosir	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
163	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mengelola arsip daerah	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
164	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
165	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
166	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya penyediaan kebutuhan / fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
167	Penataan Organisasi	Terlaksananya kebutuhan penataan oraganisasi	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
168	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	ADMINISTRASI UMUM - SETDAKAB
169	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	SEKRETARIAT DEWAN
170	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pelaksanaan layanan Administrasi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN
171	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rapat Pembahasan Ranperda	SEKRETARIAT DEWAN
172	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	SEKRETARIAT DEWAN
173	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	SEKRETARIAT DEWAN
174	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	SEKRETARIAT DEWAN
175	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang ditingkatkan	SEKRETARIAT DEWAN
176	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
177	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daerah		DAN PENGEMBANGAN
178	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD pada SKPD lingkup koordinasi Bidang Perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan sosial budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
179	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase tingkat keselarasan perencanaan tahunan OPD bidang perekonomian dan SDA terhadap RKPD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
180	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan perencanaan tahunan OPD bidang sarpraswil terhadap RKPD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
181	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
182	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penyusunan dokumen Rencana Anggaran Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
183	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyusunan dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
184	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
185	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
186	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
187	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
188	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio pajak dan retribusi daerah terhadap Total PAD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
189	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
190	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pengisian Jabatan yang sesuai Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
191	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Dengan Peningkatan Kapasitas Sesuai Kebutuhan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
192	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Penilaian Kinerja ASN Minimal Baik	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
193	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pegawai yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
194	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN/Aparatur Pemkab Samosir yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Jabatan Fungsional, Prajabatan dan Pendidikan Formal	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
195	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya Pengawasan Internal	INSPEKTORAT
196	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	INSPEKTORAT
197	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	INSPEKTORAT
198	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT
199	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan desa	KECAMATAN PANGURURAN
200	Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan kelurahan	KECAMATAN PANGURURAN
201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	KECAMATAN PANGURURAN
202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi dan Layanan Administrasi kepada Masyarakat	KECAMATAN PANGURURAN
203	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN PANGURURAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
204	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan kelurahan	KELURAHAN PASAR
205	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan kelurahan	KELURAHAN SIOGUNGOGUNG
206	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan kelurahan	KELURAHAN PINTU SONA
207	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah administrasi tata Pemerintahan yang dilaksanakan	KECAMATAN SIMANINDO
208	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	KECAMATAN SIMANINDO
209	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan kelurahan	KECAMATAN SIMANINDO
210	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN SIMANINDO
211	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	KECAMATAN SIMANINDO
212	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN SIMANINDO
213	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	KECAMATAN SIMANINDO
214	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah administrasi tata Pemerintahan yang dilaksanakan	KECAMATAN PALIPI
215	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan desa	KECAMATAN PALIPI
216	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dengan kategori sehat	KECAMATAN PALIPI
217	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi dan Layanan Administrasi kepada Masyarakat	KECAMATAN PALIPI

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
218	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi dan Layanan Administrasi kepada Masyarakat	KECAMATAN PALIPI
219	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN PALIPI
220	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN NAINGGOLAN
221	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	KECAMATAN NAINGGOLAN
222	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN NAINGGOLAN
223	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	KECAMATAN NAINGGOLAN
224	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN NAINGGOLAN
225	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	KECAMATAN NAINGGOLAN
226	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan kelurahan	KELURAHAN SIRUMAHOMBAR
227	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan kelurahan	KELURAHAN PARHUSIP III
228	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	KECAMATAN ONANRUNGGU
229	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan desa	KECAMATAN ONANRUNGGU
230	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	KECAMATAN ONANRUNGGU
231	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	KECAMATAN ONANRUNGGU

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Umum	
232	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi dan Layanan Administrasi kepada Masyarakat	KECAMATAN ONANRUNGGU
233	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN ONANRUNGGU
234	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Administrasi tata pemerintahan yang dilaksanakan	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
235	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
236	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang terlaksana	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
237	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
238	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
239	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	KECAMATAN RONGGUR NIHUTA
240	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan desa	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
241	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan kecamatan	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
242	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi dan Layanan Administrasi kepada Masyarakat	KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA
243	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	KECAMATAN HARIAN
244	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan desa	KECAMATAN HARIAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
245	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dengan kategori sehat	KECAMATAN HARIAN
246	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas dan Layanan Administrasi kepada Masyarakat	KECAMATAN HARIAN
247	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN HARIAN
248	Administrasi Tata Pemerintahan	-	KECAMATAN SITIO-TIO
249	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	KECAMATAN SITIO-TIO
250	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	KECAMATAN SITIO-TIO
251	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN SITIO-TIO
252	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	KECAMATAN SITIO-TIO
253	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase Pelaksanaan Kegiatan dibidang pementapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
254	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
255	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	persentase pelaksanaan kegiatan teknis dan pemantapan pelaksanaan dibidang pemberayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
256	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	persentase pelaksanaan kegiatan teknis dan pemantapan pelaksanaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Budaya	dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	
257	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase pelaksanaan kegiatan teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Prioritas Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non alam

Tabel 1.15
Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Pencegahan dan Penanganan bencana alam dan non alam	Pencegahan Pandemi Covid-19 dan bencana lainnya	Penerapan protokol kesehatan	Jumlah fasilitas umum dan perkantoran yang menerapkan prokes
		Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah fasilitas penerapan hidup sehat
		Pengawasan masyarakat yang rentan virus Covid-19 secara berkala	persentase masyarakat yang diawasi secara berkala
	Penanganan Pandemi Covid-19 dan bencana lainnya	Pengadaan bahan dan alat kesehatan	Jumlah bahan dan alat kesehatan
		Peningkatan kuantitas dan kualitas TRC (Tim Reaksi Cepat) Nakes penanganan penderita Covid-19	Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani Covid-19
	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase kesiapsiagaan bencana yang terpenuhi
		Penguatan peringatan dini bencana	Jumlah peringatan dini bencana yang dilaksanakan

2. Prioritas Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Tabel 1.16
Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Kelestarian Budaya dan Pembangunan	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Pengembangan Desa Wisata	Jumlah desa wisata
		Pembentukan Agrowisata	Jumlah agrowisata
		Pengembangan Paket Wisata	Jumlah paket

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Pariwisata Berkelanjutan			wisata
		Pengembangan Kawasan Pemancingan Middle-higher class	Jumlah kawasan pemancingan
		Pembangunan Floating Food Court	Jumlah floating food court
		Pengembangan Homestay	Jumlah homestay
	Pelestarian Budaya	Penggalian situs budaya benda dan non benda	Jumlah situs budaya
		Program pelestarian Budaya	Persentase pelestarian budaya
	Pembangunan Pariwisata dengan melibatkan pemuda dan masyarakat	Mengefektifkan komunitas kepemudaan	Persentase keefektifan kepemudaan
		Peran Ulubalang di Kepariwisata	Persentase desa/kelurahan adat/budaya yang memiliki ulubalang
		Peran Pemuda dalam Kepariwisata	Jumlah kelompok pemuda dalam kepariwisataan

3. Prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur

Tabel 1.17
Peningkatan Aksesibilitas dan Kulaitas Infrastruktur

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur dasar	Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur dasar	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik
		Pengadaan dan pemeliharaan Alat Berat	Persentase penggunaan alat berat
		Pembangunan infrastruktur Jalan strategis Kabupaten	Persentase jalan strategis kondisi mantap
		Pembangunan infrastruktur Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
		Pembangunan infrastruktur Air Bersih	Persentase cakupan rumah tangga berakses air bersih
		Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Persentase sampah yang ditangani

Prioritas	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator
		Menjalin Kerjasama dengan Investor dalam rangka pengadaan teknologi (cth :pemanfaatan Air Minum)	Jumlah kerjasama dengan investor
			Jumlah perusda yang terbentuk
		Pembangunan drainase	Panjang drainase yang terbangun
		Peningkatan kualitas kawasan permukiman	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani
			Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani
			Persentase rumah tinggal bersanitasi
		Pembangunan/Peningkatan kualitas dermaga	Jumlah dermaga yang dibangun

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Aturan dan Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal telah diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai pelaksanaan atas Pasal 18 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai turunan dari PP 2 Tahun 2018 telah memberikan ketentuan dan aturan terkait Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Pemerintah Kabupaten Samosir telah mengatur tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan dimaksud untuk Kabupaten Samosir terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar;
- pendidikan kesetaraan;
- pelayanan kesehatan ibu hamil;

- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan belanja daerah harus mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian APBD antara lain dengan melakukan pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pengamanan pelaksanaan aqua bike di DPSP danau Toba, Pekan Olah Raga Nasional (PON) XXI, Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai, Penyelenggaraan Orientasi DPRD, Bantuan Keuangan Partai Politik dan Perbaikan kerusakan sarana dan prasarana umum.
2. Melakukan percepatan penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
3. Melakukan percepatan penggunaan dana Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja kategori kesejahteraan masyarakat;
4. Melakukan pencermatan dan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan SKPD yang tidak dapat dilaksanakan atau dapat ditunda pelaksanaannya.

Pemerintah Daerah dalam hal penganggaran kegiatan-kegiatan pada APBD TA 2024 juga harus memperhatikan kesesuaian dengan Program Kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan juga provinsi yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum dan Dana Desa sebesar Rp539.205.883.000,00;
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp122.970.118.000,00;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp104.326.911.000,00.

Mandatory Spending

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4) , UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU APBN, maka pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran mandatory spending. Data Kinerja Mandatory Spending Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.18

Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Kabupaten Samosir Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
I	Fungsi Pendidikan	255.683.096.090,00	248.874.687.655,00
II	Kesehatan	171.714.073.299,00	164.503.599.595,00
III	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	242.157.206.990,00	219.980.396.367,99

Selanjutnya data persentase mandatory spending Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.19

Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Kabupaten Samosir Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
		(%)	(%)
I	Fungsi Pendidikan	27,96	26,1
II	Kesehatan	17,68	17,53
III	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	24,72	22,45

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Samosir secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, serta telah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji dalam rangka peningkatan bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan belanja infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Samosir belum mencapai 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau desa, dan secara bertahap akan berupaya untuk mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

Penjelasan terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Samosir Tahun 2024 lebih lanjut dapat dilihat pada BAB IV.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja Makro Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Samosir

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,93	73,77	1,15
2	Angka Kemiskinan	11,66	11,63	0,25
3	Angka Pengangguran	1,03	0,89	13,59
4	Pertumbuhan Ekonomi (miliar rupiah)	3.470,05	3.644,15	5,02
5	Pendapatan Per kapita (rupiah)	40.020.000	42.640.000	6,54
6	Ketimpangan pendapatan (rasio gini)	0,251	0,238	5,17

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tersebut didapatkan gambaran peningkatan capaian kinerja diantaranya yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia naik sebesar 0.84 poin dengan persentase perubahan sebesar 1.15 % jika dibandingkan dengan tahun lalu. Secara rinci Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN	
			2023	2024
1	Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	74,10	74,35
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,51	13,52

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN	
			2023	2024
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,47	9,61
4	Pengeluaran Perkapita	Ribu rupiah	9.158	9.634
Indeks Pembangunan Manusia			72,93	73,77

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir 2025

Peningkatan IPM 2024 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH Samosir telah meningkat sebesar 1,04 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,35 persen per tahun. Pada 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Samosir adalah 73,31 tahun, dan di 2024 mencapai 74,35 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,25 tahun (0,34 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

HLS Kabupaten Samosir tahun 2024 meningkat 0,01 tahun (0,07 persen) dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, RLS Kabupaten Samosir tahun 2024 meningkat 0,14 tahun (1,48 persen) dibandingkan tahun 2023.

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Samosir mencapai Rp 9,63 juta per tahun. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 476 ribu rupiah (5,20 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Angka Kemiskinan di Kabupaten Samosir mengalami penurunan sebesar 0,3 Poin dengan persentase penurunan sebesar 0,03%. Hal ini berarti jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Samosir pada tahun 2024 berkurang sebesar 0,03 jika dibandingkan dengan tahun 2023.
3. Sejalan dengan Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran di Kabupaten Samosir mengalami penurunan sebesar 0,14 Poin dengan persentase penurunan sebesar 0,14%. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Samosir pada tahun 2024 berkurang sebesar 0,14% jika dibandingkan dengan tahun 2023.
4. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Samosir Tahun 2024 tercatat sebesar 5,02%. Pertumbuhan ini didapatkan dari pertambahan Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan 2010 dari 3.470,05 miliar rupiah pada tahun 2023 meningkat menjadi 3.664,15 miliar rupiah pada tahun 2024. Laju pertumbuhan atas dasar harga konstan 2010 merupakan ukuran laju pertumbuhan

ekonomi yang berarti bahwa perekonomian Kabupaten Samosir mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada tahun 2024.

5. Pendapatan Perkapita pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp.42.640.000,- perorang pertahun. Jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita Tahun 2023 sebesar Rp.40.020.000,- maka terjadi peningkatan pendapatan perkapita perorang sebesar 6,54%.
6. Nilai Gini Ratio Kabupten Samosir Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,013 poin dibandingkan dengan tahun lalu dengan persentase sebesar 5,17%. Nilai Gini Ratio berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1, nilai Gini Ratio yang semakin mendekati angka satu menunjukkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat. Tahun 2024 angka ketimpangan penduduk mengalami penurunan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1	Pendidikan	1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	3.841 -----x 100% 4.911	78,21 %	DISDIKPORA DISDUKCAPIL	
		2.	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	17.072 -----x 100% 18.111	94,26 %	DISDIKPORA DISDUKCAPIL	
		3.	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	8.085 -----x 100% 9.889	81,75 %	DISDIKPORA DISDUKCAPIL	
		4.	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	13 -----x 100% 522	2,49 %	DISDIKPORA DISDUKCAPIL	
2	Kesehatan	5.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	108 -----x 100% 149.875	0,072 %	RSUD dr. HADRIANUS SINAGA, DISDUKCAPIL	
		6.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	1 -----x 100% 1	100 %	RSUD dr. HADRIANUS SINAGA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		7.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1.370 -----x 100% 1.603	85,46 %	DINKES	
		8.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1.556 -----x 100% 1.561	99,68 %	DINKES	
		9.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1.520 -----x 100% 1.561	97,37 %	DINKES	
		10.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	8.740 -----x 100% 10.764	81,20 %	DINKES	
		11.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27.094 -----x 100% 27.094	100 %	DINKES	
		12.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	28.631 -----x 100% 85.030	33,67 %	DINKES	
		13.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	14.921 -----x 100% 14.921	100 %	DINKES	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		14.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.168 -----x 100% 39.768	20,54 %	DINKES	
		15.	Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	929 -----x 100% 1.581	58,76%	DINKES	
		16.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	378 -----x 100% 200	189 %	DINKES	
		17.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	2.382 -----x 100% 2.382	100 %	DINKES	
		18.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	3.355 -----x 100% 3.458	97,02 %	DINKES	
3	Pekerjaan Umum	19.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
		20.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		21.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	1.808 Ha -----x 100% 2.610 Ha	69,27%	DISPUTR	
		22.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	18.886 -----x 100% 33.819	55,84 %	DISPUTR	
		23.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
		24.	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	41 -----x 100% 41	100 %	DISPMPTSP	
		25.	Rasio kemantapan jalan Kabupaten	416,57 Km -----x 100% 771,22 Km	54,01 %	DISPUTR	
		26.	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	73 -----x 100% 114	64,04 %	DISPUTR	
		27.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	224 -----x 100% 224	100 %	DISPUTR	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
4	Perumahan Rakyat	28.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
		29.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0 -----x 100% 0	0,18 %	DISPUTR	
		30.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	0,08 -----x 100% 43,99	0	DISPUTR	
		31.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2.783 -----x 100% 33.819	8,23 %	DISPUTR	
		32.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	2 -----x 100% 2	100 %	SATPOL PP	
		34.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	13 -----x 100% 13	100 %	SATPOL PP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		35.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	70 -----x 100% 111.662	0,06 %	BPBD	
		36.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	20 -----x 100% 149.875	0,01 %	BPBD	
		37.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0 -----x 100% 0	0 %	BPBD	
		38.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	20 -----x 100% 20	100 %	SATPOL PP	
		39.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14,65 menit		SATPOL PP	
6	Sosial	40.	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.334 -----x 100% 1.607	83,01 %	DINSOS PMD	
		41.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	64 -----x 100% 64	100 %	DINSOS PMD	
7	Tenaga Kerja	42.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		43.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	57.676 -----x 100% 85.535	67,43%	DISKOP NAKERINDAG	
		44.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6.100.410.000.000 -----x 100% 85.535	71.320.628,98	DISKOP NAKERINDAG	
		45.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	4 -----x 100% 153	2,61 %	DISKOP NAKERINDAG	
		46.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	82 -----x 100% 686	11,95%	DISKOP NAKERINDAG	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	47.	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	0 -----x 100% 435.396.474.562,67	0 %	DISP3A PPKB	
		48.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	19 -----x 100% 19	100 %	DISP3A PPKB	
		49.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	19 -----x 100% 75.443	0,03%	DISP3A PPKB	
9	Pangan	50.	Persentase Cadangan Pangan	22,58 -----x 100% 10	225,80%	DISKPP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
10	Pertanahan	51.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	24.054,46 -----x 100% 24.054,46	100 %	DISPMPTSP	
		52.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0 -----x 100% 0	0 %	DISPMPTSP	
		53.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	24.054,46 -----x 100% 24.054,46	100 %	DISPMPTSP	
		54.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 -----x 100% 0	0 %	DISPMPTSP	
		55.	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0 -----x 100% 0	0 %	DISPMPTSP	
		56.	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0 -----x 100% 0	%	DISPMPTSP	
11	Lingkungan Hidup	57.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	70,93		DISLINGKUP	
		58.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	12.866 -----x 100% 22.510	57,2 %	DISLINGKUP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		59.	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	5 -----x 100% 5	100 %	DISLINGKUP	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.	Perekaman KTP Elektronik	104.274 -----x 100% 105.082	99,23 %	DISDUKCAPIL	
		61.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	38.317 -----x 100% 43.493	88,09 %	DISDUKCAPIL	
		62.	Kepemilikan akta kelahiran	46.459 -----x 100% 47.119	98,60 %	DISDUKCAPIL	
		63.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	3 -----x 100% 32	9,37 %	DISDUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64.	Persentase pengembangan desa tertinggal	3 -----x 100% 11	27,27 %	DINSOSPMD	
		65.	Persentase peningkatan status desa mandiri	13 -----x 100% 97	13,40 %	DINSOSPMD	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
14	PP& KB	66.	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR = $\sum ASFR_i$	3,1	DISP3A PPKB	
		67.	Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	9.783 -----x 100% 13.752	71,13 %	DISP3A PPKB	
		68.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	2.041 -----x 100% 13.752	14,84 %	DISP3A PPKB	
15	Perhubungan	69.	Rasio konektivitas	83		DISHUB	
		70.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	52.457,38 (0,075%)		DISHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	71.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	32 -----x 100% 32	100 %	DISKOMINFO	
		72.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	13 -----x 100% 17	76,47%	DISKOMINFO	
		73.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	107.479 -----x 100% 137.830	77,98%	DISKOMINFO	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan	74.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	25 -----x 100% 25	100 %	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
	Menengah	75.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	197 -----x 100% 29.016	0,67%	DISKOP NAKERINDAG	
18	Penanaman Modal	76.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	487.932.287.110 -----x 100% 5.886.639.397.552	-8,29%	DISPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	77.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	260 -----x 100% 39.781	0,65 %	DISDIKPORA	
		78.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3.271 -----x 100% 39.781	8,22 %	DISDIKPORA	
		79.	Peningkatan prestasi olahraga	17		DISDIKPORA	
20	Statistik	80.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	2 -----x 100% 32	6,25%	DISKOMINFO	
		81.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	2 -----x 100% 32	6,25%	DISKOMINFO	
21	Persandian	82.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0 -----x 100 % 0	0 %	DISKOMINFO	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
22	Kebudayaan	83.	Terlestarikannya Cagar Budaya	75 -----x 100% 142	52,81 %	DISBUDPAR	
23	Perpustakaan	84.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang di ukur menggunakan survei/ kajian kegemaran membaca	62,79 %		BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		85.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	49,27 %		BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
24	Kearsipan	86.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional(Ps 40 dan 59 UU No 43/2009 tentang kearsipan)	$T = (A+I+S+J)/4$ $= (100+100+100+100)/4$ $= 100$	100 %	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		87.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (M+B=G+A+C+I)/6$ $= (0+0+100+0+0+0+0)/6$ $= 16,66$	16,66 %	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH SETDAKAB. SAMOSIR	
25	Perikanan	88.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	9.512,17 Ton -----x 100% 9.500 Ton	100,13 %	DISKPP	
26	Pariwisata	89.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	15.705 – 10.959 -----x 100% 10.959	43,3 %	DISBUDPAR	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		90.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	$\frac{1.761.427 - 997.772}{997.772} \times 100\%$	76,53 %	DISBUDPAR	
		91.	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0 %	DISBUDPAR	
		92.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{284,3}{5.656} \times 100\%$	5,03	DISBUDPAR	
		93.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{20.493.001.408}{82.398.644.267} \times 100\%$	25%	DISBUDPAR	
27	Pertanian	94.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{136.568,41}{20.967,87} \times 100\%$	6,51	DISKPP	
		95.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{1.026}{1.565} \times 100\%$	-65,56	DISKPP	
28	Energi Sumber daya mineral	96.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	0		Bagian Pemerintahan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
29	Perdagangan	97.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	6 -----x 100% 6	100 %	DISPMPTSP	
		98.	Persentase kinerja realisasi pupuk	15.043,66 -----x 100% 28.220,52	53,3 %	DISKPP	
		99.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda ter sah yang berlaku	438 -----x 100% 1.059	41,35 %	DISKOP NAKERINDAG	
30	Perindustrian	100.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	296-236 -----x 100% 236	25,42 %	DISKOP NAKERINDAG	
		101.	Persentase pencapaian sasaran Pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		102.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang dikeluarkan oleh instansi terkait	2 -----x 100% 2	100 %	DISPMPTSP	
		103.	Persentase sejumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 -----x 100% 0	0 %	DISPMPTSP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		104.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0 -----x 100% 0	0 %	DISPMPTSP	
		105.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	70 %		DISKOP NAKERINDAG	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	FUNGSI PENUNJANG	No Urut	Indikator Kinerja Kunci	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1	Perencanaan dan Keuangan	1.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	127.653.040.746,00 -----x 100% 923.747.089.607,17	13,81%	BPKPD	
		2.	Rasio PAD	89.228.670.453,07 -----x 100% 911.609.520.726,07	9,788%	BPKPD	
		3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0		Inspektorat	
		4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		Inspektorat	
		5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	571.457.577.227,18 -----x 100% 923.747.089.607,17	61,86%	BPKPD	
		6.	Opini laporan keuangan	7		BPKPD	
2	Pengadaan	7.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 -----x 100% 42	0%	DISPUTR	Belum ada data dukung
		8.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1.370 -----x 100% 3.237	42,32%	SETDAKAB OPD se. KAB SAMOSIR/	

NO	FUNGSI PENUNJANG	No Urut	Indikator Kinerja Kunci	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		9.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	385.630.358.572,78 -----x 100% 784.367.225.510,17	49,16%	SETDAKAB OPD se. KAB SAMOSIR	
		10.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	43.241.422.010,40 -----x 100% 266.170.382.809,00	16,24%	SETDAKAB OPD se. KAB SAMOSIR	
3	Kepegawaian	11.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	806 -----x 100% 953	84,57%	BKPSDM	
		12.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	157 -----x 100% 953	16,47%	BKPSDM	
		13.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	33 -----x 100% 157	21,01%	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	14.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	923.747.089.607,17 -----x 100% 979.740.001.962,00	5,72%	BPKPD	
		15.	Revenue Mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	89.228.670.453,07 -----x 100% 81.923.559.252,00	8,92 %	BPKPD	

NO	FUNGSI PENUNJANG	No Urut	Indikator Kinerja Kunci	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	16.	Assets Management	3		BPKPD	
		17.	Cash management Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	39.893.207.235,18 -----x 100% 880.482.580.805,09	4,53%	BPKPD	
		18.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	0 -----x 100% 0	0%	KOMINFO	
		19.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	3 -----x 100% 17	17,65%	KOMINFO	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	1.	Jumlah sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terakreditasi (Negeri dan Swasta)	36	DISDIKPORA	
		2.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DISDIKPORA	
		3.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	3.113	DISDIKPORA	
		4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	426	DISDIKPORA	
		5.	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	277	DISDIKPORA	
		6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Lain atau Psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	134	DISDIKPORA	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7.	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk PAUD Formal atau sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non-Formal dari Lembaga Pemerintah	43	DISDIKPORA	
		8.	Jumlah SD dan SMP negeri terakreditasi	226	DISDIKPORA	
		9.	Jumlah peserta didik jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DISDIKPORA	
		10.	Jumlah peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima yang perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DISDIKPORA	
		11.	Jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	17.308	DISDIKPORA	
		12.	Jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	9.437	DISDIKPORA	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		13.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	1.803	DISDIKPORA	
		14.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	666	DISDIKPORA	
		15.	Jumlah pendidik pada jenjang Sekolah Dasar	1.392	DISDIKPORA	
		16.	Jumlah pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	540	DISDIKPORA	
		17.	Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	390	DISDIKPORA	
		18.	Jumlah Kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	140	DISDIKPORA	
		19.	Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)	272	DISDIKPORA	
		20.	Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)	105	DISDIKPORA	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		21.	Jumlah pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat Pendidik	1.392	DISDIKPORA	
		22.	Jumlah pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat Pendidik	540	DISDIKPORA	
		23.	Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	180	DISDIKPORA	
		24.	Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	34	DISDIKPORA	
		25.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	88	DISDIKPORA	
		26.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	68	DISDIKPORA	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		27.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	2	DISDIKPORA	
		28.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DISDIKPORA	
		29.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	19	DISDIKPORA	
		30.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	39	DISDIKPORA	
		31.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	22	DISDIKPORA	
		32.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat Pendidik	15	DISDIKPORA	
		33.	Jumlah Kepala Sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	1	DISDIKPORA	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kesehatan	1.	Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	RSUD dr. HADRIANUS SINAGA	
		2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	RSUD dr. HADRIANUS SINAGA	
		3.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9	DINKES	
		4.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	148	DINKES	
		5.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINKES	
		6.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	148	DINKES	
		7.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	DINKES	
		8.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	148	DINKES	
		9.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8	DINKES	
		10.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	188	DINKES	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		11.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	DINKES	
		12.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	184	DINKES	
		13.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11	DINKES	
		14.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	177	DINKES	
		15.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINKES	
		16.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	177	DINKES	
		17.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINKES	
		18.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	158	DINKES	
		19.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINKES	
		20.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	166	DINKES	
		21.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2	DINKES	
		22.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	24	DINKES	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		23.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8	DINKES	
		24.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	37	DINKES	
		25.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	DINKES	
		26.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	49	DINKES	
3	Pekerjaan Umum	1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DISPUPR	
		2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DISPUTR	
		3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DISPUTR	
		4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota	0	DISPUTR	
		5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DISPUTR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	DISPUTR	
		7.	Data Sarana dan Prasarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten Kota	0	DISPUTR	
		8.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DISPUTR	
		9.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DISPUTR	
		10.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DISPUTR	
		11.	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota	0	DISPUTR	
		12.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DISPUTR	
		13.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	DISPUTR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		14.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai milik pemerintah Kabupaten/kota	0		DISPUTR	
		15.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUPR	
		16.	Persentase panjang irigasi sekunder dalam kondisi baik	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUPR	
		17.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUPR	
		18.	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada		DISPUTR	
		19.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten Kota	0		DISPUTR	
		20.	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	0		DISPUTR	
		21.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0		DISPUTR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		22.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1	DISPUTR	
		23.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	DISPUTR	
		24.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	DISPUTR	
		25.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	DISPUTR	
		26.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	DISPUTR	
		27.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	DISPUTR	
		28.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	DISPUTR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		29.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
		30.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
		31.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
		32.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
		33.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
		34.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		35.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
		36.	Kinerja Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
		37.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0 -----x 100% 0	0 %	DISPMPTSP	
		38.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	41		DISPUTR	
		39.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada		DISPUTR	
		40.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada		DISPUTR	
		41.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0		DISPM PTSP	
		42.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0		DISPM PTSP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		43.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten	2.130	DISPUTR	
		44.	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	542	DISPUTR	
		45.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	771.215 km	DISPUTR	
		46.	Panjang jalan yang dibangun	26,25 M	DISPUTR	
		47.	Panjang jembatan yg dibangun	0 M	DISPUTR	
		48.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	13 KM	DISPUTR	
		49.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	1 unit	DISPUTR	
		50.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	23,08 M	DISPUTR	
		51.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	1 unit	DISPUTR	
		52.	Panjang jalan yang dipelihara	21,36 Km	DISPUTR	
		53.	Panjang jembatan yang dipelihara	8,5 M	DISPUTR	
		54.	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1	DISPUTR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		55.	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	93	DISPUTR	
		56.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	73	DISPUTR	
		57.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	DISPUTR	
		58.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	DISPUTR	
		59.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	DISPUTR	
		60.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	DISPUTR	
		61.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	DISPUTR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		62.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	DISPUTR	
		63.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	DISPUTR	
		64.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	DISPUTR	
		65.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	DISPUTR	
		66.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	DISPUTR	
		67.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DISPUTR, DPMPSTP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		68.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DISPUTR, DPMPSTSP	
		69.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DISPUTR, DPMPSTSP	
		70.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DISPUTR, DPMPSTSP	
		71.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	DISPM& PPTSP	
		72.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	DISPM& PPTSP	
		73.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	DISPUTR, DPMPSTSP	
		74.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	DISPUTR, DPMPSTSP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		75.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DISPM&PPTS P	
		76.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DISPUTR	
		77.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DISPUTR	
		78.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DISPUTR	
4	Perumahan Rakyat	1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	DISPUTR	
		2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0 Unit	DISPUTR	
		3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Orang	DISPUTR	
		4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	DISPUTR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DISPUTR	
		6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DISPUTR	
		7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DISPUTR	
		8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	DISPUTR	
		9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DISPUTR	
		10.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPUTR	
		11.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPUTR	
		12.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPUTR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		13.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPUTR	
		14.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPUTR	
		15.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DISPUTR	
		16.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	43,99 Ha	DISPUTR	
		17.	Jumlah unit peningkatan RTLH	0	DISPUTR	
		18.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0 Ha	DISPUTR	
		19.	Jumlah rumah di kab/kota	0	DISPUTR	
		20.	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	268	DISPUTR	
		21.	Jumlah rumah tidak layak huni	0	DISPUTR	
		22.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DISPUTR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		23.	Rasio rumah dan KK	0 -----x 100% 0	0 %	DISPUTR	
		24.	Jumlah rumah pembangunan baru	0		DISPUTR	
		25.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	0		DISPUTR	
		26.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0		DISPUTR	
		27.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0		DISPUTR	
		28.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0		DISPUTR	
		29.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0		DISPUTR	
		30.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0		DISPUTR	
		31.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		DISPUTR	
		32.	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0		DISPUTR	
		33.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		DISPUTR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
5	Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten	1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani	296 Kasus		SATPOL PP	
		2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.513		SATPOL PP	
		3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	13		SATPOL PP	
		4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Tidak ada		SATPOL PP	
		5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada		SATPOL PP	
		6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada		SATPOL PP	
		7.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 -----x100% 0	0 %	BPBD	
		8.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	50 -----x100% 149.875	0,034 %	BPBD	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		9.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0 -----x100% 0	0 %	BPBD	
		10.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0 -----x 100% 0	0 %	BPBD	
		11.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	20 -----x 100% 149.875	0,01 %	BPBD	
		12.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan di Kawasan rawan bencana	0 -----x 100% 149.875	0 %	BPBD	
		13.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0 -----x 100% 149.875	0 %	BPBD	
		14.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan layanan peralatan perlindungan	0 -----100% 149.875	0 %	BPBD	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		15.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0 -----x 100% 0	0 %	BPBD	
		16.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0 -----x 100% 0	0 %	BPBD	
		17.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	0 -----x 100% 0	0 %	BPBD	
		18.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0 -----x 100% 0	0 %	BPBD	
		19.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	2		SATPOL PP	
		20.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada		SATPOL PP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		21.	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	SATPOL PP	
		22.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Ada	SATPOL PP	
		23.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	8 Unit	SATPOL PP	
		24.	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	4 Orang	SATPOL PP	
		25.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tidak ada	SATPOL PP	
		26.	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	1 Orang	SATPOL PP	
6	SOSIAL	1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3	DINSOSPMD	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1.334	DINSOSPMD	
		3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	DINSOSPMD	
		4.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1.334	DINSOSPMD	
		5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	DINSOSPMD	
		6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1.111	DINSOSPMD	
		7.	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	DINSOSPMD	
		8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	752	DINSOSPMD	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	56	DINSOSPMD	
		10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	DINSOSPMD	
		11.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	DINSOSPMD	
		12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	909	DINSOSPMD	
		13.	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	DINSOSPMD	
		14.	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	52	DINSOSPMD	
		15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	752	DINSOSPMD	
		16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	742	DINSOSPMD	
		17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	11	DINSOSPMD	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	1.106	DINSOSPMD	
		19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	4	DINSOSPMD	
		20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	4	DINSOSPMD	
		21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	23	DINSOSPMD	
		22.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	64	DINSOSPMD	
		23.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	64	DINSOSPMD	
		24.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	DINSOSPMD	
		25.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	64	DINSOSPMD	
		26.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	64	DINSOSPMD	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		27.	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	52		DINSOSPMD	
7	Ketenaga kerjaan	1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	0		DISKOP NAKERINDAG	
		2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten	0		DISKOP NAKERINDAG	
		4.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klister	10 -----x 100% 10	100 %	DISKOP NAKERINDAG	
		5.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	9 -----x 100% 9	100 %	DISKOP NAKERINDAG	
		6.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	9 -----x 100% 160	5,62 %	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		7.	Persentase LPK yang terakreditasi	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		8.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		9.	Jumlah penganggur yang dilatih	160		DISKOP NAKERINDAG	
		10.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	160 -----x 100% 160	100 %	DISKOP NAKERINDAG	
		11.	Persentase penyerapan lulusan	54 -----x 100% 160	33,75 %	DISKOP NAKERINDAG	
		12.	Lulusan bersertifikat kompetensi	104 -----x 100% 160	65 %	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		13.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0 -----x 100% 70	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		14.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0		DISKOP NAKERINDAG	
		15.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0 -----x 100% 153	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		16.	Data tingkat produktivitas total	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		17.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	4 -----x 100% 35	11,43 %	DISKOP NAKERINDAG	
		18.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		19.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0		DISKOP NAKERINDAG	
		20.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	4 -----x 100% 4	100 %	DISKOP NAKERINDAG	
		21.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	80 -----x 100% 153	52,2 %	DISKOP NAKERINDAG	
		22.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0 -----x 100% 153	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		23.	Jumlah mogok kerja	0		DISKOP NAKERINDAG	
		24.	Jumlah penutupan perusahaan	0		DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		25.	Jumlah perselisihan kepentingan	0		DISKOP NAKERINDAG	
		26.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		DISKOP NAKERINDAG	
		27.	Jumlah perselisihan PHK	0		DISKOP NAKERINDAG	
		28.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0		DISKOP NAKERINDAG	
		29.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0		DISKOP NAKERINDAG	
		30.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0		DISKOP NAKERINDAG	
		31.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		32.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1	DISKOP NAKERINDAG	
		33.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	55	DISKOP NAKERINDAG	
		34.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	1	DISKOP NAKERINDAG	
		35.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	1	DISKOP NAKERINDAG	
		36.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	DISKOP NAKERINDAG	
		37.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	DISKOP NAKERINDAG	
		38.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		39.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0		DISKOP NAKERINDAG	
		40.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0 -----x 100% 70	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		41.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	70		DISKOP NAKERINDAG	
		42.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		43.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		44.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		45.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten	1.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG	0		DISP3A PPKB	
		2.	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	0		DISP3A PPKB	
		3.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (DINAS PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0		DISP3A PPKB	
		4.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0		DISP3A PPKB	
		5.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	19 -----x 100% 19	100 %	DISP3A PPKB	
		6.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0		DISP3A PPKB	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah	0	DISP3A PPKB	
		8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0	DISP3A PPKB	
		9.	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0	DISP3A PPKB	
		10.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	DISP3A PPKB	
		11.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	0	DISP3A PPKB	
		12.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	DISP3A PPKB	
		13.	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	0	DISP3A PPKB	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		14.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	19 -----x 100% 19	100 %	DISP3A PPKB	
9	Pangan	1.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak ada		DISKPP	
		2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada		DISKPP	
		3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada		DISKPP	
		4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada		DISKPP	
		5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada		DISKPP	
		6.	Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak Ada		DISKPP	
		7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada		DISKPP	
		8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada		DISKPP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
10	Pertanahan	1.	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	0 -----x 100% 0	0 %	DISPMPPTSP	
		2.	SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0 -----x 100% 0	0 %	Bagian Pertanahan	
		3.	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ <i>Absentee</i>	0 -----x 100% 0	0 %	Bagian Pertanahan	
		4.	Dokumen Izin membuka tanah	0 -----x 100% 0	0 %	Bagian Pertanahan	
		5.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	0 -----x 100% 0	100 %	Bagian Pertanahan	
11	Lingkungan Hidup	1.	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKA = 53,64 IKU = 93,9 ITL = 58,17		DISLINGKUP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		2.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada		DISLINGKUP	
		3.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	17 -----x 100% 17	100 %	DISLINGKUP	
		4.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	2 -----x 100% 17	11,76 %	DISLINGKUP	
		5.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten	0 -----x 100% 0	0 %	DISLINGKUP	
		6.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0 -----x 100% 0	0 %	DISLINGKUP	
		7.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0 -----x 100% 0	0 %	DISLINGKUP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		8.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	5 -----x 100% 5	100 %	DISLINGKUP	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Penerbitan akta perkawinan	1.446 -----x 100% 1.446	100 %	DISDUKCAPIL	
		2.	Penerbitan akta perceraian	10 -----x 100% 10	100 %	DISDUKCAPIL	
		3.	Penerbitan akta kematian	986 -----x100% 986	100 %	DISDUKCAPIL	
		4.	Penyajian data kependudukan	2		DISDUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten	1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	1		DINSOSPMD	
		2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	1		DINSOSPMD	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	3	DINSOSPMD	
		4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	11	DINSOSPMD	
		5.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	6	DINSOSPMD	
		6.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	6	DINSOSPMD	
		7.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	3	DINSOSPMD	
		8.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	6	DINSOSPMD	
14	Pengendalian Penduduk dan	1.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	DISP3A PPKB	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
	Keluarga Berencana	2.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23,5		DISP3A PPKB	
		3.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	32,17		DISP3A PPKB	
		4.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	61,3%		DISP3A PPKB	
		5.	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	8		DISP3A PPKB	
		6.	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	26 -----x 100% 26	100 %	DISP3A PPKB	
		7.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	9.783 -----x 100% 13.752	71,13%	DISP3A PPKB	
		8.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	0		DISP3A PPKB	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		9.	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	1.029 -----x 100% 1.561	65,91%	DISP3A PPKB	
		10.	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	11 Desa		DISP3A PPKB	
		11.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	4.716 -----x 100% 13.752	34,29%	DISP3A PPKB	
15	Perhubungan	1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan Tipe C	2 -----x 100% 2	100 %	DISHUB	
		2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	41 -----x 100% 1.307	3,13 %	DISHUB	
		3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	17 -----x 100% 39	43,58 %	DISHUB	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	4.683,93 -----x 100% 50.250	9,321 %	DISHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	1.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	32 -----x 100% 32	100 %	DISKOMINFO	
		2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	32 -----x 100% 32	100 %	DISKOMINFO	
		3.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Tidak Ada		DISKOMINFO	
		4.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang registrasi nama domain instansi penyelenggara negara	11 -----x 100% 11	100 %	DISKOMINFO	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		5.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	2 -----x 100% 32	6,25%	DISKOMINFO	
		6.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	32 -----x 100% 32	100 %	DISKOMINFO	
		7.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	38 -----x 100% 131	29,01%	DISKOMINFO	
		8.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	13 -----x 100% 37	35,14%	DISKOMINFO	
		9.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	8 -----x 100% 37	21,62%	DISKOMINFO	
		10.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	14 -----x 100% 37	37,84 %	DISKOMINFO	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		11.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	32 -----x 100% 32	100 %	DISKOMINFO	
		12.	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	5 -----x 100% 32	21,87%	DISKOMINFO	
		13.	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	32 -----x 100% 32	100 %	DISKOMINFO	
		14.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	7 -----x 100% 7	100 %	DISKOMINFO	
		15.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	32 -----x 100% 32	100 %	DISKOMINFO	
		16.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOMINFO	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		17.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government	Ada		DISKOMINFO	
		18.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten	114 -----x 100% 114	100 %	DISKOMINFO	
		19.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	72.926 -----x 100% 72.926	100 %	DISKOMINFO	
		20.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	4 -----x 100% 4	100 %	DISKOMINFO	
17	Koperasi dan UKM	1.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0 -----x 100% 5	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 -----x 100% 1	0 %	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	76 -----x 100% 76	100 %	DISKOP NAKERINDAG	
		4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 -----x 100% 10	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	16 -----x 100% 76	21,05%	DISKOP NAKERINDAG	
		6.	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	25 -----x 100% 21.721	0,11%	DISKOP NAKERINDAG	
		7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1 -----x 100% 76	1,31%	DISKOP NAKERINDAG	
		8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan daerah provinsi	0 -----x 100% 76	0 %	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	1 -----x 100% 76	1,315%	DISKOP NAKERINDAG	
		10.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1 -----x 100% 76	1,315%	DISKOP NAKERINDAG	
		11.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5 -----x 100% 76	6,57%	DISKOP NAKERINDAG	
		12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	76 -----x 100% 76	100 %	DISKOP NAKERINDAG	
		13.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3 -----x 100% 76	3,94 %	DISKOP NAKERINDAG	
		14.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	197 -----x 100% 4.947	3,94%	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		15.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	29.016 -----x 100% 29.016	100 %	DISKOP NAKERINDAG	
		16.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	150 -----x 100% 29.016	0,51%	DISKOP NAKERINDAG	
		17.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	175 -----x 100% 3.756	4,65%	DISKOP NAKERINDAG	
		18.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	322 -----x 100% 4.151	7,75%	DISKOP NAKERINDAG	
		19.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	175 -----x 100% 29.016	0,60%	DISKOP NAKERINDAG	
		20.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	478 -----x 100% 29.016	1,64%	DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Penanaman Modal	1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 Perda	DISPM PTSP	
		2.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak ada	DISPM PTSP	
		3.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 Dokumen	DISPM PTSP	
		4.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 Dokumen	DISPM PTSP	
		5.	Kegiatan pameran penanaman modal	2 kegiatan	DISPM PTSP	
		6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	2 kegiatan	DISPM PTSP	
		7.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	756 orang	DISPM PTSP	
		8.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	854	DISPM PTSP	
		9.	Laporan realisasi penanaman modal	Rp 58.985.875.000	DISPM PTSP	
		10.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	40 orang	DISPM PTSP	
		11.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	446	DISPM PTSP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		12.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	6 Instansi	DISPM PTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kota	1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	40 Orang	DISDIKPORA	
		2.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	DISDIKPORA	
		3.	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	60 Orang	DISDIKPORA	
		4.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	111	DISDIKPORA	
		5.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	14 Orang	DISDIKPORA	
		6.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	10	DISDIKPORA	
20	Statistik	1.	Tersedianya buku profil daerah	Tidak ada	DISKOMINFO	
		2.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	9	DISKOMINFO	
		3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	DISKOMINFO	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		4.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	9		DISKOMINFO	
		5.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Tidak ada		DISKOMINFO	
		6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	9 -----x 100% 10	90 %	DISKOMINFO	
		7.	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOMINFO	
21	Persandian	1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOMINFO	
		2.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOMINFO	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOMINFO	
		4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOMINFO	
22	Kebudayaan	1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	2 objek		DISBUDPAR	
		2.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	2 objek		DISBUDPAR	
		3.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2 objek		DISBUDPAR	
		4.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	41 Orang		DISBUDPAR	
		5.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	16 Benda/ Situs		DISBUDPAR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6.	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	20 Benda/ Situs	DISBUDPAR	
		7.	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	DISBUDPAR	
		8.	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	DISBUDPAR	
		9.	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	142 Objek	DISBUDPAR	
		10.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	631 Koleksi	DISBUDPAR	
		11.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	500 Orang	DISBUDPAR	
				20		
		12.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	DISBUDPAR	
		13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	4 Orang	DISBUDPAR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	6 Orang		DISBUDPAR	
		15.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	6 Orang		DISBUDPAR	
		16.	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0 Orang		DISBUDPAR	
		17.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0 Orang		DISBUDPAR	
		18.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1 Unit		DISBUDPAR	
		19.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0 Kegiatan		DISBUDPAR	
23	Perpustakaan	1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	383.457 -----x 100% 149.875	255,85 %	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		2.	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	13.872 -----x 100% 149.875	9,25 %	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	684 -----x 100% 149.875	0,45 %	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0 -----x 100% 0	0 %	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	0		BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		6.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi /dialih media (digitalisasi)/ terdapat yang ada diwilayahnya	0		BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		7.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		8.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	60		BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
24	Kearsipan	1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	4.039 -----x 100% 4.039	100 %	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	280 -----x 100% 280	100 %	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	230 -----x 100% 230	100 %	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	110 -----x 100% 110	100 %	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		6.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SETDAKAB. SAMOSIR	
		7.	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten	3	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		8.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	0	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		9.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0		BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		10.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	0		BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
25	Perikanan	1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1.444		DISKPP	
		2.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0 -----x 100% 6	0 %	DISKPP	
		3.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0		DISKPP	
		4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	12		DISKPP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	233.972		DISKPP	
26	Pariwisata	1.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	24 Destinasi		DISBUDPAR	
		2.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	206 Unit		DISBUDPAR	
		3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten/kota	732		DISBUDPAR	
		4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	15.705		DISBUDPAR	
		5.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	25		DISBUDPAR	
		6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0		DISBUDPAR	
		7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	6		DISBUDPAR	
		8.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0 -----x 100% 0	0 %	DISBUDPAR	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	280 -----x 100% 280	100 %	DISBUDPAR	
		10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	61 Desa Wisata		DISBUDPAR	
27	Pertanian	1.	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	12		DISKPP	
		2.	Prasaran pertanian yang digunakan	8		DISKPP	
		3.	Penerbitan izin usaha pertanian	0		DISKPP	
		4.	Persentase prasarana yang digunakan	8 -----x 100% 8	100 %	DISKPP	
		5.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	12 -----x 100% 12	100 %	DISKPP	
		6.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	180 -----x 100% 180	100 %	DISKPP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
29	Energy dan Sumber Daya Mineral	1.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Tidak Ada		Bagian Pemerintahan	
30	Perdagangan	1.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0 a. ---- x100% 0 3 b. ---- x100% 3	0 % 100 %	DISPMPTSP	
		2.	Persentase penerbitan TDG	1 -----x 100% 1	100 %	DISPMPTSP	
		3.	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	1 -----x 100% 6	16,67%	DISPMPTSP	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		4.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	2 ----x100% 2 1 ---- x100% 6 0 ---- x100% 0	100 % 16,67 % 0 %	DISPM PTSP	
		5.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		6.	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
		7.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 %		DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		8.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0		DISKOP NAKERINDAG	
		9.	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	15.043,66 -----x 100% 25.398,47 x 28.220,52	0,002%	DISKPP	
		10.	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	438 -----x 100% 1.059	41 %	DISKOP NAKERINDAG	
		11.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0 -----x 100% 0	0 %	DISKOP NAKERINDAG	
31	Perindustrian	1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	2 -----x 100% 2	100 %	DISPMPPTSP , DISKOPNAKE R	
		2.	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0		DISKOP NAKERINDAG	

NO	URUSAN	No	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		3.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	2 -----x 100% 2	100 %	DISPMPPTSP	
		4.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0 -----x 100% 0	0 %	DISPMPPTSP , DISKOPNAKE R	
		5.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten	2 -----x 100% 236	0,84%	DISKOP NAKERINDAG	

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Samosir selama periode lima tahun ke depan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026, telah ditetapkan tolak ukur beserta dengan target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Potret kinerja daerah tahun ketiga Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026 yang tercermin dari 11 sasaran strategis dan 14 Indikator Kinerja dan beberapa pencapaian pembangunan terangkum dalam pencapaian sasaran berdasarkan evaluasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Samosir, digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	90,01 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	75,01 ≤ 90%	Tinggi
3.	65,01 ≤ 75%	Sedang
4.	50,01 ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

2.3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah

Secara umum Pemerintah Kabupaten Samosir telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Samosir Tahun 2024 sebagai berikut.

Capaian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih							
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	70,25	68,80	97,93%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	87,82	87,90	100,1%	Sangat Tinggi
Misi 2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas							
4	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	4	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	9,61%	5,54%	57,64%	Rendah
		5	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	11,08%	22,79%	205,66 %	Sangat Tinggi
		6	Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of Money</i>)	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	100%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	7	Persentase Peningkatan Omzet UMKM	3,5%	3,57%	102%	Sangat Tinggi
		8	Persentase Tenaga Kerja pada UMKM	94%	94%	100%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	72	70,93	98,51%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya kualitas dan	10	Persentase	65%	65,40%	100,62	Sangat

	kuantitas infrastruktur		Kelayakan Infrastruktur			%	Tinggi
Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Sumber Daya Manusia yang berkepribadian dan berbudaya							
8	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	11	HLS (Harapan Lama Sekolah)	13,52 Tahun	13,52	100%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	12	UHH (Umur Harapan Hidup)	72,25 Tahun	74,35	102,90 %	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	13	Pengeluaran perkapita	Rp 9.160.000	Rp 9.634.000	105,17 %	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	14	Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan	25,86%	27,93%	108%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran 14 indikator kinerja Bupati Samosir tahun 2024 di atas, disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 92,86% dalam kriteria Sangat Tinggi yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian 100% dan ada 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran mencapai lebih dari 100%. Sedangkan ada 1 (satu) indikator kinerja atau sebanyak 7,14% masuk dalam kategori rendah.

2.3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TAHUN 2024			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih							
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	69,87	70,25	68,80	97,93%

2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan public	3	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85,93	86,4	87,90	100,1%
Misi 2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas							
4	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	4	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	9,11%	9,61%	5,54%	57,64%
		5	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	10,58%	11,08%	22,79%	205,66%
		6	Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of Money</i>)	Rp 1.567.164	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	100%
5	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	7	Persentase Peningkatan Omzet UMKM	3,48%	3,5%	3,57%	102%
		8	Persentase Tenaga Kerja pada UMKM	93,33 %	94%	94%	100%
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	71,86	72	70,93	98,51%
7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	10	Persentase Kelayakan Infrastruktur	64,46 %	65%	65,40%	100,62%
Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Sumber Daya Manusia yang berkepribadian dan berbudaya							
8	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	11	HLS (Harapan Lama Sekolah)	13,51 Tahun	13,52 Tahun	13,52 Tahun	100%
9	Meningkatnya kualitas kesehatan	12	UHH (Umur Harapan Hidup)	72,24 Tahun	72,25 Tahun	74,35 Tahun	102,90%

	masyarakat						
10	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	13	Pengeluaran perkapita	Rp 9.158.000	Rp 9.160.000	Rp 9.634.000	105,17%
11	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	14	Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan	25,36%	25,86%	27,93%	108%

2.3.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir RPJMD

Adapun capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024		TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
				TARGET	REALISASI		
Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih							
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	1	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	70,25	68,80	80,10	85,89%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	87,82	87,90	92,5	95,02%
Misi 2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas							
4	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	4	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	9,61%	5,54%	8,6%	64,42%
		5	Kontribusi PAD sektor	11,08%	22,79%	12,11%	188,19

			pariwisata terhadap total PAD				%
		6	Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of Money</i>)	Rp 1.600.000	Rp 1.600.00	Rp 1.800.000	88,88%
5	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	7	Persentase Peningkatan Omzet UMKM	3,5%	3,57%	4,1%	87,07%
		8	Persentase Tenaga Kerja pada UMKM	94%	94%	95%	98,94%
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	72	70,93	75	94,57%
7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	10	Persentase Kelayakan Infrastruktur	65%	65,40%	75,25%	86,91%
Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Sumber Daya Manusia yang berkepribadian dan berbudaya							
8	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	11	HLS (Harapan Lama Sekolah)	13,52 Tahun	13,52 Tahun	13,54 Tahun	99,85%
9	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	12	UHH (Umur Harapan Hidup)	72,25 Tahun	74,35 Tahun	72,01 Tahun	103,24 %
10	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	13	Pengeluaran perkapita	Rp 9.160.000	Rp 9.634.000	Rp 9.335.500	103,19 %
11	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	14	Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan	25,86%	27,93%	22,3%	125,24 %

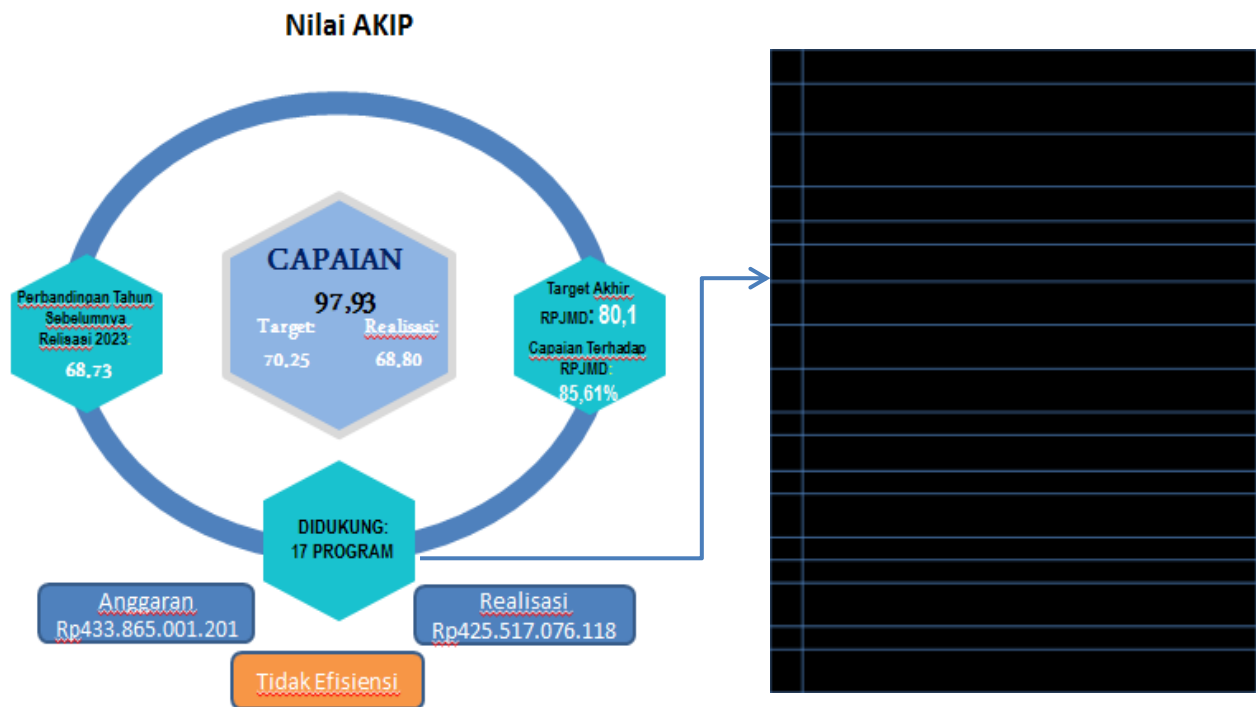
2.3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sasaran ke - 1

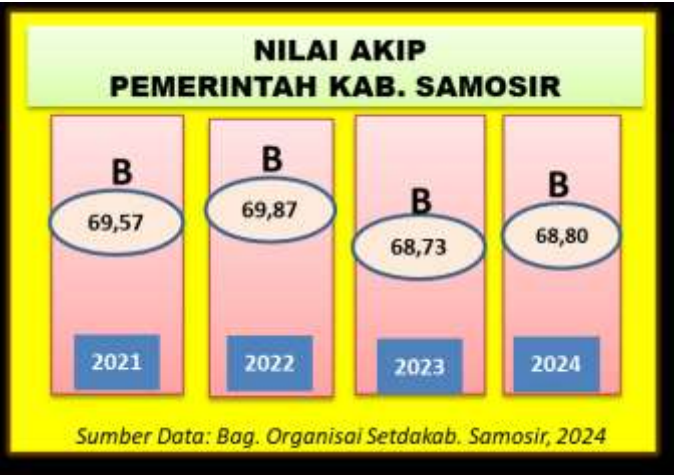
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilaksanakan atas semua kegiatan utama Pemda yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Pemda.

Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemda sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.



Pemerintah Kabupaten Samosir tahun 2024 memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 68,80 (B). Nilai tersebut menunjukkan bahwa implementasi kinerja “baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. AKIP Kabupaten Samosir mengalami peningkatan dari 68,73 menjadi 68,80 dari target 70,25 dengan capaian kinerja sebesar 97,93% (sangat tinggi).



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai tools untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, defenisi kinerja harus jelas termasuk didalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang

kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin meningkat yang ditandai dengan: Perencanaan pembangunan semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu, dan akuntabel, penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan, belanja aparatur yang semakin proporsional; belanja publik yang semakin dominan; dan dan perumusan kebijakan publik semakin responsif.

Rincian hasil evaluasi komponen penilaian AKIP Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	23,58	23,65
2	Pengukuran Kinerja	30	15,93	15,93
3	Pelaporan Kinerja	15	10,77	10,77
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,45	18,45
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,73	68,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	

Sejumlah upaya yang dilakukan Pemkab Samosir untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yaitu:

1. Melakukan pendampingan dan reviu Dokumen Perencanaan (Renstra, RENJA OPD) untuk memastikan Sasaran Strategis sudah berorientasi outcome dan memasitikan Indikator Kinerja sudah SMART.
2. Mereviu dan perbaikan dokumen pohon kinerja di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
3. Memastikan seluruh Program dan kegiatan dalam Renstra dan Renja OPD selaras dengan hasil Reviu Casading Kinerja.
4. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Aksi seluruh Perangkat Daerah
5. Melakukan pendampingan penyusunan IKU Perangkat Daerah.
6. Melakukan pendampingan dan asistensi laporan kinerja seluruh perangkat daerah.

Permasalahan yang ditemukan dalam peningkatan Nilai SAKIP di Kabupaten Samosir adalah:

1. Penjenjangan Kinerja pada beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya menjawab hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah yang dihadapi.
2. Hasil review Renstra Perangkat Daerah memperlihatkan bahwa Renstra belum sepenuhnya mengacu p ada RPJMD, yang berakibat sasaran strategis Kepala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam RKT dan PK tidak menjawab sasaran

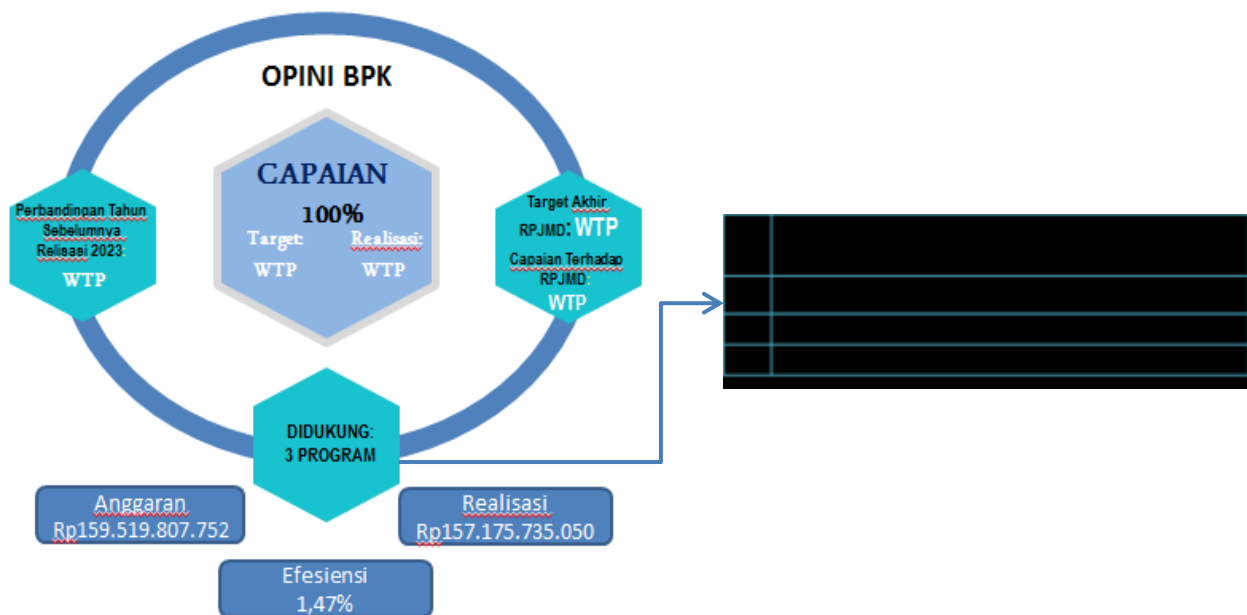
strategis RPJMD.

3. Identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya crosscutting antar Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja organisasi masih kurang berdampak.
4. Mindset yang berpegang pada penyerapan anggaran tanpa memperhatikan capaian kinerja.

Sasaran ke - 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah

Opini Pemeriksaan BPK menjadi indikator dari Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemda. Pada tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Nomor 114b/S/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Opini WTP merupakan indikator kinerja Kepala Daerah dalam kualitas tata kelola keuangan daerah. Dalam rangka mewujudkan good governance pada penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan menurut prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan di daerah. Salah satu prestasi yang



telah diraih oleh Kabupaten Samosir yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) untuk ke – 7 (tujuh) kalinya pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diterbitkan oleh BPK jika laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji secara material.

Upaya untuk mendapatkan opini tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu adanya komitmen yang kuat untuk memperbaiki kinerja keuangan mulai dari kepala daerah sampai pada tingkat jabatan pelaksana. Sehingga terjadi sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pelaksanaannya di SKPD se Kabupaten Samosir.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah juga telah memenuhi karakteristik kualitatif, memenuhi prinsip tepat waktu, ketepatan penyajian, kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian intern serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, beberapa upaya yang dilakukan untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih antara lain:

1. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah;
2. Menyusun laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan sesuai prinsip yang berlaku;
3. Menerapkan pengendalian internal yang kuat;
4. Menyediakan regulasi pengelolaan keuangan, asset, dan pendapatan secara memadai;
5. Melakukan pembahasan rapat *road to retain* WTP secara berkala.

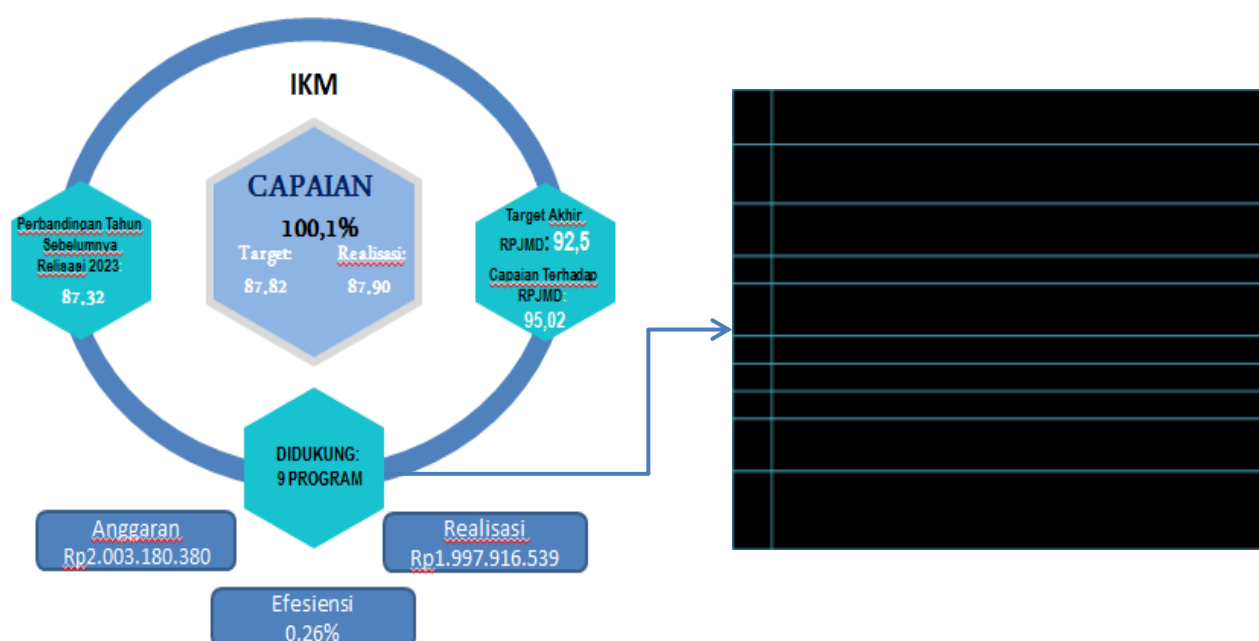
Meskipun Opini BPK telah sesuai target, namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi masing masing stakeholder yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
2. Proses pelaporan aset dan penyusutan memerlukan waktu yang lama.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Berkembangnya pemikiran di masyarakat yang menganalogikan pelayanan publik adalah semacam rangkaian atau peristiwa mulai dari manusia itu lahir sampai pada batas umur kematiannya itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap pada Pemda agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, optimal, dan berkualitas.

Proses pembangunan pelayanan publik sangat ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya dengan kebijakan. Berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan pelayanan publik, salah satunya dengan pelaksanaan Bunga Desa (Bupati/Wakil Bupati Ngantor di Desa). Melalui program ini, Pemda dapat langsung mendekatkan diri dengan masyarakat pedesaan. Memberikan pelayanan langsung sekaligus berinteraksi dengan masyarakat, berdiskusi, serta melihat realitas kehidupan masyarakat desa yang menjadi bahan data dan informasi didalam pertimbangan dan pengambilan kebijakan strategis. Dalam Bunga Desa sekaligus dilaksanakan pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, pertanian, sosial, dan pendidikan.



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase OPD dengan nilai IKM “Baik” mencapai 100%. Artinya seluruh OPD Pelayanan Publik telah melaksanakan Pelayanan Publik kepada masyarakat dengan kategori baik dan memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.

Data hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat secara lengkap yang disusun sesuai peringkat, adalah sebagai berikut:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan	IKM Unit Pelayanan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	Sangat Baik	92,22
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	B	Baik	90,25
3	Dinas Pelayanan Modal Satu Pintu	B	Baik	88,46
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	Baik	88,14
5	Dinas Kesehatan	B	Baik	87,02
6	RSUD dr. Hadrianus Sinaga	B	Baik	81,92
Rata-rata		B	Baik	87,90

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas.
2. Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, pengembangan sistem informasi pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik.
3. Budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat dengan baik.
4. Semua Inovasi diupayakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir atau paling rendah ditetapkan dengan Peraturan Kepala OPD.

Sasaran ke - 5
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

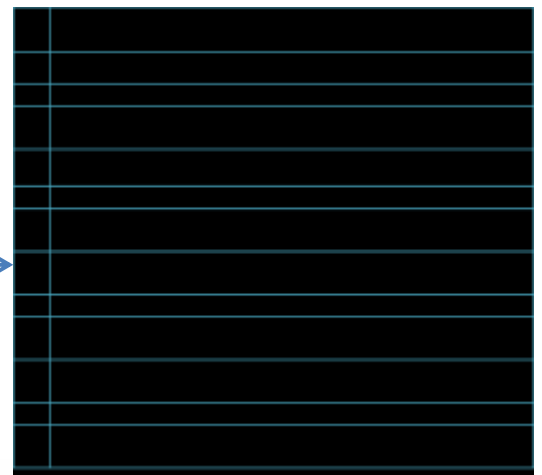
Perekonomian Kabupaten Samosir pada tahun 2024 terus mengalami tren positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir yang di ukur dari Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Samosir berdasarkan harga berlaku pada tahun 2024 sebesar 6.100,41 miliar rupiah, sedangkan nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2023 sebesar 3.644,15 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 5,02%. Laju pertumbuhan berdasarkan harga konstan tahun 2010 merupakan ukuran laju pertumbuhan ekonomi, artinya perekonomian Kabupaten Samosir mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen. Pembentukan PDRB berdasarkan harga berlaku Kabupaten Samosir tahun 2024 masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai mencapai 3.049,00 miliar rupiah (49,98%) diikuti dengan kategori Perdagangan Besar, Perdagangan Eceran; Bengkel Mobil dan Sepeda Motor sebesar 765,51 miliar rupiah (12,55 persen), kategori Konstruksi 743,63 miliar rupiah (12,19 persen), dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 580,95 miliar rupiah (9,52 persen). Berdasarkan jenis pengeluaran, pembentukan PDRB berdasarkan harga berlaku kabupaten Samosir tahun 2024 didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3.719,16 miliar rupiah (60,97 persen), diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1.102,37 miliar rupiah (18,07 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 909,52 miliar rupiah (14,91 persen).

Pertanian dan Pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Samosir. Sektor ini menjadi sektor yang sangat strategis di Kabupaten Samosir. Selain sebagai lokomotif

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Samosir (miliar rupiah), 2020–2024



➤ **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**



PDRB Sektor Pertanian atas Dasar Harga Berlaku

Tahun	PDRB Sektor Pertanian (Rp)
2020	2310,91
2021	2425,33
2022	2647,62
2023	2888,84
2024	3049,00

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Ketahanan Pangan dan



Pertanian telah meluncurkan Pangula Nature dengan Motto “Bertani Selaras Alam” dengan berbagai terobosan, membina dan mendampingi petani dalam pembuatan dan pemakaian pupuk dan pestisida organik, pengaturan pola tanam serentak dengan kajian ilmiah dan kearifan lokal, pembuatan dan penggunaan pakan organik, pembentukan

kelompok tani peduli api. Hal ini bertujuan mengurangi ketergantungan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk kimia yaitu antara lain penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Ketahanan Pangan dan untuk mendukung pencapaian target sebagai berikut :

1. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.
2. Ketersediaan data-data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan.
3. Penyaluran bantuan bibit, alsintan dan sarprodi yang sesuai dan tepat sasaran



berdasarkan potensi wilayah.

4. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan pendampingan petani yang intensif.
5. Penanganan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) yang tepat sasaran.

Strategi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir dalam rangka mencapai peningkatan PDRB sektor pertanian selama tahun 2024 adalah:

1. Gerakan tanam serentak padi gogo.
2. Kampung bawang merah Samosir.

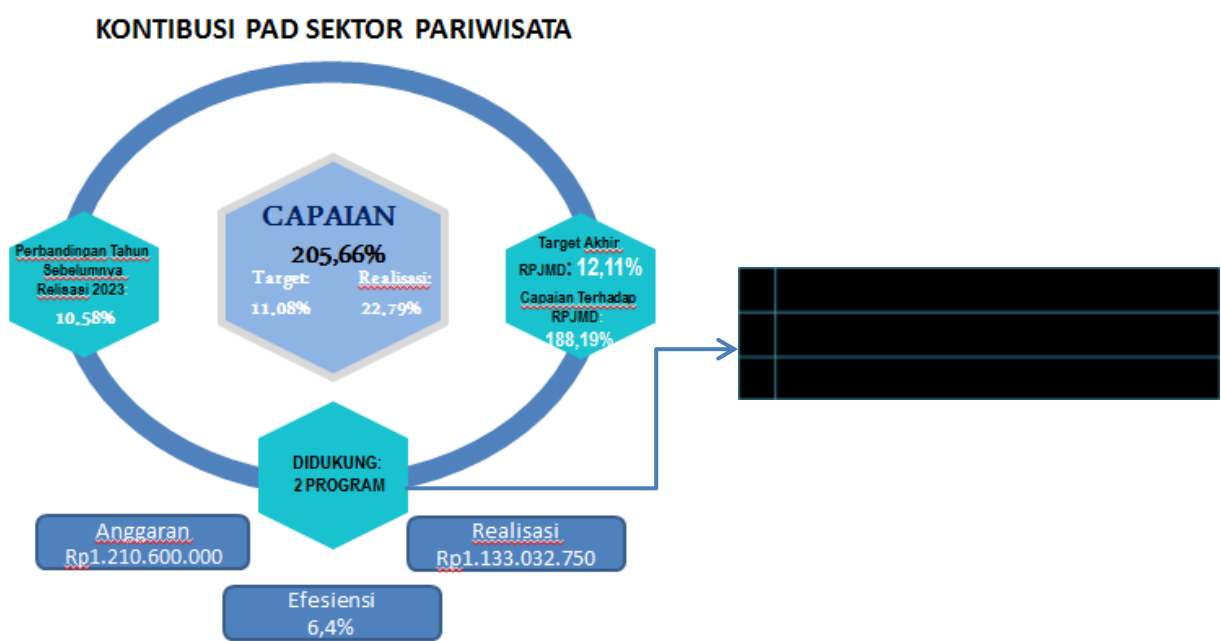
➤ **Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD**

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana kenaikan output perkapita disuatu negara dalam jangka panjang. Dalam konteks kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pariwisata dan sebaliknya. Dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah diperoleh dari beberapa sektor ekonomi, termasuk salah satu sektor yang dalam 2 dekade terakhir ini menjadi andalan (leading sector) yakni pariwisata. Bahkan jika berkaca pada perkembangan sektor pariwisata dunia, pariwisata telah berkembang menjadi salah satu industri yang paling potensial dan menjadi industri terbesar di dunia, hal ini dapat diketahui dari data perkembangan jumlah kunjungan turis dan pendapatan yang diperoleh dari turis internasional khususnya di Indonesia. Pengaruh sektor pariwisata pada pendapatan Produk Domestik Bruto (PDRB) terlihat dari kontribusi penerimaan, jasa pariwisata dan sektor pendukungnya.

Pariwisata telah menjadi konsentrasi dan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Samosir, dimana sejak Kabupaten Samosir berdiri tahun 2003, pemerintah Kabupaten Samosir telah menjadikan pariwisata sebagai program unggulan pembangunan ekonomi. Hal ini sangat wajar karena pariwisata terbukti telah berkontribusi besar dalam pembangunan Kabupaten Samosir khususnya sebagai salah satu sektor pendapatan daerah. Selain sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga mampu mengurangi angka pengangguran.

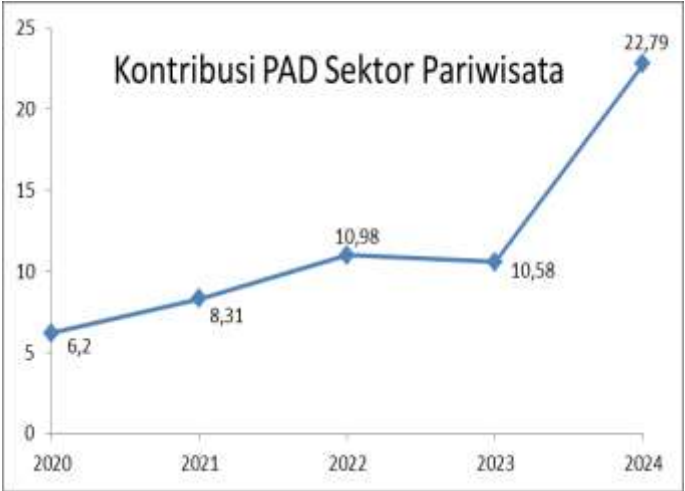
Pariwisata sebagai komoditas andalan sekaligus komoditas strategis dan primadona di Kabupaten Samosir, ini disebabkan karena Kabupaten Samosir memiliki keindahan alam yang luar biasa dan mempunyai peninggalan sejarah/situs dengan keragaman budaya (peninggalan budaya/situs dan legenda), wisata air/rekreasi/pantai

dan wisata rohani/religi. Objek-objek wisata ini menyebar di 9 (sembilan) kecamatan, dan Samosir juga merupakan tanah leluhur/asal-muasal bagi seluruh ethnias Batak se-dunia.



Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap total PAD terealisasi sebesar 22,79% dengan capaian kinerja sebesar 205,66%. PAD Sektor pariwisata tahun 2024 terealisasi sebesar Rp20.331.672.238 dari Total PAD sebesar Rp89.319.964.884,07. Terjadi peningkatan sebesar Rp 12.966.663.457 dari tahun 2023.

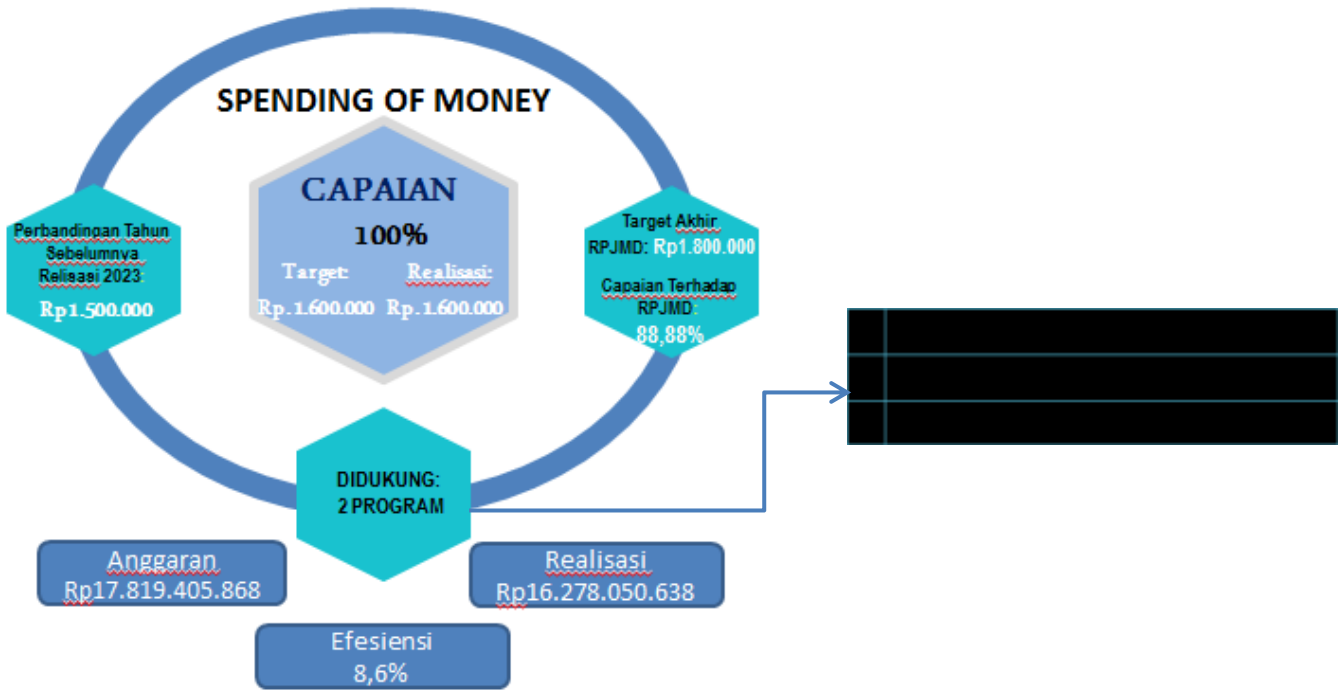
Berbagai inovasi telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam peningkatan Pariwisata untuk menarik wisatawan nusantara dan mancanegara. Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir seperti meluncurkan Visit Samosir Year, yang bekerja sama dengan para pelaku pariwisata. Promosi dilakukan dengan banyak cara,



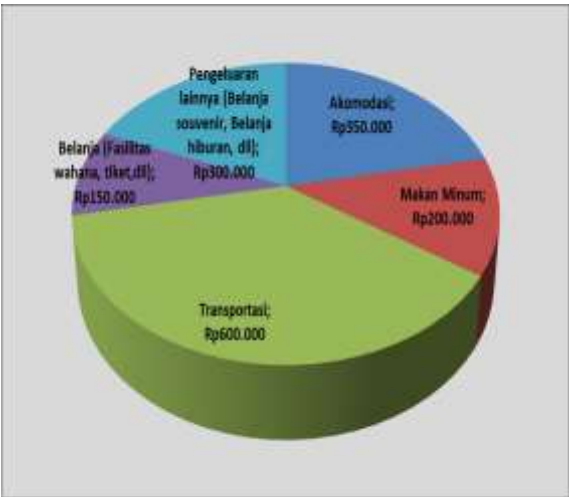
memanfaatkan *billboard* di pusat-pusat kota besar, termasuk *inflight magazine*, melalui media sosial dan media massa. Sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Samosir telah memiliki kalender pariwisata. Pememerintah Kabupaten Samosir juga menyiapkan berbagai *event* pariwisata seperti *Horas Samosir Fiesta*, *Cheerful Tourist Got Talent*, *Gondang Naposo* dan *Bataks Opera*, dan lain-lain.



➤ **Pengeluaran Wisatawan (Spending of Money)**



Pengeluaran pariwisata didefinisikan sebagai pengeluaran pengunjung termasuk pembayaran untuk transportasi, barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi pengunjung (*Visitor Consumption Expenditure*) adalah komponen dasar dari total permintaan pariwisata. Pengeluaran pengunjung didefinisikan sebagai total pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh pengunjung atau atas



nama pengunjung untuk dan selama perjalanannya dan tinggal di tempat tujuan. Pola pengeluaran adalah gambaran umum seluruh pengeluaran wisatawan selama wisata. Pengeluaran wisatawan adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan.

Dari berbagai pola pengeluaran wisatawan, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan yang menjadi aspek pengeluaran wisatawan adalah akomodasi, makan minum, transportasi selama kunjungan, belanja(fasilitas, wahana, tiket, dll), dan pengeluaran lainnya (souvenir).

Jumlah pengunjung wisatawan ke Kabupaten Samosir pada tahun 2024 sebanyak 1.777.321 pengunjung yang terdiri dari 1.761.427 wisatawan nusantara dan 15.705 wisatawan manca negara. Berdasarkan survei yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan Pariwisata, untuk rata-rata spending money wisatawan mencapai Rp1,6 juta per kunjungan. Dari data tersebut diperkirakan ada sekitar Rp2,84 triliun spending money atau belanja para wisatawan selama tahun 2024. Spending money para wisatawan tersebut digunakan untuk 21,88% biaya akomodasi, 12,5% kebutuhan makan dan minum, 37,5% untuk transportasi, 9,38% untuk belanja dan 18,75% untuk pengeluaran lainnya. Rata-rata lama tinggal para wisatawan yang berkunjung ke Samosir adalah selama 1,4 hari.



Sasaran ke – 6

Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah

Dewasa ini, Perkembangan UMKM jumlahnya telah meningkat pesat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

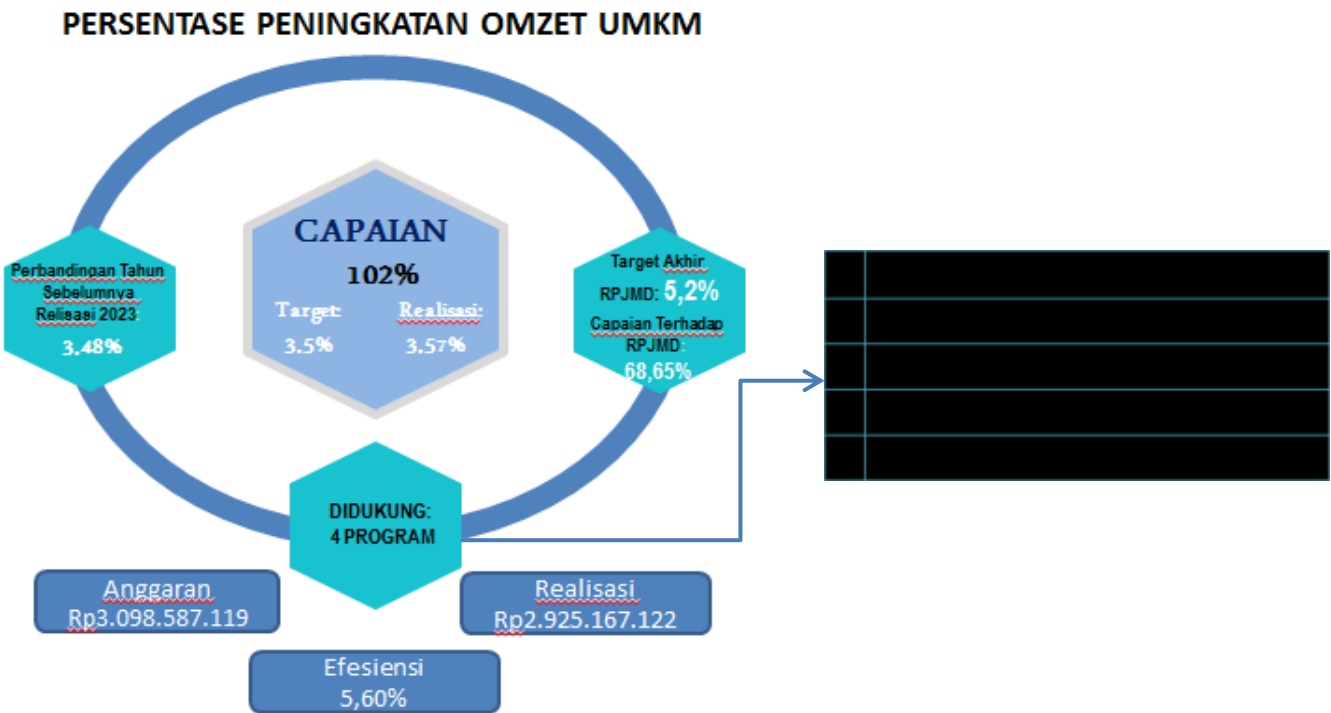
Dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Daerah yaitu melaksanakan pembangunan ekonomi secara merata untuk semua daerah maka pembangunan di wilayah pedesaan menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah. Oleh sebab itu, realita perkembangan UMKM masih sangat sulit diterapkan khususnya di wilayah pedesaan di Kabupaten Samosir.

Penduduk Samosir dengan keterbatasan pengetahuan, hidup dalam kegiatan usaha kecil di sektor tradisional, infrastruktur dan akses pemerintahan yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kelompok wirausahawan desa (*Entrepreneurs Village*) melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang efektif memudahkan masyarakat untuk siap bersaing dalam pasar global.

Kabupaten Samosir sebagai tempat tujuan wisata, terus bergerak dengan berbagai program yang dirancang untuk memajukan UMKM. Dalam artian pemasarannya bukan hanya dalam negeri, melainkan harus bisa menembus mancanegara, agar perekonomian makin berputar kencang.

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya peran UMKM dalam Perekonomian Daerah adalah Persentase Jumlah Usaha Kecil dan Menengah terhadap Total UMKM.

➤ **Persentase Peningkatan Omzet UMKM**



Pemerintah Kabupaten Samosir terus bergerak dengan berbagai program yang dirancang khususnya dalam upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Samosir. Selain mengandalkan wisata alam dan budaya, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga terus didorong maju untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Mengingat juga potensi UMKM dapat bertahan disegala perkembangan ekonomi, membantu penyerapan tenaga kerja.



Berbagai upaya dilakukan pemda untuk memajukan UMKM agar naik kelas. Dalam artian pemasarannya bukan hanya dalam negeri, melainkan harus bisa menembus mancanegara, sehingga berdampak besar bagi peningkatan omzet UMKM di Kabupaten Samosir dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan perekonomian. Upaya kemudahan perizinan bagi pelaku usaha dengan penerbitan NIB memberikan dampak bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses modal usaha melalui perbankan. Dengan adanya legalitas usaha juga memudahkan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyalurkan bantuan serta dapat mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemkab Samosir, baik melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dan UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Samosir.

Perkembangan omzet UMKM di Kabupaten Samosir tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,57%, dimana data omzet tahun 2024 sebesar Rp. 7.427.292.500,00 sedangkan pada pada tahun 2023 sebesar Rp. 7.171.297.100,00. Adapun peningkatan ini harus dapat dipertahankan dan bahkan harus dapat ditingkatkan oleh para pelaku UMKM.

Tabel data perkembangan omzet UMKM Tahun 2023 – 2024 menurut kecamatan:

No	Kecamatan	Jumlah UMKM (usaha)	Omzet 2023 (Rp)	Omzet 2024 (Rp)	%
1	Kecamatan Pangururan	9.378	1.452.120.000	1.523.543.900	4,92%
2	Kecamatan Simanindo	6.359	1.294.321.000	1.340.085.000	3,54%
3	Kecamatan Palipi	2.826	920.467.100	942.467.100	2,39%
4	Kecamatan Nainggolan	1.843	984.566.000	1.004.566.000	2,03%

5	Kecamatan Onan Runggu	1.296	524.440.000	534.440.000	1,91%
6	Kecamatan Ronggur Nihuta	1.060	412.000.000	422.000.000	2,43%
7	Kecamatan Sianjur Mula-mula	2.650	422.941.000	437.941.000	3,55%
8	Kecamatan Harian	2.231	642.442.000	692.249.500	7,75%
9	Kecamatan Sitio-Tio	1.546	518.000.000	530.000.000	2,32%
JUMLAH		29.189	7.171.297.100	7.427.292.500	3,57%

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Samosir melalui berbagai program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan pelaku usaha telah berpengaruh besar bagi perkembangan UMKM di Kabupaten Samosir. Berbagai kemudahan – kemudahan antara lain kemudahan perolehan modal melalui KUR, pelatihan kewirausahaan dan standarisasi produk, pelatihan digitalisasi pemasaran dan lain sebagainya.

1. Peningkatan Kualitas Produk



Perkembangan teknologi yang pesat, menyebabkan suatu produk harus selalu memiliki inovasi serta kreatifitas yang baru. Tidak harus dengan meluncurkan produk baru. Dengan memodifikasi produk yang sudah ada dapat dijadikan sebagai alternatif bagi pelaku UMKM. Modifikasi yang dimaksud bisa saja dengan menambahkan sebuah fitur baru dari suatu produk tersebut, perubahan yang dilakukan tidak harus signifikan berbeda, dengan penambahan atau perubahan kecil yang memberikan poin plus kepada produk itu juga dapat dilakukan.

Menjaga kualitas produk adalah kewajiban yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Karena dengan kualitas produk yang baik, maka produk tersebut akan memiliki nilai yang tinggi serta dapat memberikan rasa kepuasan terhadap suatu produk tersebut. Dengan demikian konsumen akan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi

terhadap produk UMKM dan dapat memberikan keuntungan juga bagi pelaku usaha.

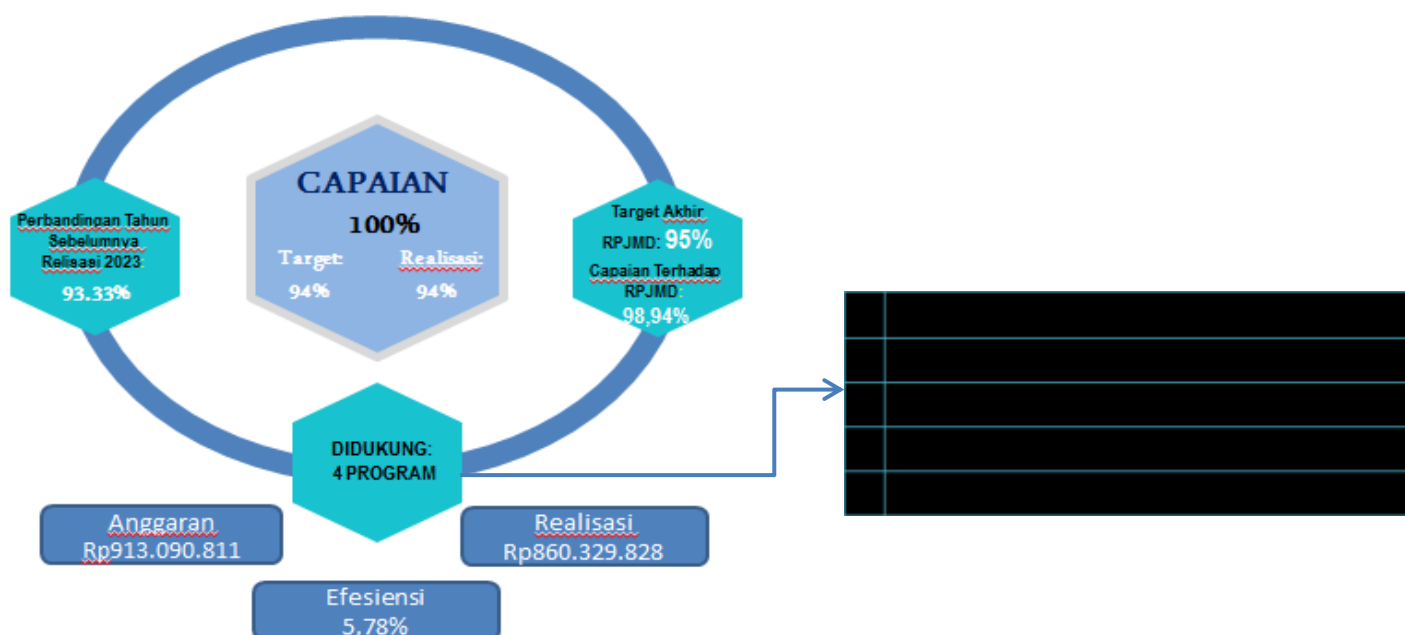
2. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

Ditengah – tengah berbagai pembinaan dan pendampingan UMKM, pemerintah Kabupaten Samosir juga hadir dalam hal mengupayakan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja dalam hal ini pelaku usaha, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan bukan Penerima Upah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan. Dan hal ini juga merupakan salah satu strategi menangani kemiskinan melalui upaya pengurangan pengeluaran beban bagi pelaku UMKM jika nantinya berhadapan dengan berbagai resiko pekerjaan.

Dengan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan bukan penerima upah ini akan terlindungi dari resiko yang dimunculkan dari usaha yang digeluti oleh para pelaku usaha. Dengan adanya jaminan sosial, keluarga dari pelaku usaha juga memiliki jaminan penghidupan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud terdaftar sebanyak 1.512 orang peserta yang berasal dari berbagai latarbelakang usaha, antara lain petani, nelayan, supir, tukang becak dan sebagainya.

➤ Persentase Tenaga Kerja pada UMKM

PERSENTASE TENAGA KERJA PADA UMKM



Daya tarik wisata Kabupaten Samosir cenderung menimbulkan arus kunjungan wisata yang besar dan seiring dengan berkembangnya lapangan usaha dan sektor industrinya. Setidaknya ada 3 lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu perdagangan, homestay dan rumah makan, dan industri jasa-jasa lainnya.

Sektor UMKM di Kabupaten Samosir yang bergerak dalam berbagai lapangan usaha mempunyai potensi dan prospek yang baik untuk selalu dikembangkan, karena diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengimbangi jumlah pengangguran yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja setiap tahun.

Peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Samosir juga sangat besar, yaitu menampung lebih dari 85.535 dari jumlah total Angkatan kerja sebanyak 86.305 atau 99,11 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ Educational Attainment ¹	Angkatan Kerja/Economically Active			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja Percentage of Working to Economically Active
	Bekerja Working	Pengangguran ² Unemployment ²	Jumlah Angkatan Kerja Total of Economically Active	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	18.636	0	18.636	100,00
1	16.214	0	16.214	100,00
2	41.385	379	41.524	99,09
3	9.540	391	9.931	96,06
Jumlah/Total	85.535	770	86.305	99,11

**TABEL DATA PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA UMKM
DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 - 2024**

NO	JENIS SEKTOR USAHA	JUMLAH PELAKU USAHA		TENAGA KERJA	
		2023	2024	2023	2024
1	SALON	248	248	528	528
2	BENGKEL	282	282	1680	1680
3	SOUVENIR	589	687	1668	1668
4	JAHIT	299	314	1416	2030
5	TENUN	1075	1087	2235	2210
6	JASA	949	1065	16180	16879
7	KULINER	2958	2963	9630	9646
8	BERDAGANG	4659	4660	18485	18488
9	WARUNG	1272	1273	3156	3158
10	BERTANI	13893	13893	15910	15910
11	NELAYAN	238	238	198	198

12	PETERNAK	535	535	1725	1725
13	INDUSTRI BATU BATA	162	162	4675	4675
14	SEKTOR USAHA LAINNYA	1782	1782	3215	3215
TOTAL		28941	29189	80701	82010

Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Samosir salah satunya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah memberikan dampak terhadap pengembangan UMKM Naik Kelas, Akan tetapi, tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi bersama oleh segenap *stakeholders* terkait antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, *branding* dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM adalah:

1. Bantuan modal usaha dengan persyaratan ringan.
2. Jaminan dalam mendapatkan kredit ringan.
3. Promosi iklan gratis, memberikan orderan gratis.
4. Dana UMKM terealisasi merata.
5. Jadi mitra pemerintah dalam pengadaan barang, dipasarkan oleh pemerintah.
6. Lebih memperhatikan sektor kecil.
7. Bantuan KURS dipermudah.

Sasaran ke - 7

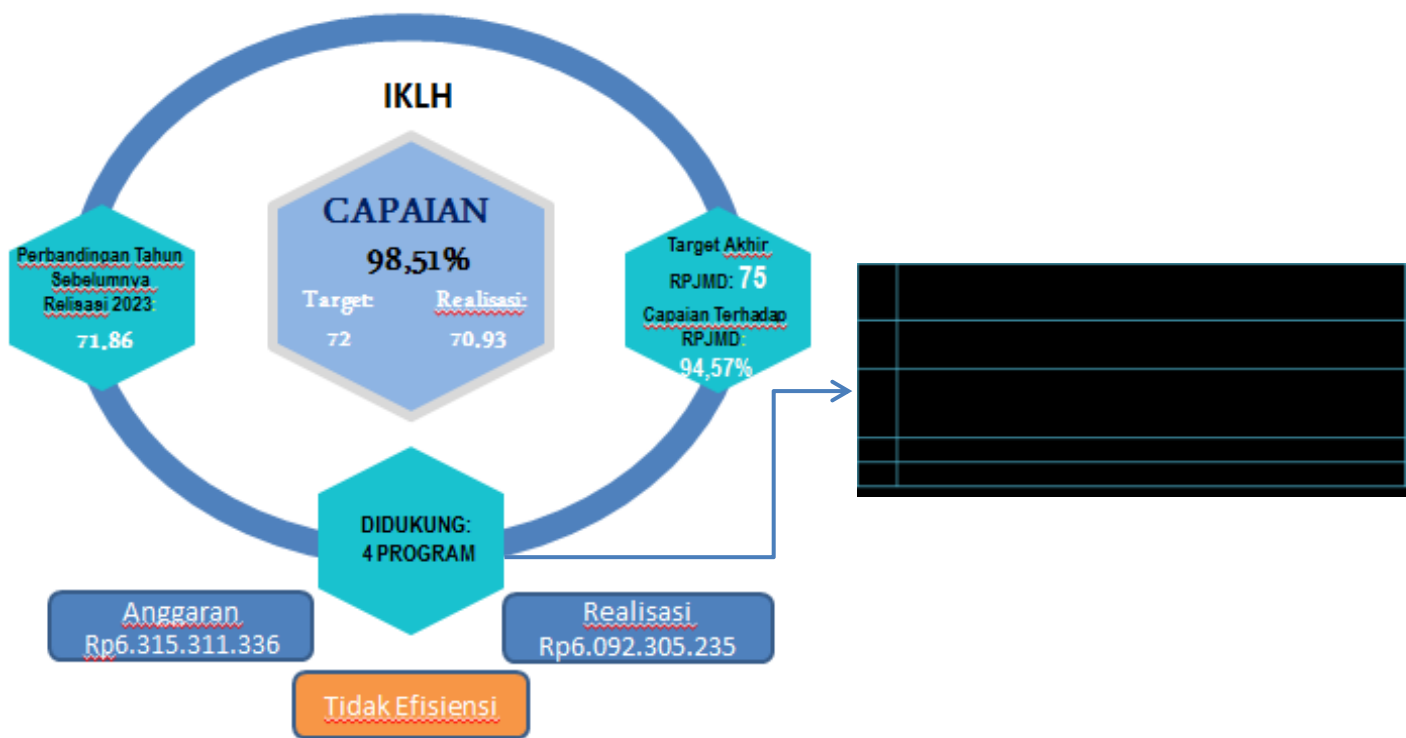
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

➤ **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu referensi dalam melihat kondisi lingkungan suatu daerah. Semakin rendah nilai IKLH dari 100, maka semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Bila IKLH Kabupaten berada di bawah Provinsi berarti kabupaten bersangkutan harus berupaya mengakselerasi dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.



Sesuai dengan Laporan IKLH tahun 2024 Kabupaten Samosir, Nilai IKA Kabupaten Samosir yaitu 53,64. Sementara nilai IKU Kabupaten Samosir 93,90 dan nilai

IKL Kabupaten Samosir adalah 58,17 sehingga Nilai IKLHD Kabupaten Samosir pada tahun 2024 yaitu 70,93 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

$$IKLH = (0.376 \times 53,64) + (0.405 \times 93,90) + (0.219 \times 58,17)$$

$$IKLH = 70,93$$

Tabel Kategori Nilai IKLH

No	Kategori	Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq X \leq 100$
2	Baik	$70 \leq X < 90$
3	Sedang	$50 \leq X < 70$
4	Kurang	$25 \leq X < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq X < 25$

Sumber : Permenlhk 27 Tahun 2021

Nilai IKLHD Kab. Samosir berada pada rentang nilai 70-90 dengan predikat (kategori) BAIK. Nilai ini menggambarkan kondisi Kabupaten Samosir perlu dilakukan kembali upaya pengelolaan lingkungan, terkhusus untuk kualitas air.

IKLH Kabupaten Samosir tahun 2024 sebesar 70,93 mengalami penurunan sedikit dari tahun 2023 yaitu 71,86. Sedangkan IKLH Provinsi Sumatera Utara 73,07 dan Nasional sebesar 73,07.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup diantaranya adalah:

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air;
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat;
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik;
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air;
6. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah;
7. Mempertahankan tutupan hutan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan;
8. Penambahan alokasi anggaran, personil dan peningkatan kapasitas staf dalam pengelolaan tutupan hutan, peningkatan RTH&pengelolaan ekosistem gambut;

9. Adanya kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan;
10. Melakukan identifikasi dan pemetaan eksisting RTH, salah satunya melalui citra satelit;
11. Pengayaan dan pemeliharaan pada tutupan hutan dan RTH;
12. Melakukan pengecekan titik koordinat RTH di pelaporan IKL dalam aplikasi IKLH;
13. Melakukan pencegahan kerusakan lahan serta kebakaran hutan dan lahan;
14. Menetapkan target IKEG (Indeks Kualitas Ekosistem Gambut).
15. Membangun sarana prasarana persampahan dan pengelolaan limbah cair;
16. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki resiko pencemaran lingkungan;
17. Melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan di areal kawasan hutan/APL/dan sejenisnya.

Sasaran ke - 8

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk memenuhi harapan masyarakat di wilayah Kabupaten Samosir. Pemenuhan permintaan infrastruktur akan disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan bagi masyarakat setempat.

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur adalah: Persentase Kelayakan Infrastruktur

➤ Persentase Kelayakan Infrastruktur

PERSENTASE KELAYAKAN INFRASTRUKTUR



Kelayakan Infrastruktur adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah. Perlu adanya infrastruktur yang memadai dan dapat menunjang kegiatan perekonomian terutama aksesibilitas sehingga kegiatan perekonomian sehari-hari dimasyarakat dapat berjalan dengan lancar, dan tujuan yang ingin di capai dapat terpenuhi. Dengan adanya infrastruktur ini juga di harapkan mampu mempermudah segala jenis kebutuhan. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Persentase Kelayakan Infrastruktur di Kabupaten Samosir terdiri dari 4 (empat) indikator yang harus dipenuhi yaitu: Kondisi jalan dalam kondisi mantap, Luas Irigasi dalam kondisi baik, rumah layak huni dan layanan air bersih.

1. Kondisi jalan dalam kondisi mantap

Pembangunan prasarana jalan merupakan kebutuhan utama dalam mendukung aktifitas lalu lintas dan aksesibilitas menuju Kabupaten Samosir dan objek-objek wisata di Kabupaten Samosir. Sistem jaringan jalan di Kabupaten Samosir meliputi sistem jaringan primer, sekunder, lokal, dan jalan lingkungan.



Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang. Panjang jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2024 adalah 416,57 km dari 771,215 km dari panjang jalan kewenangan kabupaten Samosir sehingga didapat realisasi sebesar 54,01%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 4,8%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran dalam perbaikan jalan kabupaten pada tahun 2024.

2. Luas Irigasi dalam kondisi baik

Bangunan irigasi, yang juga dikenal sebagai saluran pengalir, berperan sebagai media untuk mengangkut air dari bangunan inti ke lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Dalam sistem irigasi, terdapat empat jenis saluran pengalir, yaitu saluran primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Semua saluran ini saling terhubung hingga tahap akhir, di mana saat mencapai kuarter, air langsung digunakan di lahan pertanian.



Pencapaian Pembangunan Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik untuk mengairi sawah pada Tahun 2024 adalah sebesar 1808 Hektar dari total Luas Daerah Irigasi Kabupaten Samosir sebesar 2.610 Hektar, sehingga diperoleh luas Irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Samosir tahun 2024 adalah sebesar 69,27%. Terjadi peningkatan sebesar 6,72 % dari tahun 2023.

3. Rumah layak huni

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.



Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah layak huni harus dimiliki oleh setiap keluarga terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terus berupaya untuk peningkatan rumah layak huni.

Pada tahun 2024, jumlah rumah layak huni di Kabupaten Samosir adalah sebesar 27.905 unit dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Samosir sebanyak 33.819, sehingga persentase rumah layak huni di Kabupaten Samosir terealisasi sebesar 82,51%. Terjadi peningkatan sebesar 0,73% dari tahun 2023.

4. Persentase layanan air bersih

Keamanan dan kualitas air sangat penting bagi perkembangan dan kesejahteraan manusia. Menyediakan akses ke air bersih adalah salah satu instrumen paling efektif dalam mempromosikan kesehatan dan mengurangi kemiskinan. Sebagai otoritas Pemerintah Kabupaten Samosir tentang kesehatan masyarakat dan kualitas air.



Persentase Layanan Air Bersih di Kabupaten Samosir terealisasi 55,84% Pengguna layanan air bersih pada tahun 2024 dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir adalah sebanyak 18.886 rumah dari jumlah total rumah 33.819 rumah tangga. Terjadi peningkatan sebesar 1,21% dari tahun 2023.

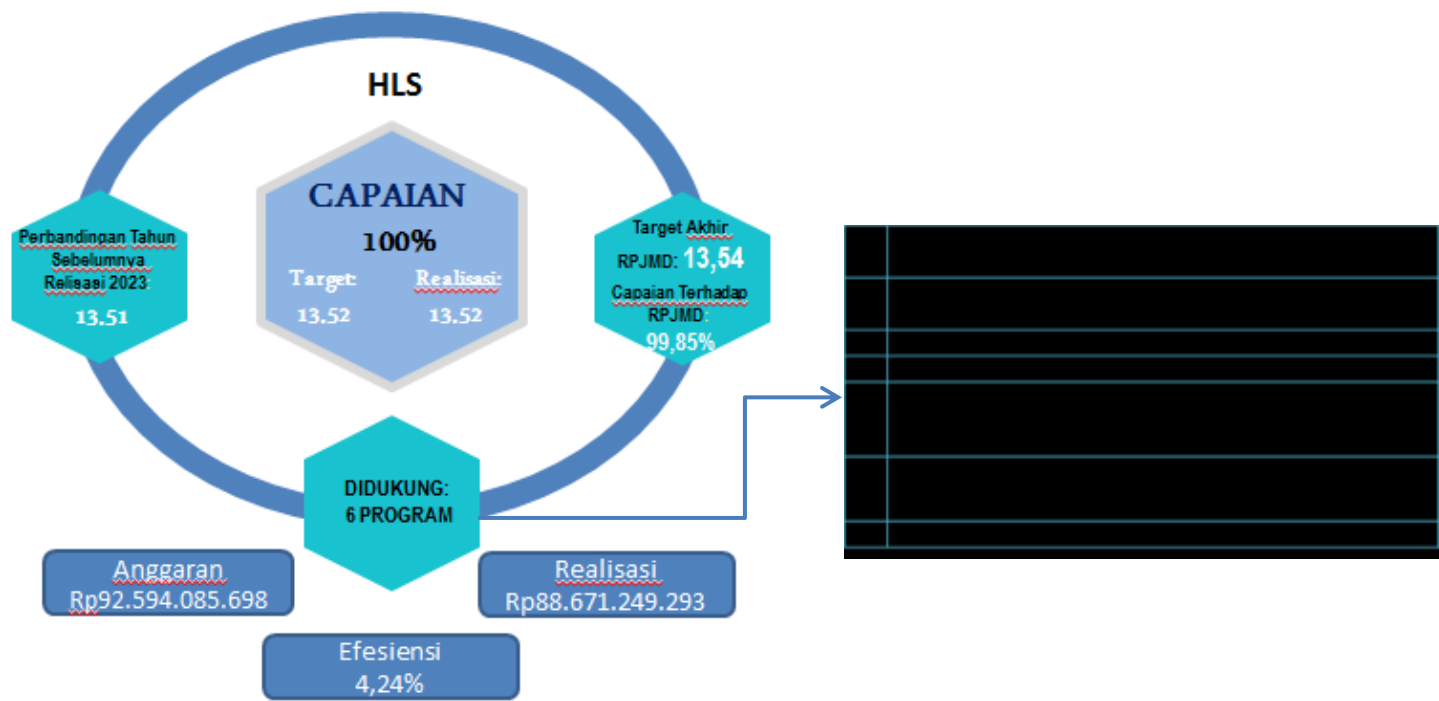
Sasaran ke – 9

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Kabupaten Samosir terus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat adalah Harapan Lama Sekolah.

Harapan Lama Sekolah (HLS)



Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Samosir pada tahun 2023 terealisasi sebesar 13,51 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Masih diatas HLS Provinsi Sumatera Utara sebesar 13,49 tahun dan HLS Nasional 13,21 tahun.



Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kabupaten Samosir pada tahun 2024 sebesar 13,52 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,52 tahun atau setara dengan Diploma II.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan HLS yakni melalui program sosialisasi pendidikan berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini berbentuk serangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi minat belajar di PAUD dan Pendidikan Dasar, peningkatan sarana prasarana satuan pendidikan, Pengaktifan PKBM, dan peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

Sasaran Strategis ke - 10

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

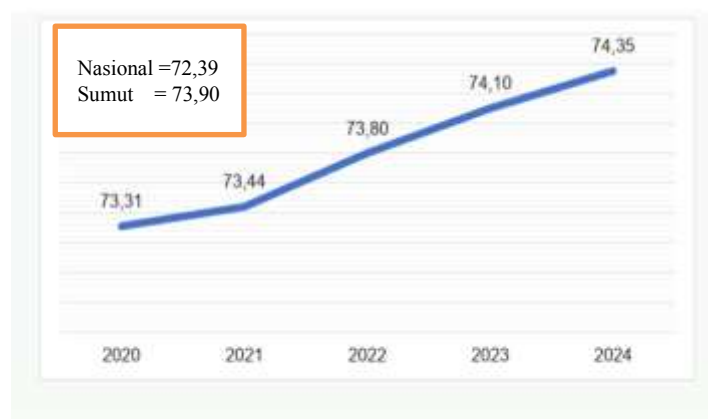
➤ Umur Harapan Hidup (UHH)



Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH Samosir telah meningkat sebesar 1,04 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,35 persen per tahun. Pada 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten

Samosir adalah 73,31 tahun, dan di 2024 mencapai 74,35 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,25 tahun (0,34 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Definisi Umur Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Angka Umur Harapan Hidup merupakan hasil pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh BPS. UHH Kabupaten Samosir terealisasi sebesar 74,35 tahun lebih tinggi dari UHH Provinsi Sumatera Utara sebesar 73,90 tahun dan UHH Nasional sebesar 72,39Tahun.



Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) (tahun), 2020–2024

Salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah secara komprehensif adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup (UHH) merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Tinggi rendahnya UHH mencerminkan tinggi rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Faktor-faktor yang memengaruhi Umur Harapan Hidup di suatu wilayah berkaitan dengan indikator derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi Umur Harapan Hidup di suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. H.L Blum menjelaskan bahwa derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan faktor genetik (keturunan).

Program PHBS di Rumah Tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. PHBS di Rumah Tangga dilakukan untuk mencapai Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat seseorang sangat berkaitan dengan peningkatan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Menurut teori HL BLUM diketahui bahwa status kesehatan individu erat kaitannya dengan perilakunya, semakin baik perilaku yang berhubungan dengan kesehatan maka status kesehatannya akan semakin baik

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir adalah:

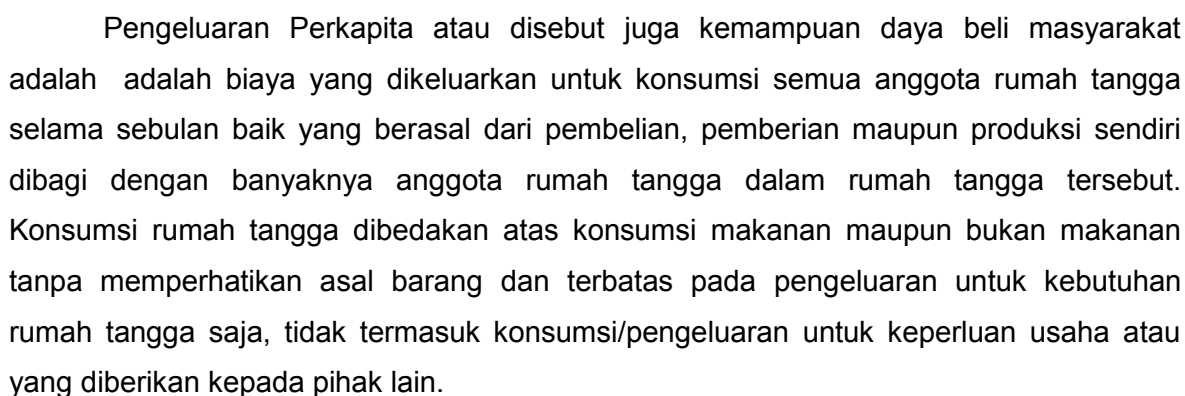
1. Kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), kesehatan reproduksi, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
4. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat.

Sasaran Strategis ke - 11

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah menumbuhkan semangat wiraswasta dalam kehidupan masyarakat, berani mengambil resiko, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menumbuhkan hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi potensial dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

- **Pengeluaran perkapita**



Nasional = 12,341
Sumut = 11,460

Tahun	Jumlah Kasus
2020	8.422
2021	8.504
2022	8.991
2023	9.158
2024	9.634

per tahun. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 476 ribu rupiah (5,20 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Samosir terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, pengeluaran per kapita di Kabupaten Samosir masih berada dibawah Capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Berbagai Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam peningkatan pengeluaran per kapita antara lain:

1. Peningkatan alokasi APBD untuk bidang ekonomi.
2. Membuka lapangan kerja melalui pengembangan UMKM.
3. Pelatihan ketrampilan dan wira usaha.
4. Fasilitasi usaha dan pembinaan UMKM.
5. Fasilitasi permodalan dengan bunga rendah bagi UMKM.
6. Integrasi kebijakan kependudukan dan kebijakan ekonomi daerah.
7. Bantuan langsung masyarakat dengan pola pemberdayaan masyarakat

Sasaran Strategis ke - 12

Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal

Kabupaten Samosir memiliki kebudayaan yang cukup unik dan beragam. Oleh karena itu, pelestarian budaya merupakan agenda prioritas yang harus dilakukan dalam rangka menjaga budaya lokal untuk mendukung kegiatan pariwisata. Pelestarian budaya lokal penting dilakukan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Samosir. Kegiatan tersebut merupakan upaya melindungi kebudayaan dari kemusnahan. Dengan pelestarian kebudayaan lokal, nilai dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang tetap dapat dipertahankan pada setiap generasi.

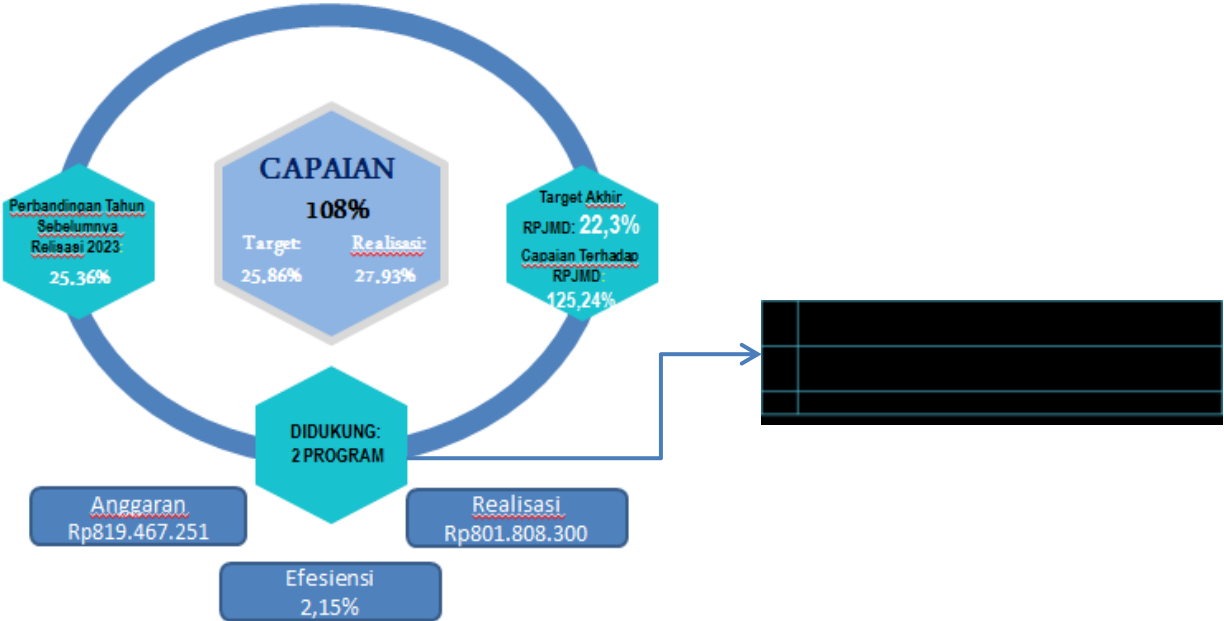
Pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya dalam pelestarian kebudayaan lokal yaitu dengan menggelar *focus group discussion* (FGD) dengan mengundang para Budayawan (Toba, Karo, Simalungun, Angkola-Mandailing, Pakpak/Dairi), Arkeolog dan Antropolog untuk membahas asal-muasal (titik nol) Peradaban Batak. Pelaksanaan FGD tersebut disepakati bahwa Gunung Pusuk Buhit yang berada di Kabupaten Samosir menjadi Titik Nol Peradaban Batak. Penetapan titik nol Peradaban Batak diharapkan memperkuat

Ideologis Peradaban Batak, mendukung pengembangan pariwisata yang berbasis ramah lingkungan dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat pada masa mendatang.

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal adalah Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan.

➤ **Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi**

PERSENTASE BUDAYA BENDA DAN TAK BENDA YANG DIAPRESIASI



Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan terealisasi sebesar 27,93% dengan capaian kinerja 108%. Perhitungan ini diperoleh dari Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda Yang Diapresiasi dibagi Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang di inventarisasi dikali 100 %

Jumlah Budaya Benda yang Diapresiasi adalah objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejumlah 117 objek (benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya) dari Jumlah Budaya Benda yang telah di inventarisasi sebanyak 426 objek.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal adalah:

1. Mengadakan kegiatan festival budaya.



2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal.
3. Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya.
4. Selalu mempertahankan budaya Batak agar tidak punah.
5. Mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal.

2.3.5 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Target kinerja sasaran yang dicapai selama tahun 2024, di dukung melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan baik program strategis yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran, maupun program/kegiatan yang bersifat pendukung. Secara umum pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian masing-masing sasaran dapat terlaksana dengan baik. Anggaran belanja tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp 979.740.001.962,-** Pada akhir tahun terealisasi sebesar **Rp 937.525.096.241,-** dengan persentase serapan sebesar **95,7%**. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sebesar 99,74%. Penyerapan anggaran terendah terjadi di Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur sebesar 87,63%. Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

NO .	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	97,93%	98,08%	Tidak Efisiensi
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	98,53%	1,47%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100,10%	99,74%	0,26%
4	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	121,10%	88,03%	11,97%
5	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	101%	94,36%	5,64%
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	98,51%	96,47%	Tidak Efisiensi
7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	100,62%	87,63%	12,37%

8	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	100%	95,76%	4,24%
9	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	102,90%	94,06%	5,94%
10	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	105,17%	90,82%	9,18%
11	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	108%	97,85%	2,15%

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada capaian indikator kinerja dan besaran sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila dapat tercapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang direncanakan. Dari 11 (sebelas) sasaran strategis, terdapat 9 (sembilan) sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, kinerjanya mencapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,47%.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kinerjanya 100,1% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,26%.
3. Meningkatnya PDRB sektor unggulan, kinerjanya mencapai 121,1% dengan efisiensi anggaran sebesar 11,97%.
4. Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah, kinerjanya mencapai 101% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,64%.
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur, kinerjanya 100,62% dengan efisiensi anggaran sebesar 12,37%.
6. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, kinerjanya mencapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 4,24%.
7. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, kinerjanya mencapai 102,9% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,94%.
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, kinerjanya mencapai 105,17% dengan efisiensi anggaran sebesar 9,18%.
9. Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal, kinerjanya mencapai 108% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,15%.

CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas Pembantuan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Adapun dasar Hukum Pelaporan dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6794);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Samosir

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Samosir menerima 1 (satu) tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yaitu dari DIPA UPTP Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan.

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3. 1. Tugas Pembantuan Pusat

3. 1. 1. Bidang Ketenagakerjaan

a. Target Kinerja

Dasar Hukum	: DIPA UPTP Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan Tahun Anggaran 2024 Nomor 026.13.2.451094/2024
Program	: Pelatihan dan Pendidikan Vokasi
Kegiatan	: Pelatihan berbasis kompetensi

b. Realisasi

Bahwa telah terlaksana kegiatan Pelatihan Kerja bagi masyarakat, tenaga kerja dan pencari kerja dengan 9 paket pelatihan dengan total jumlah peserta 144 orang dengan realisasi terlaksananya kegiatan sebesar 100%	
Anggaran	: Rp. 714.661.000,-
Realisasi Anggaran	: Rp. 709.661.000,-
Persentase	: 99,30%

Secara rinci capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dilihat dalam matriks dibawah ini:

3.3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Ketenagakerjaan RI	DIPA UPTP Balai Besar Pelatihan Voksi dan Produktivitas (BBPVP) Medan 026.13.2.451 094/2024	Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kegiatan : Pelatihan Bidang Industri Output dan Rincian Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di Samosir sebanyak 9 Paket dengan rincian 1. Pengolahan Hasilpertanian/Pembuat an Roti dan Kue Paket 1 2. Tata kecantikan Penataan rambut junior paket 2 3. Menjahit Kebaya paket 3 4. Menjahit Kebaya paket 4 5. Tata Kecantikan Merias pengantin gaun panjang paket 5 6. Menjahit Pakaian Wanita dewasa Paket 6 7. Instalasi Listrik Rumah Sederhana paket 7 8. Perhotelan Housekeeping paket 8 9. Menjahit Asisten Pakaian Wanita Paket 9	Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir	UPTD BLK Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan	714.661.000	709.661.000	99,30	Terlaksananya Pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di BLK sebanyak 7 Paket dengan peserta sebanyak 122 orang. Jumlah peserta per paket sebanyak 16 orang	100	

3.4. Permasalahan dan Kendala

Secara Khusus dalam hal pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan membutuhkan waktu dalam proses Sosialisasi dan pencarian peserta pelatihan sehingga berdampak pada proses waktu pelaksanaan paket pelatihan.

Secara umum Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan adalah :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada di UPTD BLK
2. Tidak adanya instruktur ASN yang dapat mendukung proses pelatihan
3. Alokasi anggaran terkait Cost Sharing dari DAU yang masih belum mendukung pelaksanaan Tugas Pembantuan
4. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Dalam hal penyerapan anggaran kinerja yang dilaksanakan sudah dilaksanakan dengan maksimal dimana penyerapan anggaran dari alokasi anggaran keseluruhan mencapai 99% dan realisasi capaian kinerja maksimal yaitu 100% dalam hal pelaksanaan kegiatan yang telah ditugaskan.

3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Program Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dapat berlanjut dan berkesinambungan di tahun-tahun yang akan datang serta alokasi anggaran dan kuota yang diberikan agar ditambah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Samosir dan dapat mewujudkan masyarakat Samosir yang lebih baik. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Samosir akan tetap berkoordinasi terkait pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dari kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sebagaimana amanat pasal 18 Undang-Undang 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu prioritas daerah otonom adalah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Prioritas pelayanan dasar yang dimaksud dalam undang-undang telah ditetapkan ketentuan minimal yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan tersebut ditetapkan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Kabupaten Samosir pada tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Samosir telah melaksanakan ketentuan pelaksanaan Standar Pelayanan minimal melalui perangkat daerah. Adapun penerapan SPM tersebut dilaksanakan pada 5 urusan yakni:

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum
4. Urusan Perumahan Rakyat
5. Ketentraman dan Ketertiban umum

Capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal masing- masing urusan disampaikan sebagai berikut:

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

OPD Pelaksana: Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

1. Pendidikan anak usia dini

2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	2	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%

4.1.3. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 4.2
Realisasi Penerapan SPM Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	1	Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	78,21%
			Jumlah anak usia 5 – 6 tahun	
2	Pendidikan Dasar	2	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	89,84%
		a.	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar	94,26%
			Jumlah anak usia 7-12	
		b.	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama	81,76%
			Jumlah anak usia 13-15 tahun	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
3	Pendidikan Kesenjangan	3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	9,22
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama	13
			Jumlah anak usia 7-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	522

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pendidikan melaksanakan 1 Program, 4 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.69.510.606.550 dengan realisasi sebesar Rp.66.034.419.966. Secara rinci dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran Pendidikan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	69.510.606.550	66.034.419.966
1	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	47.353.566.692	44.991.296.581
1.1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	535.200.000	492.634.850
1.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	200.000.000	189.551.600
1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.249.071.410	5.962.769.453
1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	824.877.041	647.220.750
1.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	441.938.000	424.956.050
1.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.250.000.000	1.187.528.640
1.7	Pengadaan Mebel Sekolah	3.076.649.972	2.988.233.925
1.8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	250.000.000	242.500.000
1.9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	200.000.000	90.000.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1.10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	857.279.893	787.446.000
1.11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.623.600.000	1.435.050.000
1.12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	297.990.000	233.737.100
1.13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	437.546.119	409.923.845
1.14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18.038.240.000	17.921.858.112
1.15	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.394.831.340	1.351.546.550
1.16	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	146.100.000	143.174.000
1.17	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	114.531.150	79.077.000
1.18	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	39.403.500	30.328.880
1.19	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	369.223.000	361.772.500
1.20	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	97.386.500	86.460.000
1.21	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.067.000	35.126.000
1.22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	193.300.902	183.657.000
1.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	842.877.506	732.054.386
1.24	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	216.000.000	158.795.000
1.25	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	87.564.000	65.514.000
1.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.494.889.359	8.750.380.940
2	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>18.019.293.858</i>	<i>17.239.342.045</i>
2.1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	194.000.000	184.153.700
2.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.061.126.239	1.859.239.509
2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	387.909.000	338.034.700
2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	250.110.000	150.173.100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	489.232.000	425.238.000
2.6	Pengadaan Mebel Sekolah	466.390.000	441.235.100
2.7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	150.000.000	143.550.000
2.8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	56.925.000	56.900.000
2.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	533.314.000	505.835.350
2.10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	699.999.998	616.485.000
2.11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	149.999.934	120.442.608
2.12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	118.097.687	83.095.900
2.13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.000.000.000	10.987.996.428
2.14	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	72.262.000	61.171.500
2.15	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	112.661.000	98.058.500
2.16	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	13.047.000	12.673.000
2.17	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	81.394.000	73.300.000
2.18	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	25.000.000	24.988.000
2.19	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.970.000	18.340.000
2.20	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	48.750.000	39.684.000
2.21	Pembangunan Ruang Kelas Baru	388.000.000	368.280.800
2.22	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	162.218.000	107.658.000
2.23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100.000.000	99.225.000
2.24	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	171.999.900	171.883.250
2.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	265.888.100	251.700.600
3	<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	<i>4.071.686.000</i>	<i>3.795.201.340</i>
3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	586.283.000	550.053.890

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
3.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	50.000.000	47.397.400
3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	189.400.000	179.424.660
3.4	Pengadaan Mebel PAUD	48.800.000	39.797.300
3.5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	128.000.000	88.908.000
3.6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000.000	99.802.000
3.7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	294.000.000	256.590.000
3.8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	270.087.000	257.366.290
3.9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	103.760.000	100.295.000
3.10	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.029.360.000	2.029.360.000
3.11	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	16.190.000	11.840.000
3.12	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	47.800.000	38.505.000
3.13	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.200.000	25.355.000
3.14	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	67.066.000	20.520.000
3.15	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	25.740.000	-
3.16	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	78.000.000	49.986.800
4	<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	66.060.000	8.580.000
4.1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	34.560.000	-
4.2	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.500.000	240.000
4.3	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	13.500.000	2.850.000
4.4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3.000.000	1.500.000
4.5	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4.500.000	.990.000

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Samosir didukung oleh Tenaga Kerja dari Dinas Pendidikan, Guru PAUD, Guru

SD, Guru SMP dan Pengawas Sekolah serta dari Dinas Pendidikan. Total dukungan personil dalam untuk pencapaian SPM bidang Pendidikan sebanyak 2.366 Orang. Secara rinci dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.4
Dukungan Personil Pendidikan

NO	STATUS	JUMLAH	RINCIAN							
			GOLONGAN			PENDIDIKAN				
			II	III	IV	SMP	SMA	D1	S1/DIV	S2
1	PNS dan CPNS	1,453	67	1067	319	2	73	24	1,322	32
2	P3K	237	-	-	-	0	3	0	234	-
3	GTT/PTT	620	-	-	-	11	94	47	467	1
4	THL	26	-	-	-	-	-	17	9	-
	Jumlah	2.366	67	1067	319	13	170	88	2.032	33

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Samosir adalah target pencapaian 100 persen yang masih sulit untuk dicapai, disamping itu kendala yang dihadapi yakni minimnya anggaran

Solusi

Mengoptimalkan anggaran yang ada dan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM bidang pendidikan.

4.2. URUSAN KESEHATAN

OPD Pelaksana: Dinas Kesehatan Kab.Samosir, RSUD dr. Hadrianus Sinaga Panguruan, Puskesmas se-Kab.Samosir

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Terdapat 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM oleh daerah dijabarkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 4.5
Target Pencapaian SPM Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan kesehatan balita;	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus (DM)	Jumlah warga negara penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Jumlah warga negara terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

4.2.3. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 4.6
Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	85,46%
		Jumlah ibu hamil $\frac{1.370}{1.603} \times 100\%$	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	99,68%
		Jumlah ibu bersalin $\frac{1.556}{1.561} \times 100\%$	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	97,37%
		Jumlah bayi baru lahir $\frac{1.520}{1.561} \times 100\%$	
4	Pelayanan kesehatan balita;	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	81,20%
		Jumlah balita $\frac{8.740}{10.764} \times 100\%$	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		Jumlah anak usia pendidikan dasar $\frac{27.094}{27.094} \times 100\%$	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,67%
		Jumlah orang usia 15-59 tahun $\frac{28.631}{85.030} \times 100\%$	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA		REALISASI
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	14.921	100%
		Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas	-----x 100% 14.921	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.168	20,54%
		Jumlah penderita hipertensi	----- x 100% 39.768	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	929	58,76%
		Jumlah penderita DM	----- x 100% 1.581	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	378	189%
		Jumlah penderita Persentase ODGJ	----- x 100% 200	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.382	100%
		Jumlah penderita TBC di Kabupaten	----- x 100% 2.382	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	3.355	97,02%
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten	----- x 100% 3.458	

4.2.4. Alokasi Anggaran

Dalam pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kesehatan melaksanakan 1 Program, 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.346.536.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.310.822.634,-. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	346.536.800	310.822.634
1.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237	346.536.800	310.822.634
1.1.1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	15.678.600	15.678.600
1.1.2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	57.922.200	57.600.000
1.1.3	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	214.089.000	197.984.034
1.1.4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	26.847.000	11.520.000
1.1.5	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32.000.000	28.040.000

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sebanyak 572 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.8
Dukungan Personil Kesehatan

NO	STATUS	JLH	RINCIAN										
			GOLONGAN				PENDIDIKAN						
			I	II	III	IV	SMP	SMA	D1	DIII	S1/DIV	S2	S3
1	PNS dan CPNS	525	-	243	266	16	-	-	2	404	112	7	0
2	P3K	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
3	GTT/PTT	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	THL	24	-	-	-	-	1	16	-	6	1	-	-
	Jumlah	572	0	243	266	16	1	16	2	433	113	7	0

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan tidak ada permasalahan yang dihadapi.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis pelayanan Dasar yang dilaksanakan dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal untuk urusan Pekerjaan Umum yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.9
Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

4.3.3. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 4.10
Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah yang dilayani	419	88,21%
		Jumlah yang harus dilayani	----- x 100% 475	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah yang dilayani	400	100%
		Jumlah yang harus dilayani	----- x 100% 400	

4.3.4. Alokasi Anggaran

Dalam pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kesehatan melaksanakan 2 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar

Rp.10.620.394,61,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.204.910.648,-
Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Alokasi Anggaran Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.820.687.611	7.411.838.648
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638	9.820.687.611	7.411.838.648
1.1.1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	350.000.000	261.887.600
1.1.2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.299.999.952	6.363.333.287
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	220.687.659	169.381.861
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	799.707.000	793.072.000
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559	799.707.000	793.072.000
2.1.1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	799.707.000	793.072.000
	Total	10.620.394.611	8.204.910.648

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12
Dukungan Personil Pekerjaan Umum

NO	STATUS	JUMLAH	RINCIAN									
			GOLONGAN				PENDIDIKAN					
			I	II	III	IV	SMP	SMA	D1	S1/ DIV	S2	S3
1	PNS dan CPNS	8	-	1	5	2	-	1	-	7	1	-
2	P3K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GTT/PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	THL	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Jumlah	11	3	1	5	2	-	3	-	7	1	-

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dalam penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum yaitu:

1. Ketersediaan SDM untuk mendata langsung pengguna air minum dan sanitasi, jenis jaringan yang digunakan, sumber air yang digunakan
2. Minimnya ketersediaan anggaran
3. Masalah lahan yang dilalui jalur pipa
4. Sumber air yang kurang di daerah perbukitan

Solusi ataupun tindaklanjut yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas diantaranya:

1. Pemerintah Desa/ Kelurahan harus memberikan jumlah data pemanfaat SPAM yang ada dalam jumlah jiwa baik dalam jaringan saluran rumah tangga ataupun dalam bentuk komunal
2. Mengupayakan anggaran atau kerjasama dengan pihak lain
3. Melakukan mediasi dengan masyarakat
4. Membuat bak-bak penampungan air hujan

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan yaitu:

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Bahwa pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh 1 (satu) OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.13
Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%

4.4.3. Realisasi Pencapaian SPM

Tabel 4.14
Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	- -----x 100%	-
		Jumlah Warga Negara yang terkena bencana	-	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	- -----x 100%	-
		Jumlah Warga Negara yang terdampak relokasi program pemerintah	-	

Terkait tidak adanya capaian penyelenggaraan urusan perumahan rakyat tersebut disebabkan beberapa hal yaitu bahwa tidak ada masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni hal ini disebabkan bahwa masyarakat yang terdampak diberikan nilai penggantian yang wajar (tidak dalam bentuk penyediaan fasilitasi rumah layak huni)

4.4.4. Program dan Alokasi Anggaran

Untuk Mencapai SPM Urusan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan tidak menampung anggaran untuk pelaksanaan program pengembangan perumahan.

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam Pelaksanaan SPM di Bidang Perumahan Rakyat adalah sebanyak 11 Orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.15
Dukungan Personil Perumahan Rakyat

NO	STATUS	JL H	RINCIAN									
			GOLONGAN				PENDIDIKAN					
			I	II	III	IV	SMP	SM A	D1	S1/ DIV	S2	S3
1	PNS dan CPNS	8	-	1	5	2	-	1	-	7	1	-
2	P3K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GTT/PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	THL	3	3	-	-	-	--	3	-	-	-	-
	Jumlah	11	3	1	5	2	-	3	-	7	1	-

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah ketidaktersediaan anggaran

Solusi

Diharapkan ada anggaran untuk dapat melaksanakan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

OPD Pelaksana: Satpol PP Kab.Samosir dan BPBD Kab. Samosir

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan untuk urusan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten yang telah ditetapkan oleh Pemerintah adalah:

- Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelayanan informasi rawan bencana;

- c) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Tabel 4.16
Target Pencapaian SPM Trantibum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
2	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
4	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.	100%
5	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%

4.5.3. Realisasi SPM

Tabel 4.17
Realisasi SPM Trantibum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah Penduduk Kab.Samosir (usia > 5)	$\frac{70}{111.662} \times 100\%$ 0,06%
2	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Penduduk Kab.Samosir	$\frac{20}{149.875} \times 100\%$ 0,01%
3	Pelayanan penyelamatan dan	Jumlah warga negara yang mendapatkan penyelamatan dan	0

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA		REALISASI
	evakuasi korban bencana	evakuasi	-----x 100% 0	-
		Jumlah korban bencana yang memerlukan evakuasi		
4	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara.	113.350 -----x 100%	75,63%
		Jumlah penduduk di Kabupaten Samosir	149.875	
5	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	450 -----x 100%	100%
		Jumlah Kebakaran	450	

Terkait Pelayanan dan Penyelamatan Evakuasi korban bencana dijelaskan bahwa pada tahun 2024 tidak ada korban bencana yang memerlukan evakuasi sehingga tidak ada layanan penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan.

4.5.4. Alokasi Anggaran dan Program Kegiatan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman dan Ketertiban umum dilaksanakan pada 2 (dua) Perangkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir. Dalam pencapaian penerapan bidang keamanan dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kesehatan melaksanakan 4 Program, 5 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1,572,393,917,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1,349,233,200,-. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Alokasi Anggran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 4.18

Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.786.000	263.814.888
1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn	359.786.000	263.814.888
1.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.060.000	126.412.509

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1.1.2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	13.800.000	13.025.000
1.1.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.926.000	124.377.379
2	Program Penanggulangan Bencana	136.861.312	100.659.289
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	40.102.289	28.334.289
2.1.1	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	96.759.023	72.325.000
Jumlah		496.647.312	364.474.677

b. Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 4.19
Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	802.288.625	715.326.417
1.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	802.288.625	715.326.417
1.1.1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	171.778.125	171.605.292
1.1.2	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, oembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	571.280.000	509.100.000
1.1.3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	59.230.500	34.621.125
2	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah Kabupaten/Kota	138.655.980	135.330.000
2.1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	138.655.980	135.330.000
2.1.1	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	138.655.980	135.330.000
3	Pencegahan Penanggulangan,	134.802.000	134.102.606

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
	Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan Berbahaya dan beracun, Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	134.802.000	134.102.606
3.1.1	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	134.802.000	134.102.606
	Jumlah	1.075.746.605	950.137.898

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibum sebanyak 139 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Samosir

Tabel 4.20
Dukungan Personil Penanggulangan Bencana

NO	STATUS	JUMLAH	RINCIAN									
			GOLONGAN				PENDIDIKAN					
			I	II	III	IV	SMP	SMA	D1	S1/DIV	S2	S3
1	PNS dan CPNS	13		3	8	2	-	3	1	9	-	-
2	THL	8		-	-	-	-	6	2	-	-	-
	Jumlah	21		3	8	2	-	9	3	9	-	-

b. Satpol PP Kab.Samosir

Tabel 4.21
Dukungan Personil Satpol PP

NO	STATUS	JUMLAH	RINCIAN									
			GOLONGAN				PENDIDIKAN					
			I	II	III	IV	SMP	SMA	D1	S1/DIV	S2	S3
1	PNS dan CPNS	42	-	15	21	5	1	16	1	21	3	-
4	THL	76	-	-	-	-	-	68	-	8	-	-
	Jumlah	118	-	19	14	2	1	93	1	29	3	-

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Tahapan pengumpulan data:
 1. Sulit untuk menentukan kriteria layanan;
 2. Sulitnya berkoordinasi dengan pihak terkait;
 3. kurangnya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana saat pengumpulan data;
 4. Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil dan masih menggunakan estimasi berdasarkan jumlah penduduk.
2. Tahapan penghitungan kebutuhan SPM:
 1. Pengumpul data sulit untuk menghitung kebutuhan dan alokasi SPM;
 2. Pengumpul data sulit untuk menterjemahkan indikator layanan dasar;
 3. Pengumpul data sulit untuk menghitung item, penganggaran seperti barang, jasa dan SDM.
3. Tahapan perencanaan dan penganggaran
 1. Perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan belum sesuai nomenklatur SPM;
 2. Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan tidak semua SPM dapat terpenuhi;
 3. Belum semua indikator SPM dapat diintegrasikan ke dalam Dokumen RPJMD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
4. Tahapan pelaksanaan SPM:
 1. Belum tersedia anggaran untuk pelaksanaan SPM;
 2. Masih kurangnya personil pelaksana kegiatan SPM;
 3. Medan yang sangat sulit;
 4. Kurangnya SDM dalam Pelaporan sehingga belum tergambar penerapan SPM di Daerah.

b. Solusi

1. Tahapan pengumpulan data:
 1. Meningkatkan kualitas petugas pengumpul data;
 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi dengan pihak terkait;
 3. Memaksimalkan sumber daya aparatur untuk melaksanakan pengumpulan data;
 4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Tahapan penghitungan kebutuhan SPM:
 1. Memaksimalkan kebutuhan alokasi anggaran SPM;
 2. Memaksimalkan pengumpul data.
3. Tahapan perencanaan dan penganggaran
 1. Merencanakan dan memprogramkan anggaran terkait SPM;
 2. Memaksimalkan anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan SPM;
 3. Memaksimalkan perencanaan dan program ke dalam dokumen RPJMD, Renstra dan Renja.

4. Tahapan pelaksanaan SPM:
 1. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan SPM;
 2. Menyediakan personil pelaksanaan kegiatan SPM;
 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait;
 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas dalam pelaporan kegiatan penerapan SPM.

4.6. URUSAN SOSIAL

OPD Pelaksana: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Samosir

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota

4.6.2. Target Pencapaian SPM di Daerah

Tabel 4.22
Target Pencapaian SPM Sosial

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%

4.6.3. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial

Tabel 4.23
Realisasi Pencapaian SPM Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA		REALISASI
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	245 -----x 100% 298	82,21%
		Jumlah penyandang disabilitas		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	53 -----x 100% 70	75,71%
		Jumlah anak terlantar		
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.032 -----x 100% 1.235	83,56%
		Jumlah lanjut usia terlantar		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	4 ----x 100% 4	100%
		Jumlah gelandangan dan pengemis		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	64 ----x 100% 64	100%
		Jumlah warga negara yang terdampak bencana		

4.6.4. Alokasi Anggaran

Tahun Anggaran 2022 Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial adalah senilai 955.758.694 dengan persentase realisasi anggaran 68,45%.

Tabel 4.24
Alokasi Anggaran SPM Sosial

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	725.583.750	657.738.000
1.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	725.583.750	657.738.000
1.1.1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	725.583.750	657.738.000
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	64.599.650	62.350.000
2.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	64.599.650	62.350.000
2.1.1	Penyediaan Makanan	64.599.650	62.350.000
Jumlah		790.183.400	720.088.000

4.6.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang melaksanakan SPM urusan sosial masih sangat minim yaitu sebanyak 7 Orang.

Tabel 4.25
Dukungan Personil Sosial

NO	STATUS	JUMLAH	RINCIAN									
			GOLONGAN				PENDIDIKAN					
			I	II	III	IV	SMP	SMA	D1	S1/DIV	S2	S3
1	PNS dan CPNS	5	-	1	4	-	-	-	1	3	1	-
2	THL	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	Jumlah	7	-	1	4	-	-	1	1	4	1	-

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya anggaran dan SDM, penambahan anggaran diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pencapaian

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir ini disusun sebagai rangkuman pelaksanaan seluruh capaian program dan kegiatan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan selama tahun 2023 di Kabupaten Samosir berdasarkan indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan instrumen untuk melihat sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan otonomi daerah. Kami menyadari dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024 masih terdapat berbagai kekurangan pelayanan sebagai akibat dari kompleksnya tugas-tugas dan tuntutan masyarakat yang seluruhnya tidak dapat ditampung dan dilayani. Sementara itu, Kabupaten Samosir masih mengalami keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Namun melalui upaya dan kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir serta dukungan dari segenap pihak, Pemerintah Kabupaten Samosir niscaya dapat mewujudkan **“Samosir yang sejahtera dan bermartabat secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan”**.

Oleh karena itu, melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, kami berharap bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat selain menjadikannya sebagai bahan evaluasi, juga kiranya dapat dijadikan sebagai bahan dalam memberi pengawasan, pembinaan serta sebagai bahan dalam memberikan bantuan berupa alokasi anggaran yang memadai guna mendukung dan menunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Samosir secara maksimal pada tahun-tahun yang akan datang.

 **BUPATI SAMOSIR,**

VANDIKO T. GULTOM